



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

FACHRI AIDULSYAH

KAMPUS, ISLAM, DAN POLITIK:

**DINAMIKA ELITE POLITIK DAN KEGALAUAN
IDENTITAS GERAKAN TARBİYAH PASCAREFORMASI**



KAMPUS, ISLAM, DAN POLITIK:

**DINAMIKA ELITE POLITIK DAN KEGALAUAN
IDENTITAS GERAKAN TARBİYAH PASCAREFORMASI**

Buku ini tidak diperjualbelikan

Diterbitkan pertama pada 2023 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

FACHRI AIDULSYAH

KAMPUS, ISLAM, DAN POLITIK:

DINAMIKA ELITE POLITIK DAN KEGALAUAN
IDENTITAS GERAKAN TARBIYAH PASCAREFORMASI

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan

© 2023 Fachri Aidulsyah

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kampus, Islam, dan Politik: Dinamika Elite Politik dan Kegagalan Identitas Gerakan Tarbiyah Pascareformasi/Fachri Aidulsyah–Jakarta: Penerbit BRIN, 2023.

xxi + 173 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-623-8052-90-5 (e-book)

1. Islam dan Politik
2. Partai Politik
3. Pascareformasi

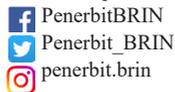
297.272

Copy editor : Anton Winarko
Proofreader : Emsa Ayudia Putri & Noviasuti Putri Indrasari
Penata isi : Dyah Arum Kusumastuti
Desainer sampul : E. Hellen Kustanti & Meita Safitri
Fotografer : Fachri Aidulsyah

Cetakan pertama : Agustus 2023



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B. J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id



Buku ini tidak diperjualbelikan

Buku ini didedikasikan untuk
Almarhumah Hj. Nunung Husniah
(1962–2020)

Buku ini tidak diperjualbelikan

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
PENGANTAR PENERBIT	xiii
PRAKATA	xv
BAB 1 POLITIK, DAKWAH, DAN KAMPUS: MENDAYUNG DI ANTARA TIGA SEBERANG	1
A. Struktur Kesempatan Politik: Bingkai Ideologisasi dan Mobilisasi.....	8
B. <i>Fundamentalisme, Pragmatisme</i> , dan <i>Split</i> Identitas: Narasi dan Implikasi	10
C. Lokus dan Periodisasi	16
D. Struktur Pembahasan	16
BAB 2 TRAJEKTORI SEJARAH DAKWAH PKS: KARAKTERISTIK TRANSMISI GERAKAN ISLAM TIMUR-TENGAH DI INDONESIA	19

A.	Marginalisasi Politik Islam Era Orde Baru: Akar Kebangkitan (Kembali) Transmisi Gerakan Islam	21
B.	Empat Aktor Penting Penyebar Gerakan Tarbiyah di Indonesia.....	45
C.	Asal Mula dan Fase Ideologis Gerakan Tarbiyah di Indonesia: Sebuah Analisis.....	57
BAB 3	MEMPERJUANGKAN IDEOLOGI GERAKAN: ANTARA PURIFIKASI DAN POLITISASI	67
A.	Arkeologi (Ideologi) Dakwah Gerakan Tarbiyah: Konseptualisasi Aksi.....	67
B.	Bermula dari Universitas: Kontestasi Gerakan Tarbiyah dan Dinamika Islamisasi Kampus di Indonesia	69
C.	Dilema Dakwah Kampus: Antara Perjuangan Politik Partai dan Perjuangan Politik Umat.....	106
BAB 4	DARI PKS KE UNIVERSITAS: PENGARUH PERTARUNGAN WACANA ELITE DALAM MEMENGARUHI LOGIKA DAKWAH KAMPUS	113
A.	Memahami Dinamika Elite PKS: Antara Kontestasi dan Kolektivitas	116
B.	Dinamika Pembentukan Agen Jamaah: Antara Harapan dan Oligarki.....	130
C.	<i>Split</i> Identitas: Antara Purifikasi vs. Syariatisasi “Kebijakan”	133
BAB 5	MENEROPONG MASA DEPAN GERAKAN TARBIYAH DI INDONESIA	139
	Daftar Pustaka	143
	Lampiran	155
	Indeks	163
	Tentang Penulis	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Konfigurasi Paradigma dan Genealogi Murobbi	42
Gambar 3.1	Majalah Mahasiswa tentang Kiprah Politik Gerakan Tarbiyah	83
Gambar 3.2	Aksi Kontroversial BEM SI	84
Gambar 3.3	Aksi Demo BEM SI di KPK	85
Gambar 3.4	Spanduk Besar Propaganda BEM UI dalam Menanggapi Kisruh UI	91
Gambar 3.5	Ilustrasi Alur Otonomi Dakwah Kampus	98
Gambar 3.6	Selusin PKS.....	107
Gambar 4.1	Ikhtisar Konfigurasi Struktur DPP PKS 2005–2010.....	118
Gambar 4.2	Ikhtisar Konfigurasi Struktur DPP PKS 2010–2015	118
Gambar 4.3	Ikhtisar Konfigurasi Struktur DPP PKS 2015–2020.....	127
Gambar 4.4	Pengunduran Massal Kepengurusan PKS di Daerah	128
Gambar 4.5	Kontra GARBI	129
Gambar 4.6	Baju Baru Wajah Lama: Dari PKS ke Gelora	130
Gambar 4.7	Alur Pembinaan dan Takwim Kader PKS.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Anggota KAMMI dan FSLDK Tahun 2019.....	74
Tabel 3.2	Daftar Presiden Mahasiswa UI yang Dimenangkan Gerakan Tarbiyah tahun 1994–2014.....	77
Tabel 3.3	Daftar Presiden Mahasiswa UGM yang Dimenangkan oleh Gerakan Tarbiyah tahun 1997–2014.....	78
Tabel 3.4	Daftar Presiden KM ITB Dimenangkan oleh Gerakan Tarbiyah tahun 1998–2013.....	80
Tabel 3.5	Komparasi Majelis Syura Kampus di UI, UGM, dan ITB.....	103
Tabel 3.6	Perolehan suara PK/PKS Sejak Pemilu 1998–2014 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta.....	108
Tabel 4.1	Anggota dan Pemilih PKS tahun 1999, 2004, 2009	131
Tabel 4.2	Perkiraan Proporsi Kader PKS Tahun 2010.....	133

PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kondisi sosial politik Indonesia mengalami perubahan akibat momentum reformasi pada akhir 1990-an. Gerakan-gerakan Islam yang sebelumnya dibungkam dan ditekan di masa pemerintahan Orde Baru agar tidak hidup, justru menjadi berkembang pesat. Gerakan-gerakan politik berasaskan Islam ini bermunculan dari berbagai kalangan, di antaranya komunitas dakwah kampus beranggotakan kelompok anak muda yang akrab dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin atau dikenal dengan gerakan Tarbiyah. Dari kelompok kecil inilah selanjutnya gerakan dakwah bertransformasi menggunakan partai politik (Partai Keadilan [PK]/Partai Keadilan Sejahtera [PKS])

sebagai payungnya, dan ikut serta dalam gelombang perubahan seiring dengan momentum multipartai kala itu.

Ide-ide dan gagasan politik gerakan Tarbiyah PK(S) menarik untuk dipelajari karena ia hadir sebagai kelompok Islam baru yang tidak memiliki hubungan kuat dengan rezim negara ataupun berakar pada organisasi massa Islam dominan yang berkembang di Indonesia. Dalam perjalanannya, gerakan politik tersebut mengalami pasang-surut akibat pertarungan diskursus di level elite hingga di level kampus sebagai cikal-bakal kader-kadernya.

Buku ini mengulas dan menganalisis tren ideologi politik gerakan Tarbiyah sebagai tulang punggung PK/PKS yang berawal dari era Reformasi di tiga lokasi utama yang direpresentasikan oleh tiga kampus besar di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Buku ini juga mengulas tentang implikasi yang harus diterima oleh gerakan keagamaan kampus ketika mereka terlibat dalam kegiatan gerakan politik elektoral tersebut, baik berupa konflik internal, dilema ideologis, hingga berujung pada kegalauan identitas.

Kami berharap buku ini dapat menjadi bahan kajian yang menarik bagi pegiat sosial politik, akademisi, dan pembaca yang memiliki minat dalam isu-isu politik. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan

PRAKATA

Buku ini merupakan hasil dari perjalanan panjang penulis dalam memahami dinamika sosial dan politik gerakan Tarbiyah dan perangkat politiknya yang bernama Partai Keadilan/Partai Keadilan Sejahtera (PK/PKS). Telah lebih dari satu dekade “persentuhan” antara penulis dan objek yang ditelitinya, yang semestinya buku ini selesai di tahun 2015 silam. Namun, adanya dinamika politik yang berkembang pascatahun tersebut—yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut—telah berimplikasi pada terlambatnya buku yang sebenarnya sudah harus benar-benar terbit saat itu.

Akan tetapi tidak mengapa, sebab “semua pasti ada hikmahnya”, begitulah satu motivasi yang bisa menggambarkan “puasa terbit”-nya buku ini selama lebih dari 7 tahun. Berkat keterlambatan tersebut, buku ini turut menelusuri dinamika sosial-politik politik PKS pascatahun 2015 yang ternyata sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Bagaimana tidak, 2015 bukan hanya pertanda bagi PKS untuk memasuki fase “bersih-bersih” kader yang selama ini dianggap berseberangan dengan ritme dan idealisme ideologi Partai, melainkan juga—dalam konteks nasional—merupakan persentuhannya dengan realitas polarisasi politik yang terjadi antara kelompok “nasionalis-sekuler” dan “islamistis”, antara mereka yang disimbolisasikan sebagai “cebong” dan “kampret” pada tahun 2016 dan “mengeras” di tahun

Buku ini tidak diperjualbelikan

2019. Tentunya, PKS, dengan identitasnya sebagai partai dakwah dan Islam, turut berada di dalam bagian dari realitas tersebut.

Di sisi lain, tidak dimungkiri bahwa klimaks dari konflik tertutup yang berubah menjadi konflik terbuka di tubuh PKS—yang terjadi selama lebih dari satu dekade hingga berujung pada “keluar” dan “dikeluarkannya” sejumlah elite hingga terbentuknya partai tandingan, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)—telah memunculkan realitas sosial politik yang baru, yang belum pernah diprediksi sebelumnya. Realitas tersebut justru makin menancapkan “kegamangan” demi “kegamangan” politik yang dijalankan oleh kader atau massa yang tak berujung, yang terus-menerus makin memperkuat akar yang biasa oleh kelompok milenial masa kini disebut sebagai “kegalauan” atau “*split*” identitas di antara mereka. Akar kegalauan inilah yang termanifestasi akibat dari pertarungan hegemonik, konflik, dan perpecahan yang terjadi di tubuh elite.

Realitas tersebut telah mengakibatkan semangat akan loyalitas, militansi, idealisme, *pragmatisme*, dan juga tindakan-tindakan kontradiktif yang dilakukan oleh massa—dalam hal ini aktivis dakwah kampus (ADK)—bergerak secara bersama-sama dan menciptakan “normalitas” yang baru. Di satu sisi, gerakan tersebut menuntut akan adanya peningkatan terhadap loyalitas dan militansi kader dalam berorganisasi dan berjama’ah, di sisi lain, ia juga melestarikan dan mengafirmasi tindakan-tindakan absurd dan kontradiktif—khususnya dalam hal politik—sebagai suatu hal yang normal. Implikasinya, definisi akan “kesalehan”, “ketaatan”, dan “pembangkangan” antarmassa gerakan menjadi absurd dan politis, yang lebih ditentukan oleh subjektivitas elite dan preferensi-preferensi kepentingan politik tertentu dibandingkan preferensi-preferensi ideologi itu sendiri.

Sejatinya, kondisi *split* identitas yang terjadi di antara massa PKS hari-hari ini adalah suatu hal yang lumrah terjadi. Bahkan, jauh sebelum era politik modern berkembang seperti saat ini, anomali yang diakibatkan oleh pertautan antara politik dan agama sudah terjadi sejak berabad-abad silam lamanya. Pada Zaman Kegelapan Eropa misalnya, keberlangsungan teokrasi yang dijalankan oleh Gereja telah

melahirkan “pembungkaman” terhadap ilmu pengetahuan dan mereka yang kritis, sebagai suatu hal yang bersifat “heretik”. Di dalam dunia Islam, hal tersebut pun terjadi. Fenomena Arab Spring yang terjadi selama satu dekade ini misalnya, menunjukkan adanya “frustrasi” yang ditunjukkan oleh massa terhadap pemerintahan yang otoriter dan korup, yang berbalut legitimasi dalil-dalil agama.

Pernyataan ini bukan bertujuan untuk mengampayekan pandangan politik sekuler ataupun menyahihkan politik agama secara dogmatis, melainkan lebih jauh daripada itu. Acapkali ide dan ideologi gerakan agama yang dianut harus tergadaikan dalam struktur kelembagaan politik formal. Apa yang diharapkan dari agama sebagai faktor determinan, penyeimbang, dan menjalankan fungsi pemantauan atau pengawasan terhadap politik, justru yang terjadi adalah sebaliknya, ia menjadi alat yang digunakan untuk memberikan “fatwa halal” terhadap anomali-anomali tindakan politik itu sendiri. Kurang lebih seperti itulah satu “cara pandang” umum yang kian mengakar dan menjalar di antara khalayak umum. Suatu pandangan yang tidak sepenuhnya salah, tetapi jika ditelaah lebih lanjut, juga tidak sepenuhnya benar. Meskipun begitu, ada satu benang merah yang dapat diambil, yaitu isu *pragmatisme* dan idealisme dalam partai ideologis atau keagamaan merupakan “PR” yang tidak akan pernah tuntas sepanjang masa. Ia akan lahir sejak awal kelahiran partai itu berdiri, dan akan mati sejak akhir kematian partai itu sendiri. Artinya, dualisme itu adalah satu kesatuan dari partai ideologis yang tidak akan pernah bisa dipisahkan satu sama lain. Semua pakar politik pun sangat sadar dengan hal itu. Namun, bagaimanakah semua hal tersebut berimplikasi terhadap massa?

Pada titik inilah, buku ini mencoba hadir untuk memberikan penyegaran dalam melihat realitas tersebut. Kebanyakan para cendekiawan lebih memfokuskan diri pada melihat persoalan pertarungan dan perebutan struktur politik, melakukan pemetaan terhadap aktor dan agensi yang ikut serta dalam meramaikan kontestasi tersebut, tetapi abai dalam melihat implikasinya terhadap massa, bahkan dalam menelaah dinamika Zaman Kegelapan Eropa dan Arab Spring sekali-

pun. Dalam hal inilah, buku ini mencoba menitikberatkan persoalan konflik elite dan implikasinya terhadap “kegalauan identitas” di tubuh massa. “Kegalauan” yang selama ini alpa direfleksikan oleh elite, tetapi ia terus-menerus mengakar dan menciptakan absurditas-absurditas baru. Lebih jauh, “kegalauan” ini juga tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik antara kepentingan elite dan keselarasan (atau ketidaksielarannya) dengan rezim negara. Apa yang diharapkan dari “bersih-bersih kader” yang telah dianggap bertentangan dari jati diri ideologi Partai dianggap sebagai “obat mujarab” dalam menyelesaikan persoalan ambiguitas identitas massa, justru menjadi babak baru yang telah mengakibatkan “penebalan” dan “pengerasan” terhadap fenomena *split* identitas itu sendiri.

Terakhir, penulis sangat berbangga jikalau di kemudian hari bisa mendapatkan *insight*, masukan, kritik, ataupun saran dari pembaca yang budiman untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sedang penulis telaah dalam buku ini. Dan tentunya, buku ini hanya akan bermakna jikalau ada yang mendiskusikan dan membacanya. Oleh karena itu, selamat membaca!

Hamburg, 10 Maret 2023

Fachri Aidulsyah

Buku ini tidak diperjualbelikan

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini tentu tidaklah lahir dengan sendirinya. Sebaliknya, ia terlahir dari hasil pertumpuan dan pertepatan dari berbagai pihak dan pengalaman. Buku yang berawal dari tugas skripsi di Departemen Sosiologi Fisipol UGM sekitar tahun 2014 ini tidak akan tersusun tanpa adanya gemblengan dari Mas Derajad Sulisty, selaku dosen pembimbing yang telah hampir setiap pekan meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan hingga skripsi tersebut dapat disidangkan tepat pada bulan Maret 2015 silam. Oleh karenanya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Derajad alias Widhy atas segala saran dan bimbingannya hingga buku ini “terlahir”. Hal yang juga tidak kalah penting ialah dukungan dari “Trio Masyaikh” yang selama ini menjadi panglima kajian sosiologi agama di UGM, yaitu Kiai Dr. Najib Azca, Syekh Dr. Hakimul Ikhwan, dan Mullah Dr. M. Supraja yang selama ini mendukung perjalanan akademik penulis, termasuk dalam menyelesaikan buku ini. Kepada Trio Masyaikh, saya ucapkan *jazaakallah khairan katsiiran* atas segala bimbingan dan *sharing*-nya, tempat selama ini penulis bernaung.

Sosok yang tidak kalah penting dan teramat penting ialah teman, guru, sekaligus orang yang menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan intelektual ini, Akhi Zaki Arrobi yang selama ini sudah berkenan “diganggu dan digedor-gedor pintu kostnya”, mengizinkan penulis menginap sehari-hari hingga terkadang harus ditegur oleh Bapak

Buku ini tidak diperjualbelikan

Kost, yang menjadi tempat awal dan mula diskusi berbagai macam hal, dari soal-soal yang berbau akademik hingga hal-hal yang lebih daripada hal tersebut. Darinyalah, dan agar tidak ingin “kalah” dengan karyanya yang sudah lebih dahulu terbit, buku ini pun “dipaksa” untuk sesegera mungkin lahir. *Matur sembah suwun sanget, Akh.*

Tentunya, buku ini juga tidak akan pernah “lahir” jikalau tidak didukung oleh seorang bidadari bersama peri kecil yang terus-menerus kebersamai penulis. Mereka adalah *qurrata a'yun*, penyejuk hati, yang menjadi “mata air” yang jernih yang siap sedia dihirup di saat dahaga, yang terus mengembuskan rohnya untuk terus-menerus membimbing penulis menuju kata “pulang”, menuju tempat terindah yang selama ini disebut dengan “Rumah”. Ya, ia adalah sosok yang selama ini penulis sebut dengan “Ay” dan “Ara”, yang tak perlu disebutkan namanya dalam lembaran ini, sebab ia telah terpatri di dalam hati penulis yang paling dalam. Terima kasih Ay, Ara.

Lalu, ada sosok yang paling setia dalam mendoakan penulis selama ini, yang dari kandungannya penulis lahir, yang terus-menerus menempa penulis untuk mengenal makna hidup, membangkitkan penulis ketika “terjatuh”, dan terus-menerus mengingatkannya ketika ia terlalu berjalan menanjak “ke atas”. Ia yang mengajari penulis akan “makna hidup” dan “pengorbanan”. Seandainya doa-doa itu tidak terurai, tak ‘kan mungkin penulis berada di kondisi seperti saat ini. Seandainya “harap-harap” itu tidak terendus di setiap lelah dan keringat yang membasuh, tak ‘kan mungkin “nyala” api semangat terus berkobar untuk menuntaskan semua ini. Ia adalah anugerah dari Allah Swt, yang teramat berarti dalam hidup ini, yang telah mengenalkan penulis untuk mengenal Tuhan Yang Esa, yang telah menjadi madrasah bagi penulis sejak dari dalam kandungan hingga ke liang lahad nanti. Ya, ialah sosok yang selama ini penulis sebut dengan “Mamah”.

Allahu Rabbi adalah segala-galanya tempat tertuju tumpuan dan ungkapan puji dan syukur penulis. Atas segala kehendak dan rida-Nyalah buku ini terlahir. Tanpa rahmat dan kuasa-Nya, tak ‘kan mungkin harap dan keinginan menulis untuk menerbitkan

buku ini terjadi. Maka segala puja dan puji syukur terbaik hanyalah tertuju pada Allah Yang Esa, tak ada hal lain selain berserah dan kembali kepada-Nya. Terlebih, Allah jualah yang telah memberikan karunia-Nya dalam hidup ini yang mempertemukan penulis dengan seorang yang kini penulis rindui, yang darinyalah penulis pertama kali mengenal kebesaran Allah dan keteladanan Rasul-Nya, dan tidak lain, sekali lagi, ialah yang selama ini penulis panggil dengan sebutan “Mamah”. Karenanyalah, buku ini terkhusus ditujukan untuk ibunda penulis, Almarhumah Hj. Nunung Husniah. Semoga buku ini menjadi pengobat rindu kepadamu, Mah.

Yang juga tidak luput, tentu ada banyak doa dan harap dari keluarga, sanak saudara, dan juga kerabat lainnya yang teramat banyak jika diuntai satu per satu. Meskipun begitu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang terdalam. Penulis mendoakan agar doa-doa dan kebaikan demi kebaikan yang telah memberikan spirit bagi penulis, berbuah doa dan kebaikan demi kebaikan lainnya, baik bagi diri pribadi maupun bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Fachri Aidulsyah

BAB 1

POLITIK, DAKWAH, DAN KAMPUS: MENDAYUNG DI ANTARA TIGA SEBERANG

Gelombang arus reformasi telah memberikan napas baru dalam kehidupan demokrasi yang pada tahun-tahun sebelumnya dibungkam oleh Orde Baru. Pertumbuhan partai politik pun tak dapat terhindarkan sebagai konsekuensi logis dari pilar demokrasi yang memberikan hak sebesar-besarnya bagi setiap masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik kenegaraan, salah satunya adalah berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasikan rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik yang absah (Mujani dkk., 2012). Dari momentum keterbukaan keran demokrasi inilah titik tolak Jamaah Tarbiyah, yang berawal dari sebuah komunitas kajian mahasiswa muslim, bertransformasi menjadi partai politik yang berasaskan Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Secara fundamental, fenomena kehadiran PKS dalam perhelatan politik elektoral Indonesia adalah suatu hal yang berbeda dengan

partai politik Islam lainnya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Perbedaan tersebut bukan hanya terlihat dari perbedaan akar sejarah, ideologi, *political goals*, pengorganisasian partai politik, dan basis massa elektoral, melainkan juga pada suatu hal yang esensial terhadap fenomena keberagaman-masyarakat Indonesia hingga saat ini. Tidak seperti PPP, PKB, PAN, dan PBB yang memiliki keterhubungan dengan organisasi massa Islam di Indonesia, PKS justru hadir sebagai kelompok Islam baru yang tidak memiliki keterhubungan kuat dengan rezim negara ataupun berakar pada organisasi massa Islam dominan yang berkembang di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, Al-Washiyah, Jamaat Khair, dan sebagainya (Rahmat, 2003; Machmudi, 2008; Hamayotsu, 2011, 972–973; Hasan, 2012, 18). Jamaah Tarbiyah yang baru berkembang di tahun 1970-an mencoba memanfaatkan Era Reformasi dan “demokratisasi” yang terjadi di tahun 1998 untuk melakukan akselerasi fase ideologis mereka dari fase sosialisasi (*mihwar sya’bi*) yang bergerak di ranah pembentukan organisasi pemberdayaan masyarakat menuju fase institusionalisasi gerakan (*mihwar muassasi*) dengan cara membentuk organisasi formal gerakan yang terintegrasi dengan partai politik. Pada fase inilah, kader dakwah Jamaah Tarbiyah yang mayoritas berasal dari aktivis dakwah kampus (ADK) menciptakan dua strategi berikut:

- 1) melakukan lompatan berpikir dan bertindak, yang awalnya seka-dar bergerak di level dakwah kampus dan masyarakat (*harakah daawiyah*) harus bermetamorfosis, bergerak di level dakwah politik pemerintahan (*hizb as-siyasi*); dan
- 2) melakukan sublimasi orientasi dakwah yang menuntut adanya negosiasi antara ideologi dan identitas Islam dengan kontes-tasi politik yang bersifat praktis dan pragmatis (antara suara dan syariat) sebagai sebuah konsekuensi simbiosis Islam dan demokrasi (Waluyo, 2005; Hasan, 2012; Muhtadi, 2012).

Dari kondisi adanya pembauran antara identitas Jamaah dan Partai inilah, Jamaah Tarbiyah *cum* PK(S) yang pada tahun 1998

hanya memiliki 33.000 kader menuntut adanya sebuah adagium integratif yang menekankan bahwa “*al-Jama’ah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-Jama’ah*” (Jamaah adalah Partai dan Partai adalah Jamaah), sebagai sebuah strategi taktis yang menekankan bahwa seluruh kader gerakan Tarbiyah adalah mesin utama Partai. Selain itu, ideolog dan elite gerakan Tabiyah bermetamorfosis sebagai Majelis Syura (Majelis Permusyawaratan) dan Majelis Riqabah ‘Ammah (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) Partai yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan ideologi Jamaah Tarbiyah dan strategi politik Partai (Waluyo, 2005, 29; Munandar, 2011, 136; Ali, 2012).¹

Dalam perjalanannya, praktik dari indoktrinasi baru tersebut menyisakan “pekerjaan rumah” yang tidak mudah untuk diselesaikan, baik bagi elite maupun simpatisan Partai hingga hari ini. Di kalangan cendekiawan, khususnya dalam rentang waktu 2004–2015, indoktrinasi tersebut dianggap menjadi stimulus yang mengakibatkan terjadinya faksionalisasi di internal Partai, antara faksi keadilan yang lebih berorientasi pada idealisme serta konsistensi ideologi Islam dalam berpolitik dan faksi kesejahteraan yang secara pragmatis menuntut adanya moderasi ideologis dengan cara melakukan apa yang disebut sebagai “*de-nationalized and de-culturalized Shari’ah*” yang berorientasi pada eskalasi suara dan keuntungan kuasa lainnya (Roy, 2004 dalam Munandar, 2011; Woodward, dkk., 2013). Dalam konteks global, apa yang dialami oleh PKS merupakan sebuah fenomena yang mafhum, yaitu partai-partai Islam di dunia sering kali mengalami

¹ Secara mendetail, Noor (2015, 125 & 128) menjelaskan bahwa Majelis Syura PKS tidak hanya berperan dalam menentukan figur-figur yang akan mengisi jabatan penting partai seperti posisi pimpinan dalam Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Dewan Pengurus Partai (DPP), Dewan Syariah (DS), maupun Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), tetapi juga berperan dalam menuntun proses pembuatan kebijakan partai dan memiliki kewajiban dalam merespons hal-hal yang dianggap penting dan segera. Dalam konteks PKS, DPP sendiri lebih diperankan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi dalam menjalankan segenap kebijakan yang telah digariskan oleh Majelis Syura. Lebih lanjut, DPP sendiri memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kegiatannya kepada Majelis Syura setiap 6 bulan sebagai mekanisme kontrol terhadap DPP itu sendiri.

dilema antara tetap berkomitmen terhadap visi *islamizing* negara atau justru melakukan revisi terhadapnya dan teguh dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (Jonasson, 2004; Wickham, 2004a; Brocker & Künkler, 2013). Hanya saja, dalam konteks Indonesia, “dilema” partai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sering kali bukan disebabkan adanya perbedaan antara visi ideologis dan prinsip demokrasi, melainkan yang lebih substantif, yaitu fenomena friksi kekuasaan internal dan *pragmatisme* politik yang berkompromi terhadap fenomena klientelisme dan *rent-seeking* sebagai sebuah akibat dari minimnya infrastruktur ekonomi-politik yang dimiliki oleh partai (Robinson & Hadiz, 2004; Hamayotsu, 2013; Aspinall, 2013; Noor, 2015).

Atas kondisi inilah, PKS yang merupakan *the modern cadre party* yang pada tahun 2009 memiliki 532.803 kader dengan 75,9% di antaranya merupakan usia produktif (25–44 tahun), yang mayoritas merupakan lulusan sarjana dari berbagai universitas baik dalam dan luar negeri, tetapi hingga Pilkada 2017–2018, dari 272 calon kepala daerah yang diusung oleh PKS, 80%nya berasal dari luar kader PKS, demikian menurut Mardani Ali Sera (2018). Hingga Juli tahun 2008, PKS telah berpartisipasi dan beraliansi dengan partai sekuler dan Nasrani pada 57 Pilkada yang berlangsung di berbagai provinsi dan kabupaten (Hwang, 2010, 661). Dalam konteks Pemilu pada tahun 2009, tiga dari enam anggota legislatif fraksi PKS yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah bukan berasal dari kader Partai. Bahkan, dalam konteks yang lebih ekstrem, sepuluh anggota legislatif kabupaten/kota yang dimiliki oleh PKS di Provinsi Papua berasal dari kader beragama nasrani (Soekanto, 2012).

Sudah barang tentu, kondisi ini memberikan sebuah kontroversi bagi kader Partai di berbagai level. Hanya saja, isu kontroversial tersebut cukup mampu diredam oleh setiap kelompok elite dengan cara melakukan apa yang disebut oleh Schwedler (2006) sebagai “*boundaries of justifiable action*” (batasan tindakan yang dapat dibenarkan) terhadap pilihan-pilihan politik yang diambil oleh PKS di tengah menguatnya kohesivitas dan *collective awareness* terhadap agenda dakwah

Islam yang ditekankan di setiap level kaderisasi (Hasan, 2009; Hidayat, 2012; Tomsa, 2012, Brocker dan Künkler, 2013). Meskipun demikian, bukan berarti kondisi ini 100% tidak memiliki efek. Setidaknya, hal tersebut dilihat dari tiga hal berikut.

- 1) Makin terbentuknya kerentanan terhadap “*hidden conflict*” yang terjadi antarfaksi di level elite PKS yang selama ini bisa dimana-jemeni oleh ideologi dan hierarki legitimasi kepartaian. Namun, kini hal tersebut telah menjadi “bom waktu”, yaitu konflik internal tereskalasi ke ranah publik hingga berujung pada pemecatan dan pembentukan partai “tandingan”.
- 2) Makin timbulnya pertanyaan dari simpatisan PKS tentang kredibilitas PKS terhadap konsistensi dakwah Islam, sementara ia gagal dalam meyakinkan *potential new supporter* yang menganggap bahwa moderasi PKS hanyalah sebuah *pragmatisme* yang bercampur dengan “kamufase politik” dari agenda ideologis yang sebenarnya (Tomsa, 2012; Woodward dkk., 2013).
- 3) Adanya *split* antara diskursus ideologi dengan praksis politik praktis yang makin mengakibatkan *split* identitas bagi para kader, khususnya kader di level akar rumput.

Hingga saat ini, banyak cendekiawan politik yang cenderung “abai” terhadap fenomena *split* identitas sebagaimana yang digambarkan pada poin ketiga. Padahal, fenomena *split* identitas adalah suatu hal yang sangat penting untuk ditinjau lebih jauh sebagai bagian dari sebuah efek moderasi. Dalam konteks demokrasi, fenomena *split* identitas bisa dilihat dalam tiga pendekatan berikut.

- 1) Secara positif, fenomena *split* identitas bisa berdampak positif dan negatif dilihat dari seberapa besar tingkat penerimaan publik terhadap sebuah identitas ganda tersebut.
- 2) Secara kritis, fenomena *split* identitas bisa berdampak positif dan negatif dilihat dari sejauh mana identitas ganda mampu mengakselerasikan pencapaian tujuan ideologis suatu partai atau gerakan.
- 3) Secara ideologis, fenomena *split* identitas sangat menentukan kualitas regenerasi sekaligus degenerasi agen dakwah *cum* politik

yang akan melanjutkan estafet perjuangan politik ideologis di kemudian hari.

Hanya saja, untuk melihat fenomena *split* identitas secara komprehensif, dibutuhkan sebuah kerangka teoretis yang mampu menganalisis fenomena tersebut dengan perspektif sosio-historis untuk menelaah dinamika transformasi ideologi dan politik gerakan secara sinkronis (perubahan pada saat-saat tertentu) dalam kerangka waktu yang bersifat diakronis (lama-sinambung) yang berimplikasi pada kontinuitas atau diskontinuitas tujuan gerakan serta implikasinya terhadap *form and result* agensi regenerasi gerakan. Untuk menggambarkan realitas dinamika ideologi dan politik PKS, dibutuhkan instrumen-instrumen teoretis lainnya yang secara empiris melakukan analisis mendalam terhadap tren karakteristik transformasi ideologi gerakan yang terjadi di PKS serta faktor-faktor material apa saja yang memengaruhi transformasi tersebut. Selain itu, yang menjadi subjek *cum* objek terpenting dalam membaca PKS bukan hanya mereka yang saat ini menduduki posisi terpenting di PKS, melainkan juga mereka yang pernah atau bergerak di bidang aktivis dakwah kampus (ADK), yang hingga hari ini merupakan sumber sentral pembentukan elite dan *resource* utama kader Partai.

Berdasarkan gambaran tersebut, setidaknya terdapat tiga poin penting yang dibahas dalam buku ini, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bagaimana proses kelahiran ideologi PKS serta bagaimana ideologi tersebut memaknai pertautan antara dakwah Islam, kampus, dan politik? Buku ini mencoba menelaah faktor determinan apa saja yang menyebabkan kebutuhan bagi sebagian kelompok untuk melahirkan gerakan Tarbiyah di Indonesia, serta proses-proses derivasi dan transformasi ideologi yang dikembangkan oleh PKS sehingga cenderung mengalami proses moderasi yang “dikesankan” oleh sebagian elite berbeda dengan semangat cita-cita ideologi yang selama ini dikembangkan olehnya.
- 2) Bagaimana cara PKS tetap mampu membangun loyalitas kader ketika memasuki proses moderasi dengan mengeluarkan

kebijakan-kebijakan yang cenderung paradoks dengan nilai-nilai ideologi yang selama ini ditanam dan diamini oleh para kader? Bagaimana pula cara PKS mampu membangun loyalitas di internal elite di tengah konflik yang berkepanjangan? Secara empiris, buku ini mencoba menelaah instrumen indoktrinasi dan konteks apa saja yang membuat elite PKS mampu memengaruhi *internal group structure* serta eksistensi “*boundaries of justifiable action*” yang dilakukan olehnya.

- 3) Apa yang menjadi efek determinan dari proses pragmatisasi dan moderasi terhadap kualitas regenerasi dan degenerasi agen dakwah *cum* politik yang akan melanjutkan estafet perjuangan ideologi di kemudian hari? Perubahan fundamental apa saja yang terjadi terhadap model kaderisasi dan diskursus ideologi PKS sehingga menciptakan terjadinya gejala *split* identitas di antara kader mereka—khususnya di tingkat ADK? Secara gradual, buku ini mencoba menelaah implikasi determinan yang muncul dari perubahan corak ideologi terhadap kualitas *cum* identitas kader yang selama ini menjadi ujung tombak dari perjuangan politik PKS.

Secara *rigid*, setiap poin tersebut memiliki fokus yang berbeda-beda, tetapi saling berkorelasi satu sama lain. Untuk menjawab poin pertama, objek utama dari buku ini ialah mereka yang saat ini menjadi pelaku sejarah pembentukan ideologi gerakan Tarbiyah, baik mereka yang saat ini duduk sebagai elite maupun mereka yang memilih jalur perjuangan di luar Jamaah Tarbiyah (PKS) itu sendiri. Adapun untuk menjawab poin kedua, objek lanjutan dari buku ini ialah mereka yang merupakan generasi kedua gerakan Tarbiyah yang kini menjadi pengurus sekaligus aktor determinan yang sangat menentukan arah kebijakan politik PKS. Untuk menjawab poin ketiga, objek akhir dari buku ini adalah ADK yang merupakan *resource* utama kaderisasi Partai. Secara umum, buku ini ditujukan untuk melihat tren ideologi politik PKS yang selama ini berkembang hingga tahun 2014 dan mengambil contoh-contoh studi kasus yang berkembang di tiga lokasi, yaitu Jabodetabek, Bandung, dan Yogyakarta yang direpresen-

tasikan oleh Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Tiga kampus tersebut adalah kampus terbaik di Indonesia, ketiganya juga merupakan kampus utama yang selama ini mendinamisasikan ideologi gerakan Tarbiyah baik di tingkat universitas, regional, maupun nasional dengan berbagai ragam karakteristiknya.

A. Struktur Kesempatan Politik: Bingkai Ideologisasi dan Mobilisasi

Buku ini berupaya menganalisis pertarungan diskursus ideologi dengan menggunakan *political opportunity structure*, yaitu melalui pendekatan struktural elite dalam menyadari adanya *kesempatan* dan *ancaman*, baik terhadap *maintaining ideological discourse* maupun *maintaining ideological movement*, serta cara elite mampu menangani berbagai kesulitan-kesulitan tersebut (Wiktorowicz, 2012). McAdam dkk. (1996, 10) menguraikan empat dimensi *political opportunity structure*, yaitu

- 1) keterbukaan atau ketertutupan relatif dari sistem dan institusi politik formal,
- 2) stabilitas atau instabilitas aliansi kelompok elite, baik di internal maupun eksternal yang secara tipikal menentukan sebuah komunitas politik,
- 3) ada atau tidaknya sekutu di tingkat elite, dan
- 4) potensi negara untuk melakukan represi.

Keempat dimensi tersebut sangat menentukan ketertutupan maupun keterbukaan keran politik bagi setiap gerakan sosial. Meminjam pendekatan McAdam dkk. (1996), Wickham (2004b), dan Bayat (2005), guna mengoptimalkan *kesempatan* dan *ancaman* bagi setiap elite yang berkontestasi dalam memenangkan pertarungan hegemoni diskursus ideologi, setiap elite berupaya untuk membangun instrumen-instrumen hegemonik lainnya di tengah beragamnya latar belakang setiap elite, heterogenitas kepentingan yang berbeda-beda serta level pemahaman antarelite dan partisipan yang tidak sama.

Instrumen-instrumen tersebut, yaitu 1) membangun struktur mobilisasi, 2) *framing*, 3) repertoar, 4) simbolisasi identitas, serta 5) *managing and maintaining*.

Dalam tataran operasional, meminjam pendekatan McAdam dkk. (1996) dan Wickham (2004b) bahwa *political opportunity structure* yang dimanfaatkan oleh elite dalam melakukan konstruksi terhadap ritme ideologis, struktur mobilisasi, *framing*, dan serangkaian instrumen lainnya dilakukan dalam *form and approaching* yang dinamis sekaligus beragam, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Mikro-mobilisasi, yaitu elite memelihara hubungan-hubungan intensif dan humanis kepada setiap partisipan.
- 2) Insentif-insentif selektif, yaitu setiap gerakan ideologis memberikan berbagai keuntungan baik material, psikologis, maupun emosional yang bergantung pada level loyalitas partisipasi. Adanya berbagai keuntungan yang bersifat “selektif” telah memotivasi bagi setiap partisipan untuk setia terhadap gerakan tersebut.
- 3) Pembingkai motivasi, yaitu elite gerakan terampil dalam melakukan mobilisasi para partisipan untuk ikut terlibat dalam aktivisme politik dengan cara menggelorakan “seruan perjuangan” atau alasan-alasan normatif lainnya.

Bagi Wickham (2004b, 232), keberhasilan tiga aktivitas tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas elite terhadap tiga hal berikut.

- 1) sejauh mana elite mampu melakukan penyesuaian ideologi dengan realitas;
- 2) kredibilitas dan keefektifan para agen dalam melakukan serangkaian tiga aktivitas tersebut; dan
- 3) membentuk solidaritas kelompok-kecil secara intens di tingkat akar rumput.

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dipahami bahwa buku ini berupaya untuk melihat pertarungan diskursus ideologi yang dipandang sebagai suatu hal yang bersifat kompleks, dinamis dan sering kali tidak selalu bermuara pada strategi pertarungan yang bersifat

materialis (baik ekonomi maupun politik) tetapi juga pada suatu hal yang bersifat nonmaterialis (*truth*, kohesivitas sosial).

B. *Fundamentalisme, Pragmatisme, dan Split Identitas: Narasi dan Implikasi*

Dalam subteoretis ini, terminologi *fundamentalisme* dan *pragmatisme* digunakan untuk mengarakterisasi kelompok elite yang saling bertarung dalam menghegemoni diskursus ideologi PKS dan implikasinya terhadap fenomena *split* identitas yang terjadi di akar rumput. Dalam konteks gerakan politik Islam, harus dipahami bahwa terminologi *fundamentalisme* dan *pragmatisme* merupakan suatu hal yang cukup krusial. Konstruksi identitas “Islam” yang multitafsir—dalam hal penerimaannya terhadap konsep demokrasi—menjadi “pekerjaan rumah” tersendiri bagi seluruh umat muslim, yang telah mengakibatkan terbentuknya dua identitas Islam, yaitu antara mereka yang “menerima demokrasi” dan “anti-demokrasi”. Di sisi lain, mereka yang menerima nilai-nilai demokrasi juga tidak sepenuhnya *firm* terhadap tafsir “demokrasi dalam Islam” yang bersifat absolut. Dari kondisi inilah, dalam konteks Indonesia, dengan meminjam pendekatan teoretis Moussalli (dalam Noor, 2006) yang menekankan bahwa di dalam negara demokratis, masyarakat muslim terbagi ke dalam dua faksi, yaitu *Islamic radical fundamentalism* yang menekankan pada sisi-sisi ideologisasi dan *Islamic moderate fundamentalism* yang menekankan pada sisi-sisi pragmatisasi.

Hanya saja, berbeda dengan pendekatan Moussalli tersebut yang menekankan bahwa *radical fundamentalism* ditafsirkan sebagai kelompok yang bersifat eksklusif dan sangat resistan terhadap demokrasi, tetapi dalam konteks Indonesia—khususnya pascaaksi Parade Tauhid dan Aksi Bela Islam 212—fenomena sebagian gerakan Islam transnasional dan Salafisme saat ini (seperti Jamaah Tabligh, Wahdah Islamiyah, dan Jihadis) menunjukkan hal yang berbeda. Di satu sisi, mereka menolak demokrasi sebagai sistem pemerintahan, tetapi di sisi lain mereka ikut terlibat dalam proses Pemilu sebagai bagian dari kontribusi mereka dalam proyek pemenangan “pemimpin

Muslim”. Selain itu, konstruksi teoretis ini juga berbeda dengan perspektif Moussalli tentang *moderate fundamentalism*, yang ditafsirkan sebagai kelompok yang mampu berdialog dan berkompromi dengan sistem demokrasi dan menjadikannya alat untuk mengakselerasikan tujuan ideologis mereka, yang juga tidaklah sepenuhnya tepat. Dalam konteks global, fenomena partai Islamic Action Front (IAP) di Jordan, Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki, Hizb Al-Wasat di Mesir, Front Islamique du Salut (FIS) di Aljazair, Jamaat-i-Islami di Bangladesh, Justice and Development Party di Maroko, dan PKS di Indonesia yang merupakan representasi dari *Islamic moderate fundamentalism* justru makin larut ke dalam sistem *secular-state* serta mengaburkan semangat “visi Islam” yang sebelumnya selalu didengungkan (Wickham, 2004a; Schwedler, 2006; Fealy & Bubalo, 2007; Kurzman & Naqvi, 2010). Baik Sánchez-Cuenca (2004), Tezcúr (2010), maupun Menchik (2016) menilai bahwa faktor determinan fenomena moderasi kaum fundamentalis dipengaruhi oleh keikutsertaan mereka dalam kontestasi politik negara.

Dalam konteks partai politik, para cendekiawan menilai bahwa fenomena pragmatisasi dan moderasi partai ideologis merupakan hasil dari proses refleksi, yaitu tidak semua nilai dan praksis ideologi bisa sesuai dengan preferensi publik serta *fix and mix* dengan sistem demokrasi. Dalam rangka memenangkan kompetisi demokrasi dan bertarung memperebutkan suara massa yang makin pluralistik, baik Partai Sosialis di Eropa Barat, Partai Pekerja di Amerika Latin, Partai Katolik di Belgia maupun partai-partai Islam di Timur-Tengah bersepakat bahwa kebutuhan perubahan *ideological position to median position* menjadi suatu hal yang sangat penting (Kalyvas, 1998; Sánchez-Cuenca, 2004; Kurzman & Naqvi, 2010; Hidayat, 2012; Buehler, 2012). Dalam konteks partai Islam, baik Tezcúr (2010) maupun Kurzman dan Naqvi (2010) menilai bahwa upaya moderasi partai Islam—dengan seperangkat nilai-nilai pragmatismenya—sangat ditentukan oleh konteks karakteristik rezim yang sedang berkuasa maupun kapasitas organisasional partai dibandingkan problem praksis ideologis. Dalam sebuah rezim yang otoriter, sifat moderasi partai ideologis dilakukan untuk mengurangi risiko represi negara

Buku ini tidak diperjualbelikan

dan hambatan organisasional yang akan diterima oleh partai politik tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Roy (2003 dalam Fealy & Bubalo, 2007) yang menyatakan bahwa baik di era rezim otoriter maupun demokrasi, partai Islam selalu berada di persimpangan jalan antara memilih normalisasi politik atau justru mengakomodasi negara dengan cara memutuskan untuk bergerak sesuai dengan aturan permainan politik yang ada.

Tidak jauh berbeda dengan konteks Indonesia, secara genealogis Menchik (2016) menilai bahwa fenomena moderasi partai maupun organisasi gerakan Islam di Indonesia adalah suatu hal yang sudah berkembang sejak abad ke-20 yang dimotori oleh perubahan iklim politik-negara. Politik Islam di Indonesia mengalami pergeseran yang signifikan, yaitu pada era 1920-an, gerakan Islam memiliki semangat pan-islamisme yang berorientasi pada terbentuknya Khalifah Islamiyah global. Pada era 1940-an, ia berganti menjadi nasionalisme Islam Indonesia yang berorientasi pada pembentukan negara Islam, kemudian di era 1970-an berganti menjadi Muslim pluralis yang mampu berkolaborasi dengan agama dan ideologi lain dalam menciptakan negara multikultural.

Pada era 2000-an, gerakan Islam berganti menjadi Pasca-islamisme yang menempatkan “Islam” sebagai sebuah sistem sosial-politik yang bersifat komplementer dan tidak lagi sepenuhnya dijadikan sebagai asas. Menchik (2016) menggambarkan setidaknya terdapat tiga faktor yang secara determinan memengaruhi moderasi tersebut, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mayoritas pemilih massa Indonesia yang berkarakter *abangan* tidak memilih lantaran faktor identitas agama, tetapi sangat ditentukan oleh faktor kredibilitas partai politik dalam merasionalisasikan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial, maupun kultural yang cenderung sulit dibahasakan dengan logika syariat.
- 2) Setiap transformasi ideologis menuntut adanya perubahan perilaku politik dan karakteristik regenerasi.

- 3) Adanya pengalaman keberagaman yang berkembang dari setiap individu ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan massa yang bersifat plural².

Hanya saja, harus diakui bahwa baik penekanan teoretis Kalyvas (1998), Sánchez-Cuenca (2004), Buehler (2012), Tezcúr (2010), maupun Menchik (2016) menekankan posisi “ketegangan” dalam ideologi politik Islam terjadi lantaran adanya kebutuhan untuk melakukan “kontekstualisasi” terhadap realitas eksternal, tetapi tidak jeli dalam melihat adanya proses pertarungan diskursus antarelite ideologis serta implikasinya terhadap transformasi identitas dan praktik politik partai. Meskipun secara generalis Buckley (2017 dalam Menchik, 2018) mencoba menyanggah gambaran tersebut dengan menyatakan bahwa realitas modernitas agama yang terjadi saat ini telah berimplikasi pada terjadinya desentralisasi atau pluralisasi otoritas agama dari elite ke sosial media dan sejenisnya, tetapi ia alpa bahwa dalam konteks gerakan ideologis, realitas *shifting authority* tersebut tidaklah sepenuhnya terjadi.

Meskipun demikian, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa fenomena kemenangan elite tertentu dalam melakukan pragmatisasi dan moderasi gerakan ideologis sudah barang tentu memiliki sebuah konsekuensi. Meminjam pendekatan Sánchez-Cuenca (2004, 326), setidaknya konsekuensi yang akan tampak di permukaan adalah ketegangan di internal partai antara faksi ideologis dan pragmatis yang berimplikasi pada *split* identitas dan kerancuan loyalitas kader serta adanya potensi kehilangan suara massa Islamis yang selama ini menjadi basis utama suara partai.

² Sebagaimana terjadi di Mesir, fenomena reorientasi dan moderasi Ikhwānūl Muslimīn yang berkembang tahun 1990-an merupakan sebuah tuntutan generasi muda yang frustrasi terhadap pola gerakan generasi tua yang cenderung eksklusif dan anti-demokrasi yang justru menghambat ruang gerak Ikhwan itu sendiri (Fealy & Bubalo, 2007). Kondisi yang sama juga terjadi di Aljazair dan Yaman ketika FIS (Aljazair) dan Partai Al-Ishlah (Yaman) melakukan moderasi yang cukup ekstrem dengan cara mengafirmasi demokrasi sebagai sebuah sistem yang cocok dengan visi negara Islam (Fealy & Bubalo, 2007; Kurzman & Naqvi, 2010).

Berkaitan dengan konteks PKS, hanya dalam tempo + 6 tahun memasuki sistem demokrasi, pascakegagalan PK dalam mencapai *electoral threshold* di Pemilu tahun 1999, PKS seakan-akan “terpaku” untuk melakukan proses moderasi ideologi yang justru dianggap oleh sebagian cendekiawan telah mengakibatkan terjadinya friksi internal di antara mereka yang memegang teguh landasan ideologis—yang dalam hal ini secara konsisten sistem demokrasi hanya ditafsirkan sebagai “alat kekuasaan” guna melanggengkan penegakan misi ideologi politik Islam—dengan mereka yang memegang nilai-nilai moderat dan *pragmatisme* politik. Kini demokrasi ditafsirkan sebagai “tujuan” serta menafikan narasi-narasi tentang “islamisasi negara” yang selama ini disemai dan menggantinya dengan wacana-wacana nasionalis, pluralis, serta multi-kultural (Bubalo dkk., 2008; Hwang, 2010; Munandar, 2011; Tomsa, 2012; Woodward dkk., 2013). Bagi sebagian elite muda PKS, adanya friksi kedua kubu tersebut juga dipengaruhi oleh adanya dua garis koordinatif Ikhwānul Muslimīn di tingkat global, yaitu antara Ikhwānul Muslimīn yang berpusat di Mesir (yang menjadi basis konsolidasi dan koordinasi utama sebagian elite yang berorientasi pada “ideologi”) dan representasi Ikhwānul Muslimīn yang berpusat di London (yang memiliki koneksi dengan elite yang selama ini diasosiasikan sebagai faksi kesejahteraan atau loyalis Anis Matta [AM]). Meskipun begitu, dengan “keluarnya” mereka yang selama ini diasosiasikan sebagai faksi kesejahteraan dari PKS, hal itu juga menandakan keluarnya mereka dari gerakan Tarbiyah maupun Ikhwānul Muslimīn itu sendiri. Di sisi lain, berkaca pada kegiatan politik PKS pada Pemilu tahun 2019, harus diakui bahwa elite PKS era kepemimpinan orang-orang yang selama diasosiasikan sebagai “elite ideologis” juga melakukan tindakan-tindakan politik yang cenderung moderat, pragmatis, dan transaksional sebagaimana kritik mereka terhadap kelompok oposisi selama ini. Hal tersebut terbukti dari cara PKS juga turut serta terlibat dalam kegiatan politik transaksional selama mendukung pencapresan Prabowo-Sandi. Selain itu, PKS juga menempatkan kembali Adang Daradjatun serta memberikan ruang bagi Achmad Dimiyati Natakusumah, yang merupakan dua sosok

kontroversial dalam isu korupsi, juga beberapa tindakan kriminal lainnya sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKS.

Dalam membaca fenomena moderasi PKS, para cendekiawan lebih banyak terfokus pada persoalan *managing internal* dan elektoral (Hwang, 2010; Hidayat, 2012; Munandar, 2011; Tomsa, 2012; Hamayotsu, 2013; Noor, 2012; Permata, 2008), tetapi alpa bahwa di antara *managing internal* dan elektoral terdapat sebuah isu krusial yang berkaitan dengan proses *hegemony* dan *counter-hegemony* antarfaksi di PKS dalam memengaruhi dominasi struktur, diskursus, dan kebijakan politik yang secara determinan berimplikasi pada kerancuan identitas politik dan elektoral. Baik Munandar (2011), Noor (2012), Tomsa (2012), maupun Hamayotsu (2013) mencoba melakukan studi di internal elite PKS dengan menggunakan pendekatan teoretis tindakan kolektif, pertarungan simbolis, kohesivitas, dan strategi elektoral guna menganalisis keberhasilan PKS dalam menjaga soliditas, baik di tingkat elite maupun akar rumput ketika proses moderasi dan pertarungan faksionalisasi berlangsung. Namun, mereka abai terhadap fenomena *split* identitas—khususnya yang terjadi di tingkat akar rumput—sebagai sebuah implikasi dari fenomena tersebut. Dalam konteks ini, fenomena *split* identitas di tingkat akar rumput harus dimaknai ke dalam dua dimensi, yaitu akar rumput berperan sebagai agen regenerasi politik dan ia juga merupakan mesin utama partai yang berfungsi mengampanyekan agenda politik guna mendongkrak suara partai.

Secara garis besar, fenomena *split* identitas akar rumput PKS telah berimplikasi pada terbentuknya berbagai varian identitas partisipan yang saling bersifat dikotomis dan secara teoretis, telah berimplikasi pula pada beragamnya pengartikulasian kebijakan politik dan strategi perebutan suara PKS yang sering kali berdampak negatif dibandingkan positif. Dalam studi kasus fenomena Pemilu atau Pilkada di beberapa wilayah tertentu, strategi kampanye PKS sering kali ditafsirkan *more inclusive* dengan cara mengampanyekan pasangan calon PKS dengan mengundang artis dangdut seksi, dan *sales promotion girl* (SPG) yang selama ini diharamkan dalam konstruksi “kesalehan simbolis” yang

merupakan ideologi PKS. Selain itu, strategi PKS juga ditafsirkan *more exclusive* yang mengedepankan narasi “ortodoksi Islam” terhadap persaingan calon politik muslim dan non-muslim. Hal itu justru telah mengakibatkan terjadinya ambivalensi kultural sekaligus kehilangan suara massa Islam *abangan*.

C. Lokus dan Periodisasi

Buku ini menjadikan UGM, UI, dan ITB sebagai lokus utama penelitian. Lebih lanjut, buku ini mencoba membatasi penelaahan terhadap dinamika gerakan Islam di tiga kampus tersebut dari tahun 1998–2015. Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat krusial dalam melihat dinamika, konflik, dan kontestasi elite di internal PKS. Setidaknya, terdapat tiga titik krusial yang terjadi semasa tahun 2015 dan sesudahnya, yaitu 1) keberhasilan kelompok ideologis dalam mendominasi struktur kepengurusan Partai, baik di tingkat nasional maupun lokal; 2) tahun konflik yang mengakibatkan terjadinya “pemecatan” dan keluarnya loyalis AM dalam struktur maupun keanggotaan PKS; 3) anomali identitas ADK—baik secara sosial maupun politik—yang dipengaruhi oleh perubahan konstelasi politik PKS itu sendiri.

D. Struktur Pembahasan

Buku ini terbagi dalam lima bab. Pada Bab I, sebagaimana yang telah dijabarkan, buku ini mengulas tentang landasan penelitian dan kerangka teoretis yang menjadi basis analisis utama dalam buku ini. Pada Bab II, buku ini mengulas tentang lintasan sejarah gerakan PKS dan pertautannya dengan transnasionalisme Islam ala Timur-Tengah. Bab ini diawali dengan menguraikan *political opportunity structure* di masa Orde Baru yang telah memberi angin segar bagi transmisi gerakan transnasionalisme Islam ala Timur-Tengah di berbagai Universitas di Indonesia, sekaligus memetakan aktor-aktor terkait di dalamnya. Bab III buku ini berfokus pada pembahasan tentang proses penyemaian ideologi gerakan Tarbiyah serta aktivisme sosial politik yang dijalankan oleh para aktivisnya yang selama ini berkembang di berbagai universitas. Lebih lanjut, bab ini juga menguraikan vari-

Buku ini tidak diperjualbelikan

an jejaring gerakan Tarbiyah yang selama ini terlembagakan, baik di internal maupun eksternal kampus beserta peran dan fungsinya dalam menjalankan proses pengaderan dan mempertahankan ideologi gerakan Tarbiyah di tingkat Mahasiswa. Pada Bab IV, diulas tentang dinamika kontestasi elite PKS dalam memengaruhi ADK. Bab IV juga memetakan pertarungan diskursus elite yang menyertainya, yang berimplikasi pada pembentukan berbagai anomali identitas dan tindakan politik ADK itu sendiri. Terakhir, Bab V buku ini berfokus pada penjabaran atas kesimpulan buku ini.

BAB 2

TRAJEKTORI SEJARAH DAKWAH PKS: KARAKTERISTIK TRANSMISI GERAKAN ISLAM TIMUR- TENGAH DI INDONESIA

Sejarah gerakan dakwah PKS tidak lepas dari momentum kebangkitan politik Islam yang terjadi di hampir seluruh negara muslim di era tahun 1970-an. Pada era tersebut, fenomena kebangkitan politik Islam lebih dimotori oleh kekuatan ekspansi transmisi gerakan ideologis Islam Timur-Tengah yang saling “berebut pengaruh” ke seluruh belahan dunia muslim, terlebih Indonesia. Selain itu, harus diakui bahwa dalam konteks Indonesia, fenomena transmisi gerakan ideologis Islam Timur-Tengah bukanlah suatu barang yang baru. Azra (2005, xix–50) mengungkapkan bahwa perjalanan dakwah Islam di Nusantara yang terjadi sejak sebelum abad XVII sangat dipengaruhi oleh perkembangan Islam di Timur-Tengah. Awalnya, hubungan antara Islam Timur-Tengah diawali oleh hubungan ekonomi dan dagang. Namun, pada abad XVII dan seterusnya hubungan di antara keduanya lebih dipengaruhi oleh transmisi yang berbalut hubungan politik-keagamaan dan hubungan intelektual keagamaan. Hanya saja, berbeda dengan transmisi yang terjadi pada abad XVII dan XVIII yang dimotori oleh gerakan-gerakan revivalisme dan tasawuf, trans-

misi yang terjadi di era 1970-an lebih dimotori oleh gerakan-gerakan Islam reformis-modernis yang berakar dari perkembangan semangat pan-islamisme Jamal al-Din al-Afghani (1839–97) (Noer, 1996; Latif, 2012).

Secara sosio-historis, proses terjadinya transmisi gerakan Islam Timur-Tengah terhadap Indonesia di abad ke-20 dilatarbelakangi oleh sekurang-kurangnya tiga faktor berikut.

- 1) Agama Islam adalah agama yang ekspansif, yaitu “*dakwah*” adalah kewajiban bagi umat Muslim untuk menyebarkan pengaruh agama Islam ke seluruh dunia.
- 2) Adanya kesamaan sejarah kebangsaan yang terjadi sebelum abad ke-20 di hampir seluruh negara yang mayoritas beragama Muslim, terutama Timur Tengah dan India yang menumbuhkan kesamaan kepentingan (*common interest*) untuk membangun setiap negeri mereka bebas dari penjajahan politik dan diskriminasi—baik dari kolonial maupun elite pemerintahan;
- 3) Mayoritas negara Islam merupakan negara berkembang. Oleh karenanya, hampir seluruh negara-negara tersebut tertinggal dalam berbagai sektor seperti pendidikan, militer, dan teknologi dari negara-negara Barat. Segala ketertinggalan itu, yang didukung menguatnya ekspansi imperialisme Barat, telah memaksa negara-negara tersebut mengadopsi ideologi-ideologi Barat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Rahmat, 2003, 20).

Dari kesamaan latar belakang sejarah inilah, ketika memasuki abad ke-20, transmisi gerakan Islam Timur Tengah ke Indonesia makin mengkristal. Inspirasi gerakan-gerakan revolusioner yang berkembang di Timur-Tengah telah menjadi sebuah resonansi perjuangan baru bagi masyarakat muslim Indonesia dalam menghadapi penjajahan kolonialisme maupun otoritarianisme negara.

A. Marginalisasi Politik Islam Era Orde Baru: Akar Kebangkitan (Kembali) Transmisi Gerakan Islam

Berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan munculnya Soeharto dalam pucuk kepemimpinan nasional sejak tahun 1966 telah menumbuhkan harapan besar di banyak kalangan politisi muslim. Rezim baru ini diharapkan membawa angin baru perubahan. Sepak terjang Soeharto di awal kekuasaannya telah memberi kesan-kesan yang baik dan bersahabat bagi kelompok Islam yang kemudian makin memperkuat optimisme bahwa rezim baru ini bakal memberikan posisi yang lebih penting bagi kiprah kelompok Islam di pentas nasional. Soeharto pun seperti memberikan madu bagi komunitas Islam antara lain dengan kebijakan membebaskan para politisi muslim subversif (terutama eks-Majelis Syura Muslim Indonesia-Masyumi) yang dijebloskan ke penjara akibat oposisi kritisnya terhadap kepemimpinan otoriteristik Presiden Soekarno. Kebaikan ini tidak pelak makin memperkuat keyakinan bahwa jenderal penguasa baru tersebut akan bertindak lebih positif terhadap kelompok Islam. Lebih dari itu, beberapa kekuatan politik Islam menilai bahwa diberikannya ruang yang lebih luas dan leluasa kepada mereka dalam kiprah politik kenegaraan menjadi hal yang logis sebagai imbalan atas peranan mereka dalam membat habis golongan kiri (Boland, 1982; Watson, 1994; Mubarak, 2008, 60). Adapun beberapa isu harapan umat Islam kepada Orde Baru kala itu adalah sebagai berikut.

- 1) Menjadikan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD 1945.
- 2) Pemerintah melakukan rehabilitasi partai Islam Masyumi sehingga mendapatkan hak konstitusionalnya untuk berkiprah lagi di kancah perpolitikan nasional saat itu.
- 3) Saat itu pula, Mohammad Hatta meminta izin kepada pemerintah untuk membentuk sebuah partai Islam yang diberi nama Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII) (Watson, 1994; Hefner, 1997; Porter, 2002; Husaini, 2012).

Namun sayangnya, apa yang menjadi janji manis Orde Baru dalam mengkomodasi segala permohonan tersebut tidak kunjung ditepati. Hal yang justru terjadi adalah sebaliknya, Orde Baru kian menunjukkan wajahnya yang sangat membenci politik Islam lantaran kekhawatirannya terhadap upaya massa Islam dalam melakukan islamisasi sistem negara serta memperkuat posisi elite muslim dalam menguasai institusi pemerintahan (Liddle, 1996; Porter, 2002; Kersten, 2017). Secara sistemik, Orde Baru berupaya mempersempit dan melemahkan kekuatan politik Islam dengan dua cara berikut.

- 1) *Soft strategy* dilakukan dengan memberikan berbagai macam subsidi dan pembuatan fasilitas kepada organisasi keagamaan yang berkorporasi dalam bidang sosial, dakwah, dan keagamaan.
- 2) *Hard strategy* dilakukan dengan cara melakukan “diskriminasi” terhadap elite muslim serta “pembersihan” (pemecatan) para aparatur negara yang terlibat dalam aktivisme politik Islam. Dalam strategi ini, bahkan pada tahun 1973, pemerintah tidak segan-segan untuk membatasi ruang gerak partai politik Islam dengan cara melakukan intervensi terhadap partai-partai Islam yang tersisa ketika itu, di antaranya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai NU, Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti), dan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) yang dipaksa untuk bergabung ke dalam fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada tahun 1977, giliran Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) mengalami intervensi rezim untuk bergabung ke dalam fusi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) (Porter, 2002; Mubarak, 2008; Hasan, 2008; Bachtiar, 2011).

Meminjam pendapat Watson (1994, 176–8) yang dirangkum oleh Mubarak (2008, 66) bahwa setidaknya terdapat tiga langkah kebijakan rekayasa rezim Orde Baru dalam memperkecil pengaruh kelompok politik Islam, yaitu sebagai berikut.

Pertama, menghancurkan secara sistematis pengaruh yang dimiliki bekas aktivis Masyumi. Kedua, melakukan penyederhanaan

struktur partai, dengan menggabungkan partai-partai Islam yang ada ke dalam satu partai Islam saja. Dengan melakukan hal ini pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pengendalian. Ketiga, mendorong perkembangan institusi-institusi keagamaan yang tidak memiliki pretensi untuk merebut kekuasaan. Hal ini dilakukan misalnya dengan cara melakukan perbaikan kinerja Departemen Agama, pemberlakuan monopoli pelaksanaan haji, pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan sebagainya.

Karena keterbatasan terhadap ruang politik Islam itulah, berbagai macam kelompok Islam merespons hal tersebut dengan berbeda-beda. Kelompok Islam radikal merespons dengan mendirikan berbagai front, seperti Komando Jihad (1976); Front Pembebasan Muslim (1977); Pola Perjuangan Revolusioner Islam (1978); dan Dewan Revolusioner Islam Indonesia (1980). Sementara itu, kelompok Islam moderat merespons dengan cara yang lebih *soft*, yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga sosial dan dakwah yang secara intrinsik ikut terlibat dalam merespons aktivisme politik Orde Baru—khususnya mengenai isu keagamaan. Salah satu lembaga sosial dan dakwah yang cukup *masyhur* serta memiliki *bargaining* yang signifikan kala itu adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) (Ali, 2012).

1. Kemunculan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII)

Lembaga DDII didirikan pada tahun 1967, diinisiasi oleh Mohammad Natsir, M. Rasjidi³, dan eks-elite Masyumi lainnya, seperti Prawoto

³ Menurut Abu Ridho, AM Rasjidi adalah generasi pertama mahasiswa Indonesia di Mesir yang berkenalan dengan pemikiran Ikhwānul Muslimin. Ini terjadi ketika mereka menghimpun dukungan organisasi-organisasi Islam di Mesir dalam rangka membantu kemerdekaan Indonesia (Rahmat, 2003, 106–107). Menurut Abaza (1999, 70–73), pada tahun 1934, AM. Rasjidi mengambil pelajaran privat pada Sayyed Quthb, seorang ideolog Ikhwanul Mulimin dan belajar pada Syekh Mustafa Abdel-Raziq, Fakultas Filsafat. Begitu pun ketika Mona Abaza mengungkapkan bahwa Kahar Muzakkir yang melanjutkan studi di Kairo sejak tahun 1925–1937 pernah berhubungan dengan Ikhwānul Muslimin maupun Partai Wafd di Kairo. Menurut pendapat penulis, pada dasarnya, pada tahun 1934 Sayyid Quthb belum menjadi barisan Ikhwānul Muslimin. Ketika itu, ia masih menjadi kalangan yang banyak bergelut pada bidang budaya dan partai Wafd. Ia

Mangkusasmita, dan Osman Raliby. Sejak awal, DDII didesain sebagai sebuah lembaga yang secara intrinsik melakukan penyemaian ideologi politik Islam yang saat itu tengah dikekang oleh rezim dengan pendekatan misi dakwah sosial kemasyarakatan. Setidaknya, terdapat tiga peranan DDII yang sangat signifikan di era Orde Baru sebagai berikut.

- 1) DDII secara masif merekrut dan mengaderisasi kalangan akademisi, mahasiswa, dan relawan muslim yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan untuk menjadi mubalig dakwah.
- 2) Di berbagai wilayah, DDII berperan aktif dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mampu memakmurkan masjid, melakukan perbaikan terhadap kurikulum-kurikulum keagamaan—terutama di kalangan pesantren dan kegiatan sosial-keagamaan lainnya, yakni pelayanan kesehatan, diskusi keislaman, dan sebagainya.
- 3) DDII merupakan salah satu lembaga dakwah di Indonesia yang berperan aktif dalam membangun kerja sama dengan berbagai badan dakwah internasional, di antaranya lembaga dakwah yang terdapat di Turki dan Saudi Arabia (Feillard & Madinier, 2011; Platzdasch, 2009; Hasan, 2008; Latif, 2012).

baru terinspirasi Ikhwānul Muslimīn sesudah wafatnya Hasan Al-Banna di tahun 1949. Ia pun baru memasuki keanggotaan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1951.

Ikhwanul Muslimīn sebagai sebuah gerakan Islam yang berdiri pada tahun 1928 telah sejak awal menyebarkan pemikirannya pada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah dan India. K.H. Bustami Darwis misalnya, adalah tokoh Masyumi asal Sumatra Barat yang berdiam di Bandung. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan majalah *SALAM* pada tahun 1987 yang dikutip oleh Sabili, ia menyatakan bahwa interaksinya dengan tokoh-tokoh Ikhwan di Timur Tengah memiliki kesan yang begitu mendalam. Pada tahun 1930 K.H. Bustami Darwis dibina oleh tokoh Ikhwānul Muslimīn, Abul Hasan Ali An-Nadwi. Menurutnya, pemahaman akidah dan akhlak yang ia gunakan banyak diserap dari pemikiran tokoh-tokoh Ikhwan sewaktu ia tinggal dan belajar di India (Irhamsyah, 2010, 44–45). Namun, pernyataan ini juga bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh Roy (1994, 35) bahwa pada tahun 1930 Abul Hasan Ali An-Nadwi masih menjadi agen Jami'at Islami Abul A'la Al-Maududi.

Di penghujung era 1970-an, perubahan peta geopolitik Timur Tengah yang diakibatkan oleh keberhasilan Revolusi Iran telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap re-orientasi kegiatan-kegiatan dakwah DDII dari yang awalnya lebih berfokus terhadap penangkalan kristenisasi, akhirnya juga harus berfokus terhadap penangkalan ekspansi ideologi Syiah. Melalui agenda penangkalan ekspansi ideologi Syiah itulah, organisasi ini menerima banyak bantuan finansial dari Saudi Arabia. Harus diakui bahwa peran Saudi Arabia di dalam kancah politik global menghadapi ancaman yang serius ketika Revolusi Iran berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Syah Reza Pahlevi. Setidaknya, terdapat dua ancaman serius bagi Saudi Arabia saat itu, yaitu

- 1) keberhasilan Revolusi Iran telah menginspirasi dunia Islam untuk berani melawan segala bentuk pemerintahan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti pemerintahan yang otoriter dan monarkis; dan
- 2) adanya upaya Ayatollah Khomeini selaku pemimpin Revolusi Iran agar Makkah dan Madinah diberikan status pengelolaan dan kepemilikan internasional (Hefner, 2000; Fealy & Bubalo, 2007, 45; Jones, 2006; Hasan, 2008).

Sudah barang tentu, dengan berdentungnya opini penggulingan rezim dan pengambilalihan situs peradaban Islam, secara tersirat dan sistemik Iran berkepentingan untuk “mengusik” segala kepentingan ekonomi politik Kerajaan Saudi Arabia. Atas dasar kondisi inilah, Saudi Arabia berusaha keras untuk memproteksi pengaruh Iran dengan cara-cara berikut.

- 1) Di level domestik, Saudi Arabia berusaha untuk menunjukkan komitmennya kepada dunia Islam dengan cara memperketat hukum-hukum syariat di negaranya.
- 2) Di level internasional, Saudi Arabia berusaha untuk mengembuskan gaung-gaung anti-Syiah dengan cara memberikan berbagai bantuan finansial yang diperuntukkan bagi kegiatan dakwah

Islam sekaligus penyebaran paham Salafi-Wahabi ke seluruh dunia Islam (Abuza, 2007, 18; Hasan, 2008, 45).⁴

Dalam konteks DDII, Saudi Arabia memberikan bantuan finansial untuk organisasi tersebut melalui saluran-saluran lembaga sosial Islam Internasional seperti Hai'at Al-Ighatsah al-Islamiyyah al-'Alamiyyah (IIRO), International Islamic Relief Organization/Organisasi Bantuan Islam Internasional), Al-Majelis al-'Alami li'L-Masaajid (WCM, World Council of Mosques/Dewan Masjid Dunia), Al-Nadwat al-'Alamiyyah li al-Shahab al-Islami (WAMY, World Assembly of Muslim Youth/Organisasi Pemuda Muslim Dunia), dan Lajnat Birr Al-Islami (CIC, Committee of Islamic Charity/Panitia Derma Islam) (Hasan, 2008; Meuleman, 2011).

Melalui penguasaan terhadap sumber-sumber dana itulah, secara signifikan DDII berperan dalam kegiatan-kegiatan berikut.

- 1) DDII membiayai berbagai pembangunan masjid, panti yatim piatu, rumah sakit, pembagian buku-buku Islam dan Al-Qur'an secara gratis, maupun pelatihan para dai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
- 2) DDII menjadi perantara sekaligus penghubung organisasi-organisasi Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah, Al Irsyad,

⁴ Harus diakui bahwa gencarnya Saudi Arabia dalam memproteksi paham yang berseberangan dengan sistem monarki negara tersebut sekaligus melakukan ekspansi paham Salafi-Wahabi ke seluruh dunia Islam era 70-an sangat ditopang oleh kuatnya kondisi ekonomi yang dimiliki oleh Saudi Arabia kala itu. Di era tersebut, Saudi Arabia tengah menjadi petro-dollar. Pendapatan negara tersebut tengah meroket disebabkan harga minyak dunia kian melambung tinggi (Abaza, 1999, 91). Berkat petro-dollar, Raja Fahd Ibn Abd Aziz (1921–2005) menggelontorkan dana US\$75 miliar dan memanfaatkan 70 Kedutaan Saudi Arabia yang berada di berbagai belahan dunia untuk menjadi agen “penyalur dana” pembangunan masjid yang dijadikan sebagai pusat ekspansi paham Wahhabi di berbagai wilayah tersebut (Lacey, 2009, 95; House, 2012, 233–234). Setidaknya sejak tahun 1982 hingga 2002, tercatat bahwa lembaga *charity* Saudi Arabia telah mendanai pembangunan 1.500 masjid, 210 *islamic center*, dan 2.000 sekolah di berbagai negara non-muslim, serta secara masif memberikan beasiswa studi bagi mahasiswa Internasional sebagai bagian dari strategi pembentukan “agen Wahabi” di mancanegara (Gold, 2003, 126).

Persis, dan beberapa Pondok Pesantren NU dengan lembaga donor Saudi Arabia.

- 3) DDII menjadi lembaga penyalur beasiswa Saudi Arabia yang diperuntukkan bagi para pemuda Indonesia yang ingin melanjutkan studi Islam di berbagai universitas di Timur-Tengah. Sejak tahun 1975, DDII selalu menerima sekitar 25 beasiswa Timur Tengah yang siap didistribusikan ke berbagai organisasi-organisasi Islam di Indonesia.
- 4) DDII menjadi lembaga yang membantu pemerintah Saudi Arabia yang diwakili oleh Abdul Azis Abdullah Al-Ammar untuk mendirikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta yang juga menjadi cabang dari Universitas Islam Imam Saud, Saudi Arabia. Lantaran sosok Abdul Aziz Abdullah Al-Ammar yang merupakan murid Syekh Muhammad Quthb (Ulama yang juga merupakan saudara Sayyid Quthb) dan juga Syekh bin Baz (Ulama Salafi-Wahabi), sejak awal LIPIA didesain untuk tidak hanya mengakomodasi paham Salafi-Wahabi, tetapi juga paham IM dan sebagainya (Hefner, 2000; Feillard dan Madinier, 2011; Latif, 2012, 594–595)⁵. Oleh karena itu, sejak tahun pertama LIPIA telah merekrut tenaga pengajar yang berasal dari Mesir, Yordania, Sudan, Somalia, dan Indonesia dengan berbagai macam latar belakang *mazhab*, *harakah*, dan misi dakwah yang berbeda-beda⁶. Lantaran adanya kepentingan ideologis dari setiap pengajar untuk secara intrinsik menyebarkan *mazhab* dan *harakah*-nya, selama dua dekade LIPIA telah mampu memproduksi kurang lebih 5.000 sarjana Islam yang banyak di antara para sarjana tersebut kini telah menjadi tokoh-tokoh gerakan Islam di negeri ini—khususnya menjadi tokoh gerakan

⁵ Latif (2012, 594–595) mengungkapkan bahwa karena dukungan Natsir dan kedekatan Abdul Aziz Abdullah Al-Ammar dengan Syekh Muhammad Quthb, era-era awal perpustakaan LIPIA lebih didominasi oleh buku-buku IM.

⁶ Abdurrahman Al-Baghdadi selaku tokoh utama yang menyebarkan paham Hizbut Tahrir di Indonesia juga pernah menjadi staff pengajar di lembaga tersebut (Hasan, 2008, 61).

Salafi-Wahabi dan Tarbiyah (Hasan, 2008, 51–61; Pringle, 2010, 98–99).⁷

Berdasarkan gambaran tersebut, harus diakui bahwa pada era Orde Baru DDII memiliki peranan yang sangat krusial bukan hanya bagi keberlangsungan dakwah dan organisasi Islam, melainkan juga dalam menentukan “citra Islam” Indonesia di mata dunia internasional. Dan hal yang lebih krusial lagi adalah melalui peranan DDII, di kemudian hari berbagai transmisi gerakan Islam Timur Tengah masuk dan berkembang di Indonesia.

2. Ikhwānūl Muslimīn dan Geopolitik Timur Tengah

Tidak dimungkiri bahwa di era 1970-an, berbagai negara Timur Tengah sedang mengalami terjadinya gelombang kebangkitan Islam. Setidaknya, perihal tersebut dilandasi oleh beberapa faktor, di antaranya hal-hal sebagai berikut.

- 1) Berkembangnya gelombang islamisasi Mesir yang terjadi sejak awal tahun ‘70-an yang diinisiasi oleh berbagai lembaga di Universitas Al-Azhar Kairo serta masifnya program pemerintah Mesir dalam mengutus para dai untuk melaksanakan berbagai kegiatan dakwah ke berbagai daerah. Adanya dukungan pemerintah Mesir

⁷ Harus diakui bahwa koeksistensi berbagai penyemaian paham Islam di LIPIA terjadi lantaran adanya ketegasan dari pimpinan LIPIA untuk melarang berbagai ceramah-ceramah yang mengekspos perbedaan-perbedaan kepercayaan keagamaan. Salim Segaf Al-Jufri selaku pengajar LIPIA sekaligus politisi senior PKS yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI Periode 2009–2014 menggambarkan bahwa meskipun mayoritas tenaga pengajar LIPIA berasal dari kalangan Salafi-Wahabi, tetapi sejak awal para Mahasiswa LIPIA tidak diharuskan untuk percaya kepada ajaran-ajaran Salafi-Wahabi. Meskipun Saudi Arabia menempatkan posisi ilmiah LIPIA pada suatu hal yang bersifat “netral”, sejatinya secara intrinsik LIPIA melakukan kampanye paham Salafi-Wahabi dengan cara memberangkatkan sekitar 30 alumnus berprestasi LIPIA untuk melanjutkan studinya di Universitas Imam Muhammad ibn Sa’ud (Riyadh) dan Universitas Islam Madinah (Madinah) yang merupakan *basecamp* ulama-ulama Salafi di Saudi Arabia (Hasan, 2008, 61). Adanya program beasiswa bagi alumnus berprestasi untuk melanjutkan studi ke Universitas Imam Muhammad ibn Sa’ud (Riyadh) dan Universitas Islam Madinah juga menjadi salah satu daya tarik bagi pelajar muslim di Indonesia untuk belajar di LIPIA.

dalam menyukseksi agenda islamisasi Mesir merupakan bagian dari upaya pemerintah Anwar Sadat dalam merangkul kalangan Islamis Mesir ketika ia sedang menghadapi berbagai perlawanan dari kalangan kiri. Di era tersebut, Anwar Sadat bahkan membebaskan para tahanan politik aktivis Ikhwānūl Muslimīn (IM) serta memberikan situasi yang lebih longgar bagi para *ikhwān* untuk melangsungkan kegiatan dakwahnya (Rahmat, 2008, 88).

- 2) Perubahan orientasi politik Mesir yang makin longgar telah memberikan keleluasaan bagi para mahasiswa mancanegara yang berada di Mersir—khususnya mahasiswa Indonesia—untuk mengakses dan mengikuti berbagai forum-forum diskusi gerakan Islam.
- 3) Revolusi Iran yang telah memberikan inspirasi bagi aktivis muslim untuk melakukan tindakan revolusioner terhadap negeri-negeri Muslim yang menerapkan sistem pemerintahan represif (Takeyh, 2009; Ramadan, 2012).

Secara tersirat, perubahan geopolitik di Timur Tengah juga telah memengaruhi orientasi para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri-negeri tersebut. Abaza (1999, 97) mengungkapkan bahwa pada tahun 1970-an dan 1980-an kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir tengah mengalami pergeseran orientasi dari aliran liberal menuju aliran yang lebih fundamentalis, sementara sebelum era tersebut, para Mahasiswa Indonesia di Mesir lebih banyak menyerap gagasan-gagasan Barat seperti Albert Camus, Jean Paul Sartre, dan para pembaharu Islam. Namun, di era '70-an, para mahasiswa tersebut mulai mengalami reorientasi, yaitu mereka lebih banyak menyerap ide-ide reformis-revolusionaris yang berasal dari pemikiran tokoh-tokoh IM dan Jamiat Al Islami seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, dan Abul A'la Al-Maududi, hingga pemikiran tokoh-tokoh Revolusi Iran dan Syiah seperti Ayatullah Khomeini, Ali Syariati, dan Murtadha Muthathhari.

3. Ikhwānūl Muslimīn di Saudi Arabia

Jauh sebelum gelombang kebangkitan Islam di era '70-an berlangsung, pada era '50-an Saudi Arabia sudah jauh lebih dahulu mengonsolidasikan agenda islamisme di negaranya. Di era tersebut, Saudi Arabia turut terlibat dalam melakukan perlawanan terhadap paham nasionalisme-sosialis yang sedang dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser selaku presiden Mesir saat itu sekaligus “meredam” paham tersebut dengan cara mengekspansikan paham Salafi-Wahabi ke seluruh dunia Islam (Abaza, 1999, 58 dan 87).⁸ Guna mendapatkan simpati dunia Islam, Saudi Arabia memberikan tempat perlindungan bagi para anggota IM yang lolos dari penangkapan menyusul eksekusi mati terhadap Sayyid Quthb tahun 1966.⁹ Bahkan, pada masa-masa ini, para aktivis Ikhwān yang tinggal di Madinah seperti Said Hawwa, Sayyid Sabiq, dan lainnya yang sebagian besar berasal dari kalangan terdidik diperbantukan oleh Saudi Arabia untuk mendesain sistem pendidikan dan kurikulum sekolah dan universitas sekaligus mengajar di beberapa universitas negeri di daerah tersebut. Di era ini, suasana Saudi Arabia masih tergolong kondusif, kader Ikhwān masih dapat melakukan berbagai kegiatan dakwahnya dengan leluasa (Hasan, 2008; Fealy dan Bubalo, 2007, 47-48).

⁸ Dalam rangka merespons tindakan Saudi Arabia, Gamal Abdul Naser merangkul Presiden Soekarno untuk membentuk sebuah koalisi guna melakukan perlawanan terhadap paham Salafi-Wahabi. Pada tahun 1962, 111 orang ulama politikus dan intelektual Salafi dari 31 negara Muslim berkumpul untuk melawan aliansi Soekarno-Nasser sekaligus berupaya untuk memperkuat pandangan wahabi mengenai Islam. Lambat laun, koalisi Soekarno-Nasser pun mengalami kemunduran yang terus menerus, hal tersebut disebabkan terjadinya Kudeta Anti-Komunis pada tahun 1965 di Indonesia serta meninggalnya Nasser lima tahun kemudian (Abaza, 1999, 58 dan 87).

⁹ Di sisi lain, alasan mengapa pada era tersebut Saudi Arabia berkehendak untuk memberi tempat perlindungan bagi Ikhwānūl Muslimīn adalah karena ketika itu, di bawah kepemimpinan Hasan Al-Hudaybi dan Umar Al-Talmasani, organisasi tersebut tengah mengalami revitalisasi ideologi dengan cara menghapus doktrin-doktrin takfir (yang mendukung pemakzulan penguasa yang dianggap murtad) ala Sayyid Quthb serta memilih strategi islamisasi dari *grass-root* dibandingkan melalui pemakzulan pemerintah (Hasan, 2008, 42).

Abdul Hasib Hasan yang di era 70-an menjadi mahasiswa Universitas Islam Madinah asal Indonesia mengungkapkan bahwa buku-buku pemikiran IM begitu banyak menonjol di toko-toko buku besar di Saudi Arabia. Selain itu, di era tersebut juga banyak sekali kegiatan forum-forum ilmiah di Saudi Arabia—khususnya yang diselenggarakan oleh WAMY di Riyadh—turut menghadirkan tokoh-tokoh dan aktivis Ikhwān seperti Said Hawwa, Yusuf Al-Qordhowi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat wajar jika di era tersebut para dosen maupun mahasiswa mancanegara yang berada di Saudi Arabia sangat mudah membaca dan bersentuhan langsung dengan pemikiran IM (Rahmat, 2003, 109–111). Dari Saudi Arabia-lah, gagasan-gagasan IM yang ketika di Mesir sempat dibendung kini secara perlahan mulai bisa disebarkan ke seluruh dunia (Rahmat, 2003, 113; Muhtadi, 2012, 98). Atas dasar kondisi inilah, tidak heran jika di kemudian hari, tepatnya pada 11 September 1983, empat alumni Saudi Arabia, yaitu Salim Segaf Al-Jufri, Abdullah Said Baharmus, Hilmi Aminuddin, dan Encep Abdussyakur mendirikan Jamaah Ikhwānul Muslimīn (JIM) Indonesia yang di kemudian hari dikenal sebagai gerakan Tarbiyah. Secara historis, kiprah alumni Saudi Arabia di JIM ataupun gerakan Tarbiyah tidak hanya sebatas sebagai *muassis* (pendiri/peletak dasar) dakwah gerakan tersebut, tetapi juga berperan penting dalam membangun konektivitas dakwah JIM Indonesia ke kelembagaan Ikhwānul Muslimīn di tingkat global, dan agen pencari donor ke berbagai lembaga sosial Timur Tengah¹⁰. Ketika gerakan Tarbiyah bertransformasi menjadi partai politik, sebagian besar dari mereka menempati berbagai posisi strategis di struktur partai.

4. Ikhwānul Muslimīn dan DDII

Harus diakui bahwa jauh sebelum DDII terbentuk, beberapa tokoh Masyumi yang juga sebagian di antaranya merupakan pendiri DDII sudah jauh lebih dahulu berinteraksi dengan Ikhwānul Muslimīn yaitu

¹⁰ Berkaitan dengan konektivitas gerakan Tarbiyah dengan kelembagaan Ikhwānul Muslimīn di tingkat global, hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya Salim Segaf Al-Jufri sebagai Wakil Ketua Maktab Asia Pasifik Ikhwānul Muslimīn yang meliputi sembilan negara, yaitu; Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Australia, Sri Lanka, China, dan Afghanistan (Supendi, 2011, 56).

- 1) Abdul Kahar Muzakkir (1907–1973), yang merupakan salah satu tokoh Masyumi pernah berinteraksi dengan gerakan Ikhwānul Muslimīn dan partai Wafd semasa ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Cairo (1925–1937);
- 2) M. Rasjidi (1915–2001), yang merupakan sahabat dekat Abdul Kahar Muzakkir, tokoh Masyumi, tokoh DDII, sekaligus mantan Menteri Agama RI ke-1, pernah berkenalan dengan pemikiran Ikhwānul Muslimīn ketika ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Cairo tahun 1931–1938 (Abaza, 1999, 70-73; Ricklefs, 2013, 93–94)¹¹. Dua tahun setelah DDII berdiri, A.R. Baswedan selaku tokoh Masyumi yang juga merupakan kader DDII bersama A. Hanafi menerjemahkan buku karya Sayyid Quthb, *This Religion of Islam* ke dalam versi bahasa Indonesia menjadi *Inilah Islam* (Latif, 2012, 593). Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka seorang ulama Muhammadiyah yang juga dekat dengan pemikiran Masyumi dan DDII banyak mengambil referensi *Fii Dzilalil Quran* karya Sayyid Quthb (Machmudi, 2008, 94).

Harus diakui bahwa M. Natsir (1908–1993) sendiri selaku pendiri DDII merupakan salah seorang yang memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin Ikhwānul Muslimīn (Machmudi, 2008). Pelarangan Masyumi di Indonesia telah membuat Natsir bersimpati dengan Ikhwānul Muslimīn yang juga mengalami nasib yang sama di Mesir. Di sisi lain, bagi DDII, metode gerakan Ikhwānul Muslimīn seperti gerakan sosial dan pendidikan yang didasarkan pada jaringan *usroh* yang kuat—yang dikemudian hari diterapkan oleh gerakan Tarbiyah—merupakan metode yang berguna bagi gerakan dakwah di Indonesia. Pada tahun 1981–1987, majalah dan rumah penerbitan DDII, yaitu *Media Dakwah*, menerbitkan sebuah terjemahan karya ideolog Ikhwān, antara lain *Beberapa Studi tentang Islam* (Sayyid Quthb), *Islam di Antara Kebodohan Umat dan Kejahilan Ulama* (Abdul Qodir Audah), *Peranan Mahasiswa Membangun Masa Depan* (Abul A'la Al-Maududi), *Tipu Daya Orientalis* (Musthafa as-Siba'i), *Sari Sejarah dan Perjuangan Rasulullah* (Musthafa As-Siba'i), *Derita*

¹¹ Ketika itu, salah satu tujuan kedekatan M. Rasjidi dengan gerakan IM adalah dalam rangka menghimpun dukungan berbagai organisasi Islam di Mesir untuk ikut serta mendukung kemerdekaan Indonesia (Rahmat, 2003, 106–107).

Dunia Bila Islam Mundur (Abu Hasan Ali an-Nadwi), *Rakyat dan Negara dalam Islam* (Abdul Karim Zaidan), *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna* (Yusuf Al-Qordhowi), *Konsep Pembaruan Masyarakat Islam* (Hasan Al-Banna), *Jalan Menuju Pembebasan* (Musthafa Masyhur), *Kebangkitan Kebudayaan Islam* (Musthafa As-Siba'i), *Pasang Surut Gerakan Islam Suatu Studi ke Arah Perbandingan* (Yusuf Al-Qordhowi), *10 Aksiomatik Islam* (Sayyid Hawa), *Jalan Dakwah* (Musthafa Masyhur), *Al-Hijrah wal Harakah* (Imaduddin Khalil), *Tafsir Atas Realitas* (Muhammad Quthb), *Fi Afaq at-Ta'lim* (Said Hawwa) serta trilogi *Allah, Ar-Rasul, Al-Islam* (Said Hawwa). Buku-buku inilah yang dinilai membentuk katakter gerakan dakwah kampus (Damanik, 2002, 95, dan 174; Rahmat, 2008, 108–109; Feillard dan Madinier, 2011; Latif, 2012, 594; Noor, 2012).¹²

Natsir sendiri memberikan rekomendasi bagi kader DDII untuk membaca buku-buku karya Abul A'la Al-Maududi, Sayyid Quthb dan Abdul Qodir Audah yang merupakan ideolog Ikhwānūl Muslimīn (Abdulrahim, 2002). Atas dasar kondisi inilah, secara tidak langsung DDII telah membawa angin segar bagi paham Ikhwānūl Muslimīn untuk makin menancapkan pengaruhnya di Indonesia.

5. Perseteruan Pemikiran semasa Orde Baru: Liberalisme Islam Vs Islamisme

Tidak dimungkiri bahwa di era 1970-an gagasan Liberalisme Islam dan islamisme tengah mengkristal di kalangan aktivis dan cendekiawan muslim Indonesia. Gagasan islamisme yang muncul sarat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, sedangkan gagasan liberalisme Islam justru lahir dari kalangan cendekiawan muslim, yaitu sebagian dari mereka secara pragmatis memanfaatkan isu liberalisme Islam guna mendapatkan *benefit* ekonomi-politik tertentu dengan cara mengakomodasi kepentingan rezim sekularis-developmental Orde Baru (Kersten, 2015). Setidaknya, paham

¹² Salah seorang yang memprakarsai terbitnya buku-buku IM di Media Dakwah adalah Abu Ridho. Abu Ridho—yang memiliki nama asli Abdi Sumaithi—adalah tokoh muda DDII yang memang sangat rajin dalam menerjemahkan buku-buku pemikiran IM ke dalam bahasa Indonesia. Ia juga merupakan salah seorang *muassis* dakwah gerakan Tarbiyah di Indonesia.

liberalisme Islam di Indonesia berkembang di institusi pendidikan tinggi Islam dan organisasi mahasiswa Islam.

Pada level pendidikan tinggi Islam, ide-ide liberalisme Islam diperkenalkan oleh Abdul Mukti Ali (1923–2004) dan Harun Nasution (1919–1998). Keduanya merupakan seorang dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang di kemudian hari menduduki posisi-posisi strategis negeri ini: Mukti Ali diangkat oleh Soeharto untuk menjadi Menteri Agama RI (1971–1978) dan Harun Nasution diangkat menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1973–1984). Di Yogyakarta, Mukti Ali memproklamasikan gagasan liberalisme Islam melalui lingkaran diskusi Limited Group (1967–1971) yang dibentuk olehnya bersama rekan-rekan mahasiswa seperti Muhammad Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, dan Ahmad Wahib. Di kemudian hari, para anggota diskusi inilah yang secara terbuka memperkenalkan gagasan liberalisme Islam kepada khalayak umum (Wahib, 1981; Barton, 1999, 53–58; Kersten, 2009, 976; Effendy, 2011, 158).

Tidak jauh berbeda dengan Mukti Ali, di Jakarta, Harun Nasution juga memproklamasikan gagasan relativisme Islam melalui forum diskusi kelompok akademis terbatas yang terdapat di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah—khususnya ketika ia menjabat menjadi Rektor di perguruan tinggi tersebut (Effendy, 2011, 173). Ketika keduanya sedang menjabat posisi birokrasi strategis, Mukti Ali dan Harun Nasution berkolaborasi dalam melakukan revisi terhadap sistem kurikulum pendidikan Islam yang lebih menekankan pada nilai-nilai relativisme Islam (Kersten, 2009, 976–977).

Pada level Organisasi Mahasiswa Islam, ide-ide liberalisme Islam pertama kali diperkenalkan oleh para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta yang juga merupakan anggota lingkaran studi Limited Group seperti Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan—dalam beberapa hal—Dawam Rahardjo. Di tahun 1969, ide liberalisme Islam yang mereka kemukakan melalui institusi HMI mendapatkan simpati sekaligus pertentangan. Namun tidak lama kemudian, gagasan liberalisme Islam itu makin mendapatkan respons yang lebih hebat ketika Nurcholis Madjid (Ketua Umum PB HMI

1967–1971) yang selama ini dikenal sebagai “Natsir Muda” lantaran kedekatannya dengan tokoh Masyumi sekaligus pembelaannya terhadap berbagai aspirasi politik Islam justru berbalik arah mendukung ide-ide liberalisme Islam. Dukungan terhadap ide-ide liberalisme Islam tersebut makin diketahui oleh khalayak publik ketika di tahun 1970 ia memaparkan makalahnya yang berjudul “Keharusan Pembauran Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” di hadapan para anggota HMI, Pelajar Islam Indonesia (PII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), dan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia yang menuai kontroversi dan menimbulkan banyak kritik (Effendy, 2011, 161–162; Latif, 2012, 571–572)¹³.

Di saat yang bersamaan, Orde Baru memanfaatkan kampanye diskursus liberalisme Islam untuk makin menancapkan kebijakan kebijakan sekuler yang mencoba mempersempit ruang gerak Islam politik dalam memengaruhi negara dan ruang publik dengan cara-cara berikut.

- 1) Orde Baru menetapkan UU No. 3 tahun 1985, yang isinya pemerintah mewajibkan adanya penyeragaman “Asas Tunggal Pancasila” sebagai ideologi organisasi masyarakat dan partai politik. Implikasi dari kebijakan ini adalah seluruh organisasi dan partai politik Islam tidak lagi diperbolehkan menggunakan Islam sebagai ideologi dan asas perjuangan¹⁴.

¹³ Dalam makalahnya, Nurcholis Madjid menyampaikan tentang keadaan umat Islam yang *jumud* (mandek) akibat terus mengulang-ulang keinginan memperjuangkan berdirinya kembali negara Islam melalui partai-partai Islam. Padahal pada kenyataannya, partai-partai Islam tidak dapat membangun citra positif dan simpatik, bahkan yang ada citra sebaliknya. Oleh sebab itu, ia mengusulkan satu jargon kontroversial “Islam yes, Partai Islam no!?”. Dalam hal ini, umat memerlukan sekularisasi pemikiran, berpikir bebas, dan terbuka. Untuk itu pula diperlukan kelompok pembaruan yang “liberal”. Awal dari pidato inilah yang menimbulkan perdebatan intelektual tentang agenda “liberalisasi” selama bertahun-tahun (Effendy, 2011; Latif, 2012; Bachtiar, 2011, 68).

¹⁴ Latif (2012, 444–445) mengungkapkan bahwa konsep asas tunggal ini melahirkan oposisi dari beragam elemen dan tokoh Islam. Beberapa menganggapnya sebagai usaha pemerintah untuk memaksakan program sekularisasi terhadap pandangan hidup Islam. Beberapa yang lain memandang kebijakan pemerintah ini sebagai warisan dari kebijakan kolonial Belanda yang membolehkan kaum Muslim untuk menjalankan peribadatan keagamaannya, tetapi membatasi

- 2) Orde Baru menerbitkan RUU No. 1 tahun 1973, yaitu pemerintah melakukan de-fungsionalisasi peradilan agama dalam menentukan status keabsahan suatu perkawinan. Implikasi dari kebijakan ini adalah secara legal formal status perkawinan yang menjadi acuan negara sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam.
- 3) Orde Baru melakukan perubahan GBHN guna memberikan keabsahan aliran kepercayaan sebagai sebuah agama tersendiri. Sudah barang tentu, kebijakan yang lahir di tahun 1978 ini menjadi polemik di kalangan umat Islam.
- 4) Orde Baru mengeluarkan PP No. 052/C/Kep/D tahun 1982, yang isinya pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan jilbab di sekolah.
- 5) Orde Baru memprioritaskan golongan liberal untuk menjadi Menteri Agama seperti Mukti Ali (1973–1978) dan Munawir Sjadjali (1983–1993) dalam rangka memberikan legitimasi simbol agama terhadap sistem pembangunan Orde Baru yang sering kali bertentangan dengan ajaran Islam (Bachtiar, 2011).
- 6) Orde Baru menempatkan kalangan Kristen dan *abangan* sebagai tokoh kunci Militer dan Keamanan seperti M. Panggabean (Protestan) sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1967–1969), Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) (1969–1971), Panglima ABRI (1973–1978) dan Menteri Pertahanan RI (1978–1983); Sudomo (Protestan)¹⁵

semua bentuk Islam politik. Meskipun terdapat ketidakpuasan dan penentangan yang kuat dari kelompok-kelompok dan para pemimpin Islam, kebijakan ini pada akhirnya diterima tanpa beban oleh organisasi-organisasi Islam yang besar seperti NU dan PPP. Sementara itu, organisasi-organisasi Islam seperti PII dan kelompok pecahan dari HMI, yaitu HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Pertimbangan Organisasi, berdiri tahun 1986), yang tetap tak bersedia menerima asas tunggal, dilarang keberadaannya atau terpaksa menjadi gerakan-gerakan bawah tanah.

¹⁵ Laksamana Sudomo di mata komunitas Islam memiliki reputasi yang buruk karena membiarkan Kopkamtib mengontrol isi khotbah agama dan terlalu jauh mengintervensi aktivitas organisasi-organisasi Islam. Dia bertanggung

sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (1969–1973), Pangkopkamtib (1978–1983), dan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) (1988–1993); L.B. Moerdani (Katolik) memegang posisi sebagai Panglima ABRI, Panglima Pangkopkamtib (1983–1988), dan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS); serta Ali Murtopo (*abangan*) memegang kendali atas dinas-dinas intelijen seperti OPSUS dan BAKIN setelah tahun 1968 (Latif, 2012, 446–447). Liddle (1995, 18–19 dalam Latif, 2012, 447) mengungkapkan bahwa salah satu alasan pemberian pos-pos penting militer dan keamanan kepada kalangan Kristen dan *abangan* adalah dalam rangka untuk memperlambat promosi para perwira santri jika dibandingkan para perwira *abangan* atau Kristen.

Tentunya, berkembangnya paham liberalisme Islam telah menimbulkan banyak respons dari sebagian kalangan aktivis HMI, khususnya mereka yang berasal dari Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI-HMI) yang berpusat di Bandung. Didirikan pada tahun 1966, ketua pertama LDMI-HMI adalah ‘Imaduddin ‘Abdulrahim dengan dibantu oleh Endang Saifuddin Anshari yang keduanya berasal dari HMI Cabang Bandung, dan Miftah Faridl berasal dari HMI Cabang Solo. Secara garis besar, kelompok ini tidak berkeberatan dengan rasionalisme modern, sains dan teknologi lantaran hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam, dan bahkan saling melengkapi satu sama lain. Hanya saja, kelompok ini berkeberatan dengan istilah “modernisasi” yang ketika itu sering dilekatkan dengan proses westernisasi dan sekularisasi. Selain itu, bagi aktivis LDMI-HMI, istilah “modernisasi” juga telah digunakan oleh rezim Orde Baru untuk memarginalkan pengaruh Islam politik (Latif, 2012, 559).

jawab atas penangkapan dan pemenjaraan para aktivis Islam yang dituduhnya melakukan subversi. Antara tahun 1977–1980 saja, sekitar 6.000 aktivis Islam ditangkap dan banyak dari mereka yang dipenjarakan dengan atau tanpa proses pengadilan (Latif, 2012, 447).

Harus diakui bahwa secara keseluruhan pandangan-pandangan LDMI-HMI sangat dipengaruhi oleh pandangan para pemimpin DDII dan Masyumi lantaran dua faktor berikut.

- 1) Imaduddin dan Endang merupakan anak dari tokoh Masyumi. Imaduddin merupakan anak dari Abdulrahim (Ulama sekaligus tokoh Masyumi Sumatra) dan Endang merupakan anak dari Isa Anshari (tokoh Masyumi dan Persis terkemuka dan militan).
- 2) Imaduddin dan Endang juga merupakan kelompok intelektual muda yang dikaderisasi oleh DDII (khususnya dibina oleh M. Natsir, Prawoto Mangkusasmita, M. Rasjidi, dan Osman Raliby) sejak akhir tahun 1960-an untuk menjadi dai serta pembuat standar kurikulum pelajaran agama Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI) bagi komunitas Muslim di universitas-universitas sekuler (Latif, 2012, 560–561).

Pada era Alamsjah Prawiranegara menjadi Menteri Agama (1978–1983), kurikulum IDI mendapatkan dukungan resmi pemerintah. Meskipun di era Munawir Syadzali (1983–1993) dukungan tersebut dihentikan, pada dasarnya kurikulum IDI merupakan rancangan proyek ambisius LDMI/DDII dalam mengembangkan Islamisasi ilmu pengetahuan di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berasal dari universitas-universitas sekuler. Pada tahun 1974, ambisi pengembangan Islamisasi ilmu pengetahuan dan pengkaderan aktivis dakwah di kalangan mahasiswa makin tersistematisasi dan intensif ketika ‘Imaduddin ‘Abdulrahim membuat Latihan Mujahid Dakwah (LMD) sekaligus mengembangkan pola *usroh* bagi para aktivis mahasiswa muslim yang berasal dari berbagai universitas¹⁶.

¹⁶ Di dalam Ikhwānūl Muslimīn, gerakan *usroh* adalah suatu kewajiban bagi setiap anggotanya. Gerakan *usroh* di dalam tubuh Ikhwānūl Muslimīn diprakarsai di dalam Munas Al-Ikhwān Al-Muslimūn pada tahun 1943. Salah satu agenda penting dari gerakan *usroh* adalah dalam rangka menjadikannya sebagai instrumen utama untuk memobilisasi loyalitas kader terhadap kegiatan dakwah itu sendiri. Selain itu, ide yang mendasari sistem *usroh* dapat disederhanakan dalam tiga kata yang disampaikan oleh Hasan Al-Banna sebagai pilar-pilar *usroh*, yaitu saling pengertian (*ta’aruf*), saling memahami (*tafāhūm*), tanggung jawab sosial (*takāful*). *Ta’aruf* mengandung makna ‘saling memperkuat persaudaraan

Di kemudian hari, oleh para aktivis dakwah kampus, sistem LMD dan pola *usroh* tersebut direplikasi di berbagai universitas sekuler bersamaan dengan didirikannya masjid-masjid kampus oleh DDII di Universitas Indonesia (UI), Jakarta; Universitas Andalas (UNAND), Padang; Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta; Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta; Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (Hasan, 2008, 52; Latif, 2012, 567)¹⁷. Dengan adanya masjid kampus, meskipun Orde Baru melakukan depolitisasi dan pembatasan terhadap aktivitas mahasiswa dengan cara mengeluarkan SK 028/U/1974 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) serta SK Kopkamtib No. 02/Kopkam/1978 tentang Pembekuan Dewan Mahasiswa Intra Kampus, Orde Baru tidak terlalu “berani” untuk melakukan intervensi terhadap berbagai kegiatan masjid yang dianggapnya bersifat privat dan *sacralized* sehingga jaringan mahasiswa muslim dapat lebih leluasa dalam mentransmisi ajaran-ajaran Islam sekaligus mereproduksi kader dakwah (Siddiq, 2003, 63; Aspinall, 2005; Rosyad, 2006).

6. Gelora Gerakan Dakwah dari Masjid Kampus

di antara anggota. *Tafaahum* adalah ‘mempunyai maksud pemahaman yang benar terhadap Islam dan keinginan untuk diatur dengan ajaran-ajarannya dan secara pribadi bertanggung jawab kepada rekan-rekannya. *Takaful* ialah ‘tanggung jawab sosial’. Konsep *usroh* dibuat seperti sistem sel yang setiap kelompok *usroh* beranggotakan sekitar 5–10 orang (Mitchell, 2005, 46 dan 265-269).

¹⁷ Di era tersebut, pengajian Islam dan *usroh* dikembangkan di berbagai daerah dan masjid kampus, seperti di 1) Yogyakarta yang diselenggarakan di Masjid Mardliyyah, Masjid Jenderal Sudirman, dan Masjid Syuhada, diinisiasi oleh para cendekiawan muslim UGM seperti Saefullah Mahyuddin, Amien Rais, Kuntowijoyo, dan Syahirul Alim; 2) Jakarta, diinisiasi oleh Daud Ali dan Nurhay Abdurrahman; 3) Masjid Al-Ghifari IPB, diinisiasi oleh Sholeh Iskandar dan A.M. Saefuddin; 4) Semarang dan Masjid kampus Unair, diinisiasi oleh Kafiz Anwar, Fuad Amsyari dkk.; 5) Masjid Kampus Unhas, diinisiasi oleh Halide. Di masa-masa selanjutnya, beberapa mahasiswa muslim yang terlibat secara aktif dalam membumikan kegiatan tersebut adalah Yahya Muhaimin, Douhak Latief, M. Nursal, dan Husein Umar. Berkembangnya gerakan *usroh* di berbagai wilayah ini juga menandai terbentuknya jaringan dakwah kampus di Indonesia (Damanik, 2002; Siddiq, 2003; Rahmat, 2008, 28).

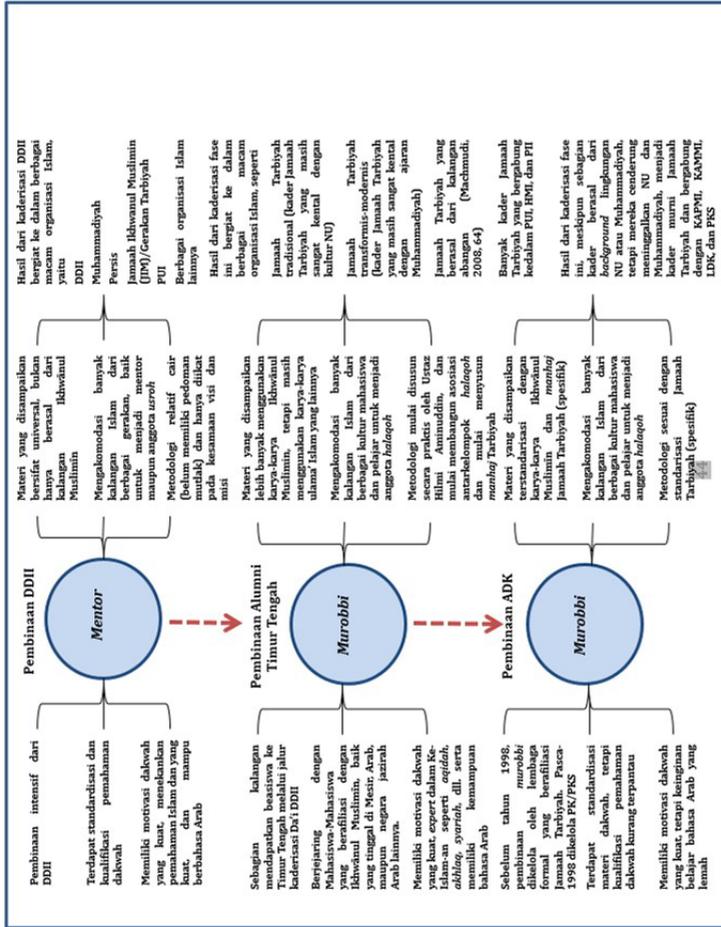
Memasuki era '80-an, gerakan *usroh* kian membumi dan tidak terbandung lagi pengaruhnya di berbagai universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Atas dasar kondisi inilah, kehadiran gerakan *usroh* yang awalnya dilembagakan secara informal kini mulai berorientasi untuk memperkuat dan melegalkan gerakan tersebut dengan cara membentuk lembaga formal. Dari semangat inilah, pada era tersebut para anggota gerakan *usroh* menginisiasi terbentuknya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di berbagai universitas, yaitu Jamaah Shalahuddin UGM Yogyakarta, Lembaga Amal Islam (LAI) Undip Semarang, Lembaga Pengkajian Islam Civitas Universitas Trisakti (Lpisat) Jakarta, Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) ITB Bandung, Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam (UKKI) Unair Surabaya, Jamaah Mujahidin IKIP Yogyakarta, Badan Dakwah Masjid (BDM) Al-Hikmah IKIP Malang, Jamaah Masjid ARH-UI, dan sebagainya (Siddiq, 2003, 72)¹⁸. Di era ini juga buku-buku pemikiran IM yang diterjemahkan oleh para cendekiawan Timur Tengah menjadi bahan bacaan yang digandrungi oleh para kader LDK. Aktivisme dakwah *usroh* dan penyebaran buku-buku pemikiran IM juga disebar di berbagai universitas di Indonesia oleh ADK yang berasal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ketika mereka ditugaskan menjadi pegawai keuangan negara di Jawa, Sumatra, Kalimantan, maupun Sulawesi (Soekanto, 2012, 70).

Adapun faktor utama buku-buku pemikiran IM digandrungi oleh para kader LDK saat itu adalah ketika program Bina Masjid Kampus (BMK) DDII tengah mengalami defisit *dai* dalam membina LDK, para aktivis LDK mencoba mengisi kekosongan pembinaan tersebut dengan cara meminta para cendekiawan Timur Tengah—yang sebagian besar di antara mereka juga mendapatkan beasiswa dari jalur DDII dan telah terpengaruh paham IM, baik di Saudi Arabia maupun Mesir—yang telah kembali pulang ke tanah air untuk membina dan mengisi forum-forum pengajian LDK. Para cendekiawan Timur Tengah tersebut di

¹⁸ Sebagai sebuah manifestasi koordinasi dakwah lintas kampus, pada tahun 1987 para aktivis LDK yang berasal dari berbagai universitas tersebut membangun jejaring koordinasi nasional Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).

antaranya adalah Salim Segaf Al-Jufri (Saudi Arabia), Abdi Sumaithi atau Abu Ridho (Saudi Arabia), Hilmi Aminuddin (Saudi Arabia), Abdul Hasib Hasan (Saudi Arabia), Hidayat Nur Wahid (Saudi Arabia), Nasir Zein (Saudi Arabia), Surrahman Hidayat (Mesir), Didin Hafifuddin (Saudi Arabia), Mashadi (Saudi Arabia), Ahmad Satori Ismail (Mesir), Daud Rasyid Sitorus (Mesir), Yusuf Supendi (Saudi Arabia), dan Abdullah Said Baharmus (Saudi Arabia) (Damanik, 2002; Machmudi, 2008; Rahmat, 2008). Pada kesempatan inilah, para cendekiawan Timur Tengah tersebut mulai mendakwahkan ideologi IM dan *manhaj* (metode) gerakannya secara masif. Konsep *usroh* yang terdapat di LDK pun menjadi makin berkembang dengan metode-metode IM lainnya, semisal *mukhoyyam* (perkemahan), *liqo'* (nama lain selain *usroh* atau *halaqoh*)¹⁹, *mabit* (bermalam di masjid, melakukan aktivitas ibadah dari malam hingga subuh hari), *rihlah* (berwisata sambil ber-*tafakkur* alam), *daurah* (pelatihan) seminar-seminar keislaman, ataupun bedah buku pemikiran IM. Persentuhan yang sangat lekat antara LDK dengan para cendekiawan Timur Tengah telah membuat suatu kesepakatan di antara mereka untuk melakukan kaderisasi dakwah sekaligus secara *afah* mengadopsi sistem kurikulum pembelajaran IM sebagai pedoman pengkajian Islam dan *usroh* di lingkaran LDK. Pada fase inilah, kurikulum *usroh* yang ketika dikembangkan oleh 'Imaduddin 'Abdulrahim awalnya bersifat universal dan lintas *manhaj*, kini mulai berganti ke arah kurikulum *usroh ala* IM yang bersifat partikular (Rahmat, 2003). Konfigurasi paradigma dan genealogi *murobbi* ditunjukkan pada Gambar 2.1.

¹⁹ Pada periode ini, penamaan *usroh* dalam sistem kaderisasi gerakan Tarbiyah pun berganti menjadi *Liqo'* atau pun *Halaqoh*. Sebagaimana diungkapkan oleh MJASP, penamaan tersebut berganti lantaran ketika itu sebenarnya rezim Orde Baru sengaja mendiskreditkan nama *usroh* menjadi suatu hal yang negatif dengan cara menghubungkan konsep *usroh* sebagai basis kaderisasi DI/TII maupun Komando Jihad. Wawancara dengan MJASP tanggal 20 Oktober 2014 di Sekretariat Masjid Jogokaryan Yogyakarta (Damanik, 2002).



Sumber: Aidulisyah (2015, 57)

Gambar 2.1 Konfigurasi Paradigma dan Genealogi *Murobbi*

Sejatinya rezim Orde Baru begitu khawatir terhadap berkembangnya ideologi IM di kalangan aktivis dakwah kampus, mengingat gagasan ideologi tersebut sangat berpotensi menstimulus mahasiswa muslim untuk melumpuhkan kekuasaan Rezim di kemudian hari. Atas dasar kekhawatiran inilah, rezim Orde Baru memanfaatkan Badan Intelijen Negara (BIN) atau pun Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) untuk mengawasi, mempelajari, serta melakukan rekayasa “politik pecah belah” terhadap gagasan IM dan gerakan Tarbiyah di antaranya dengan beberapa cara berikut.

- 1) BAKIN merekrut beberapa mahasiswa yang diberangkatkan untuk mempelajari konsep IM di Mesir. Dalam hal ini, ada beberapa Mahasiswa UGM yang direkrut, di antaranya ‘Ain dan Hasan Basri, Mahasiswa Sastra Arab UGM yang diberangkatkan untuk mempelajari IM di Mesir.
- 2) Pada tahun 1980-an pemerintah sempat melarang peredaran buku-buku Hasan Al-Banna melalui keputusan Kejaksaan Agung.
- 3) Pada saat yang bersamaan, pemerintah melakukan misi intelijen penyebaran ideologi Hizbut-Tahrir yang sangat kontra terhadap paham IM dengan cara mempertemukan Abdullah bin Nuh—selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ghozali, Bogor—dengan Abdurrahman Al-Baghdadi, seorang aktivis Hizbut-Tahrir (HT) asal Yordania yang sedang mengembangkan dakwah Hizbut-Tahrir di Australia. Alasan pemerintah untuk secara *hidden* (terselubung) menyebarkan paham HT ke Indonesia adalah dalam rangka memecah belah kekuatan dakwah kampus yang ketika itu hampir 100% berpaham IM. Dipilihnya HT sebagai tandingan ideologi IM disebabkan secara generalis HT memiliki karakter yang sama dengan IM, yaitu metode dakwah IM dan HT sama-sama memberlakukan sistem *usroh*. Secara fisiologis, IM dan HT memiliki tata cara berpenampilan yang sama dan secara esensial HT juga memanfaatkan jejaring mahasiswa muslim dan lokus kampus sebagai basis utama kaderisasi mereka. Sejak awal, perbedaan di antara keduanya lebih bersifat prinsipil yaitu HT tidak sependapat dengan konsep pemerintahan muslim ala IM

yang masih pro-demokrasi (wawancara dengan MASP tanggal 20 Oktober 2014).

Politik pecah belah ala Orde Baru makin menancapkan pengaruhnya. Ismail Yusanto, Ketua Umum Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pertama, yang menjadi aktivis HT. M. Jazir ASP (MJASP) mengungkapkan,

“Dulu, setelah Ismail Yusanto lulus dari jurusan Teknik Geologi, dan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum FSLDK, Ismail Yusanto *silaturahmi* dengan saya, ‘Mas, saya ingin melanjutkan S-2, *tapi* saya juga ingin semasa S-2 itu juga *mondok* pesantren, Mas.’ ungkap Ismail Yusanto. Atas permintaan tersebut, saya memperkenalkan Ismail Yusanto dengan A.M. Saefuddin yang ketika itu baru saja selesai menjabat Universitas Ibnu Khaldun Bogor sekaligus tengah mendirikan Pesantren Mahasiswa Uill Albab yang diasuh oleh Didin Hafifuddin. Di pondok mahasiswa itulah, Ismail Yusanto menjadi santri. Tidak lama Ismail Yusanto menjadi santri di Bogor, ia berkenalan dengan kalangan Hizbut Tahrir dan menjadi anggota Hizbut Tahrir. Saat itu, Bogor memang menjadi pusat Hizbut Tahrir. Sejak ia menjadi anggota Hizbut Tahrir itulah, FSLDK pun berada dalam pusaran dinamika konflik lantaran perbedaan paham, antara gerakan Tarbiyah yang mayoritas, dengan Hizbut-Tahrir yang digawangi oleh Ismail Yusanto. Pada akhirnya, konflik ini berujung pada diadakannya Musyawarah Luar Biasa (MLB) FSLDK di Surabaya untuk mengudeta kepemimpinan Ismail Yusanto di FSLDK, dan digantikan oleh Chalid Machmud, salah seorang Mahasiswa UGM yang juga menjadi anggota awal gerakan Tarbiyah di kampus tersebut.”²⁰

²⁰ Untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, penulis juga melakukan wawancara terhadap Ismail Yusanto. Beliau mengungkapkan awal pertama kali perkenalan beliau dengan Hizbut Tahrir, “Sebenarnya teman-teman IPB yang membawa Hizbut Tahrir. Jadi ketika sarasehan LDK, kan IPB juga ikut. Ketika itu juga kan posisi saya sebagai orang yang menonjol di forum karena ketika itu saya sebagai Ketua Ramadhan di Kampus (RDK) yang menyelenggarakan sarasehan ini. Walhasil akhirnya teman-teman IPB yang saya tahu belakangan bahwa dia itu aktivis Hizbut Tahrir. Dan aktivis Hizbut Tahrir itu, justru yang banyak mengontak saya. Jadi tidak benar kalau saya ketemu Hizbut Tahrir itu ketika saya di Ibnu Khaldun, sebab sebenarnya saya di Yogyakarta sudah mengenal Hizbut Tahrir bersama materi-materinya. Justru yang membawa dan

Sejak saat itu pula-lah, gerakan yang berbasiskan dari masjid kampus kian berkembang bukan hanya dikuasai oleh gerakan yang berpaham IM, melainkan juga digerakkan oleh Hizbut Tahrir. Di kemudian hari, ketika LIPIA telah menghasilkan banyak alumni yang berpaham Salafi-Wahabi, para alumni tersebut juga secara giat menebarkan dakwah Salafi-Wahabi di lingkaran masjid kampus.

B. Empat Aktor Penting Penyebar Gerakan Tarbiyah di Indonesia

Setidaknya, terdapat empat aktor penting yang telah berkontribusi besar—baik secara langsung maupun tidak langsung—dalam penyebaran gerakan Tarbiyah di Indonesia, yaitu 1) Muhammad ‘Imaduddin ‘Abdulrahim, 2) Rahmat Abdullah, 3) Hilmi Aminuddin, dan 4) Abu Ridho. Di era awal kelahiran gerakan Tarbiyah, empat aktor tersebut sejatinya tidak saling berhubungan dan terkoneksi secara langsung satu sama lain. Hanya saja, melalui aktivitas dakwah yang selama ini mereka jalankan, hal tersebut telah berkontribusi dalam memperkuat dan mengkonsolidasikan kemunculan gerakan Tarbiyah itu sendiri.

mendorong saya ke Bogor itu kawan-kawan Hizbut Tahrir. Artinya, saya terlibat dalam Hizbut Tahrir sudah mulai sejak di UGM, namun benar-benar terlibat aktif dalam Hizbut Tahrir setelah saya lulus dari UGM. Ketika saya masuk Hizbut Tahrir, itu kan bersamaan dengan masuknya gerakan Tarbiyah dan juga Salafi, mulai terjadi polarisasi di tubuh Jama'ah Shalahuddin. Jadi, UGM itu mulai ada yang ikut Tarbiyah terutama di Cholid Mahmud ke bawah, sedangkan saya kan di atasnya Cholid lebih dulu dua tahun masuk UGM sebelum Cholid, di atas Cholid itu ada Ahmad Bahrudin, kemudian di atas Ahmad Bahrudin itu Agus Priyono, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Jama'ah Shalahuddin, sedangkan saya Sekretaris Umumnya. Nah, di masa Agus Priyono itulah kita mengenal Hizbut Tahrir. Jadi polarisasi terjadi ketika Hizbut Tahrir sudah ada di UGM, kemudian masuklah Tarbiyah kepada Cholid dan kawan-kawannya. Oleh karena itu, tidak ada Tarbiyah di atas Cholid. Enggak ada kan anggota DPR atau DPD di atas Cholid, nggak ada, mulai dari Agoes Purnomo, kemudian anggota DPR RI yang sekarang, Ahmad Sukamto. Ahmad Sukamto itu dia masuk ke pengurusan kita, tapi dia baru terpengaruh oleh Tarbiyah itu di kepengurusan Cholid.” (Hasil wawancara dengan Ismail Yusanto tanggal 9 November 2014 di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang).

1. Muhammad ‘Imaduddin ‘Abdulrahim

Sebagaimana yang banyak diungkapkan oleh berbagai macam literatur, nama ‘Imaduddin ‘Abdulrahim, yang lahir pada tahun 1931 di Kota Langkat, sudah tak asing lagi sebagai pelaku sejarah yang secara tidak langsung telah menjadi fasilitator dalam menumbuhkembangkan pemikiran Ikhwānul Muslimīn di kalangan mahasiswa Indonesia (Ashiddiqie, 2002).

Sejak diminta untuk menjadi pengajar agama Islam di ITB pada pertengahan dekade tahun 1968, pada dasarnya ‘Imaduddin sudah mulai menggunakan buku-buku karya Sayyid Quthb, Abul A’la Al-Maududi, maupun Abdul Qodir Audah. Perihal tersebut diakui olehnya, sebagaimana yang ditulis di dalam “Sekapur Sirih” karyanya yang berjudul *Islam Sistem Nilai Terpadu*. Ia mengungkapkan bahwa pada saat itu, M. Natsir memberikan buku-buku karya Sayyid Quthb, Abul A’la Al-Maududi, dan Abdul Qodir Audah, serta meminta kepada ‘Imaduddin untuk menciptakan kurikulum mata kuliah Agama yang diampu olehnya merujuk dari karya-karya tersebut. Di sisi lain, ‘Imaduddin juga mengakui bahwa ketika pada tahun 1971, kala ia diutus oleh Persatuan Sarjana Muslim Indonesia untuk menghadiri Konferensi International Islamic Federation of Students Organization (IIFSO) ke-2, ‘Imaduddin kembali memperbarui persahabatan dengan para Ikhwān yang dahulu sudah sama-sama aktif mendirikan Muslim Students Association of US and Canada (MSA) di AS antara tahun 1963–1966. Dari merekalah, ‘Imaduddin mendapatkan berbagai macam masukan, bahkan mendapatkan berbagai macam referensi buku-buku Islam yang sangat menolongnya dalam memberikan kuliah agama. Dalam perjalanan pulang dari konferensi tersebut, ‘Imaduddin menemui Mufti Besar Palestina Alm. Syeikh Amin Al-husaini di Istanbul untuk menyampaikan surat dan beberapa pesan lisan kepada M. Natsir. Selepas pertemuan dengan Sang Mufti, Sang Mufti pun meminta ‘Imaduddin untuk pergi menuju Karachi dan Lahore untuk menemui Abul A’la Al-Maududi sembari menyampaikan surat dari Sang Mufti dan pesan dari M. Natsir untuk Abul A’la Al-Maududi. Saat itu pula-lah, Abul A’la Al-Maududi menghadiahkan

‘Imaduddin satu *copy* jilid pertama buku tafsir Al-Qur’an yang ketika itu sedang diselesaikan olehnya (Abdulrahim, 2002, IX–XI). Pada tahun 1971, ‘Imaduddin menjadi dosen di Technical College, Malaysia. Pada tahun 1979-an ‘Imaduddin pernah ditugaskan menjadi dosen di Universitas King Abdul Azis, Jeddah, dan juga di IOWA University, Amerika Serikat (Ashiddiqie, 2002, 36, 44).

Di tahun 1974, ‘Imaduddin mengembangkan program Latihan Mujahid Dakwah (LMD) sebagai sebuah sarana rekrutmen dan kaderisasi awal para mahasiswa ITB. Kegiatan LMD sendiri sangat memainkan perannya dalam memanfaatkan masjid kampus sebagai pusat kaderisasi gerakan dakwah kampus—sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Gagasan ini tidak terlepas dari posisi ‘Imaduddin yang sejak tahun 1968 menjadi pengajar agama Islam di ITB. Pengalamannya menjadi ketua LDMI merupakan salah satu faktor yang ikut mendorongnya untuk merintis program LMD tersebut. LMD juga mulai memperkenalkan konsep-konsep dasar yang banyak terinspirasi dari metode Ikhwānūl Muslimīn. Hal ini tecermin dalam aktivitas pembinaan keislaman. ‘Imaduddin bersama aktivis masjid Salman menjalankan pola *usroh*, yaitu kelompok-kelompok kecil pembinaan yang terdiri dari sejumlah orang dengan seorang guru atau instruktur. Pola *usroh* sebagai medium pembinaan keislaman sesungguhnya bukan hal yang baru, karena beberapa gerakan dakwah Islam—baik di dalam maupun di luar Indonesia—juga menggunakan pola ini. Bahkan menurut Abdul Aziz, pada era ‘70-an dan ‘80-an, sejumlah gerakan keagamaan di Indonesia mempergunakan istilah ini dalam sistem kaderisasi atau pembinaan mereka (Siddiq, 2003, 69).

Sebagaimana diterangkan dalam penelitian Damanik (2002, 100), pada masa itu, pemikiran-pemikiran Ikhwānūl Muslimīn bukanlah satu-satunya sumber materi yang diterapkan di LMD dan kegiatan *usroh*, melainkan ia hanya salah satu dari pemikiran-pemikiran yang dibedah dalam forum-forum pelatihan tersebut. Forum ini mengakomodasi banyak tokoh-tokoh Islam dari berbagai kalangan dengan metodologi yang relatif cair dan hanya diikat pada kesamaan visi dan misi. Artinya, pemikiran, ideologi, dan *manhaj* gerakan Ikhwānūl

Muslimin belum tertuang secara utuh dalam gerakan dakwah kampus. Gerakan *usroh* ini sendiri mendapatkan penerimaan yang sangat luas di kalangan mahasiswa lainnya²¹. Kader-kader yang dibina melalui LMD ini bukan hanya dari kalangan mahasiswa ITB, melainkan juga berasal dari perguruan tinggi lainnya seperti UI, IPB, dan UGM, yang pada akhirnya mengembangkan model gerakan ini di kampusnya masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh Setyo Hadi bahwa beberapa aktivis Masjid Arif Rahman Hakim UI yang mengikuti LMD misalnya, mengembangkan kegiatan sejenis dengan penamaan yang berbeda-beda. Di masjid ARH-UI sendiri dikenalkan program Integratif Studi Tentang Islam (ISTI), di FE-UI dengan nama Studi Islam Terpadu (SIT), di FISIP dengan nama Kajian Dasar Islam (KADAIS), di FS-UI dengan nama FONDASI, dan di FMIPA-UI dengan nama Integrasi Studi Terpadu Islam (ISTI) (Siddiq, 2003, 71).

Meskipun begitu, pada dasarnya 'Imaduddin tidak pernah mengisbatkan dirinya sebagai bagian dari gerakan Tarbiyah. Hanya saja, ide dan konsep dakwah yang ia ciptakan, serta kegiatan pembinaan dakwah kampus yang dijalankan olehnya secara tidak langsung telah menjadi sumber inspirasi yang mampu dimanfaatkan oleh kalangan gerakan Tarbiyah itu sendiri.

2. Rahmat Abdullah

Dalam gerakan Tarbiyah, sosok tokoh Rahmat Abdullah adalah salah satu tokoh penting dalam mengembangkan ajaran Gerakan Tarbiyah. Rahmat Abdullah lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 1953, ia adalah putra kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Abdullah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Abdullah dikenal sebagai orang yang saleh, lembut, taat beragama dan jujur. Sifat inilah yang menurut peneliti menurun pada Rahmat Abdullah kelak (Irhamyah, 2010, 10).

²¹ Gerakan LMD ini mendapatkan apresiasi yang sangat besar bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di dunia Internasional melalui IIFSO. Bahkan di Malaysia, ketika 'Imaduddin menjadi dosen di negeri Jiran, ia diminta untuk membuat kegiatan LMD di Malaysia yang diberi nama Latihan Tauhid (Ashiddiqie, 2002; Abdulrahim, 2002).

Persentuhannya dengan gagasan-gagasan Ikhwānūl Muslimīn cukup unik dan berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya. Proses perkenalannya dengan pemikiran Ikhwānūl Muslimīn terjadi pada tahun 1972, tepatnya ketika Rahmat Abdullah muda berusia 19 tahun. Pada tahun tersebut seorang ulama terkemuka, Dr. Yusuf Al-Qordhowi, berkunjung ke Indonesia dan menyumbangkan beberapa kitab tentang gerakan dakwah yang berjudul *Maa Dzaa Khasiral Alam bi Inhithatil Muslimin?* (Apa Derita Dunia dengan Kemunduran Kaum Muslimin?) karangan Abu Hasan Ali An-Nadwi dan *Fii Dzilalil Quran* (di bawah naungan Qur'an) karangan Sayyid Qutb kepada beberapa ulama Indonesia, salah satu tokoh yang menerima buku tersebut adalah KH. Abdullah Syafi'i, pemimpin Yayasan As-Syafiyah Jakarta, yang juga merupakan guru Rahmat Abdullah. Dari KH. Abdullah Syafi'ilah Rahmat Abdullah mulai banyak mempelajari tentang berbagai gerakan Islam, termasuk Ikhwānūl Muslimīn (IrhamSyah, 2010, 3).

Persentuhan pemikirannya dengan gerakan Ikhwānūl Muslimīn makin kuat ketika ia banyak membaca kitab-kitab karya ulama-ulama Ikhwān yang terdapat di Yayasan milik K.H. Abdullah Syafi'i tersebut, seperti Tafsir *Fii Dzilalil Qur'an* (Di bawah Naungan Al Qur'an) karangan Sayyid Qutb, *Bainal Ami wal Yaum* (Antara Kemarin dan Hari Ini), *Da'watuna fii Thaurin Jadid* (Dakwah Kami di Era Baru) dan *Risalah Ta'lim*, yang ketiga kitab tersebut merupakan karangan Hasan Al Banna, serta karya-karya Yusuf Al-Qordhowi, Mustafa Masyhur, maupun Abu Hasan Ali An-Nadwi. Tiga kitab Hasan Al-Banna di atas merupakan tiga kitab yang begitu membekas bagi Rahmat usai ia membacanya, dan tiga kitab ini pula yang di kemudian hari menjadi bagian dari buku rujukan para aktivis gerakan Tarbiyah di Indonesia. Pada tahun 1980-an, setelah Rahmat Abdullah lulus dari perguruan Asy-Syafi'iah, K.H. Abdullah Syafi'i merekomendasikan Rahmat dan tiga murid KH. Abdullah Syafi'i lainnya untuk melanjutkan studi di Al-Azhar Mesir. Namun, karena fitnah yang muncul pada Rahmat disebabkan oleh keterlibatannya dalam gerakan Tarbiyah, keberangkatannya untuk melanjutkan kuliah di Mesir pun gagal.

Meskipun begitu, Rahmat Abdullah tidak langsung patah semangat dalam mengembankan dirinya di dunia Islam. Ia pun mengabdikan dirinya sebagai guru di almamaternya, As-Syafi'iyah. Selain mengajar di As-Syafi'iyah, Rahmat pun mengajar di sekolah Darul Muqorribin serta melakukan kegiatan *usroh* di sekolah tersebut (Irhamsyah, 2010, 39).

Keaktifannya dalam dunia pendidikan Islam juga mempertemukannya dengan K.H. Bakir Said Abduh. Bakir Said Abduh adalah seorang ulama lulusan Al-Azhar Mesir yang mengelola Rumah Pendidikan Islam (RPI) di bilangan Kuningan. Melalui Bakir Said Abduh pula, Rahmat banyak membaca buku-buku karya-karya ulama Ikhwānūl Muslimīn lainnya, termasuk kitab *Da'watuna* karangan Hasan Al-Banna yang di kemudian hari ia terjemahkan menjadi *Dakwah Kami Kemarin dan Hari Ini* dan diterbitkan oleh Pustaka Amanah (Irhamsyah, 2010, 39–40).

Memasuki era 80'an, di saat JIM Indonesia mulai berdiri, ia pun bergabung ke dalam gerakan tersebut. Atas kegigihannya dalam menyebarkan dakwah Tarbiyah kepada berbagai kalangan, pada tahun 1990-an ia pun mendapatkan amanah dari salah seorang anggota gerakan berupa wakaf tanah di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Di tanah inilah, di kemudian hari, Rahmat Abdul-lah bersama para *muassis* dakwah Tarbiyah dan murid-muridnya mendirikan Islamic Center Iqro (1993) yang selang beberapa tahun kemudian, lokasi tersebut telah menjadi salah satu episentrum terpenting gerakan Tarbiyah. Di yayaan inilah, Rahmat Abdullah mengajarkan kajian-kajian kitab klasik seperti Tafsir Ibnu Katsir atau Jalalain, serta tidak jarang mempertajam tinjauan klasik tersebut dengan kitab kontemporer seperti kitab *Fii Zhilal Al Qur'an* dari Sayid Qutb maupun *Turjuman Al Qur'an* dari Abul A'la al Maududi. Sesekali Rahmat pun menyitir tafsir *Thabathabai* dari kalangan Syiah atau *The Meaning of the Holy Qur'an* dari Abdullah Yusuf Ali (Irhamsyah, 2010, 27–28).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahmat Abdullah pada pidato pengukuhan dirinya sebagai syekh Tarbiyah Indonesia pada tanggal 8 Juli tahun 2001 di Masjid Ukhuwah Islamiyyah, Universitas

Indonesia Depok, ia mengungkapkan bahwa format awal penyebaran dakwah gerakan Tarbiyah ialah menyebarkan pemikiran-pemikiran dakwah gerakan tersebut ke banyak pesantren di Indonesia, dengan asumsi institusi inilah yang mampu membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Namun, setelah dievaluasi, format tersebut tidak berjalan dengan baik (Irhamisyah, 2010, 40–41).

Rahmat menuturkan bahwa salah satu penyebab kurang berkembangnya pemikiran gerakan Tarbiyah pada pesantren di Indonesia adalah karena berkembang pemikiran di kalangan pesantren bahwa kitab yang berkah adalah “yang berwarna kuning”. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar pesantren yang ada pada masa itu menyandarkan kurikulum pendidikan mereka pada kitab-kitab kuning yang banyak dimunculkan oleh ulama-ulama abad ke-10. Sementara itu, kitab-kitab yang disumbangkan oleh gerakan Tarbiyah adalah kitab-kitab karangan ulama kontemporer. Dampaknya, tingkat pembacaan dan penguasaan substansi buku tersebut di kalangan pesantren relatif rendah (Irhamisyah, 2010, 41).

Format kedua disebarakan pada organisasi-organisasi masyarakat Islam. Di kalangan ormas Islam, Rahmat berujar, “Di kalangan ormas, banyak yang bertanya tentang inti ajaran gerakan dalam waktu singkat”. Menurutny, hal ini juga merupakan masalah karena kurikulum dalam sistem kaderisasi gerakan Tarbiyah bersifat berjenjang sehingga membutuhkan tahapan-tahapan tertentu untuk mempelajarinya (Irhamisyah, 2010, 41).

Format ketiga diterapkan di kalangan akademisi, khususnya perguruan-perguruan tinggi umum. Di sinilah ternyata gerakan Tarbiyah tumbuh dengan subur. Setidaknya, terdapat beberapa faktor penting yang melandasi keberhasilan penyemaian gerakan Tarbiyah di perguruan-perguruan tinggi umum, yaitu sebagai berikut. Pertama, walaupun buku-buku gerakan Tarbiyah sebagian besar berbahasa Arab, tetapi ketika itu tidak sedikit pula yang berbahasa Inggris. Dari buku-buku gerakan yang berbahasa Inggris inilah banyak mahasiswa yang mengambil inti sari gerakan tersebut. Kedua, tingkat keinginan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran baru yang cukup tinggi di kalangan intelektual kampus. Ketiga, latar belakang mahasiswa di

kampus umum, umumnya berlatar belakang *abangan*. Rasa frustrasi mereka terhadap kehidupan sekuler yang dianggap telah “mengeringkan jiwa” telah melahirkan kesadaran mereka untuk membangun konektivitas, kolektivitas, dan kohesivitas terhadap suatu gerakan keagamaan—seperti gerakan Tarbiyah—yang dalam pandangan mereka mudah dicerna, dapat dipahami secara logika, serta memiliki tujuan yang runut dan terukur dalam melawan sekularisme itu sendiri (Abdullah & Siddique, 1989; Irhamsyah, 2010, 41).

3. Hilmi Aminuddin

Di dalam perkembangan gerakan Tarbiyah, nama Hilmi Aminuddin juga sudah tidak asing lagi sebagai salah seorang tokoh pelopor gerakan tersebut. Dalam memelopori gerakan Tarbiyah, Hilmi Aminuddin lebih banyak berperan di balik layar. Hilmi Aminuddin yang lahir di Cirebon pada tahun 1946 adalah putra Danu Muhammad Hasan, salah satu tokoh penting Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Kartosuwiryo, selain Aceng Djaelani dan Hispran. Hilmi Aminuddin pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, sejak berusia 6 tahun sebelum kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Syariah, Universitas Islam Madinah pada akhir tahun 1970-an (Permata, 2010).

Awal pertama kali Hilmi Aminuddin memperkenalkan gagasan Tarbiyah adalah pada saat ia berusia sekitar 30-an tahun. Pada tahun 1970-an pertengahan, Hilmi Aminuddin kembali ke Tanah Air. Dakwah yang pertama kali ia bangun adalah melalui Keluarga Besar-Pelajar Islam Indonesia (KB-PII), Gerakan Pemuda Islam (GPI), yang mencoba memperkenalkan konsep-konsep gerakan Tarbiyah melalui berbagai diskusi. Dalam pergerakan inilah, pada tahun 1980, Tifatul Sembiring mulai mengenal Hilmi Aminuddin yang sangat rajin mengisi taklim di komunitas PII Jakarta. Apalagi, waktu itu sentuhan awal yang dirasakan paling kuat di lingkungan PII adalah sentuhan Tarbiyah dan dakwah Hilmi Aminuddin. Menurutnya, sasaran gerakan Tarbiyah adalah membina diri sendiri, sedangkan dakwah membina umat (Hisyam dkk., 2012, 33).

Tahun 1981, ketika gerakan Tarbiyah mulai merasuk ke kampus-kampus perguruan tinggi negeri (PTN) di Jabodetabek dan Jawa Barat, Hilmi Aminuddin ditahan. Penahanan Hilmi Aminuddin dikaitkan dengan tuduhan penyebaran dokumen rahasia milik Panglima Kopkamtib Laksamana TNI Sudomo. Konon, suatu hari Hilmi Aminuddin kedatangan seorang wartawan, yang juga mantan anggota PII, Hasan Surya Atmadja. Dia membawa sebuah dokumen Kopkamtib. Pada setiap lembar dokumen tersebut tertera tanda tangan Sudomo dan terdapat tulisan “rahasia”. Dokumen tersebut berisi strategi pemenangan pemilu yang juga menyudutkan umat Islam dan partai politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Belakangan, Ustaz Himi mendapat cerita, dokumen itu diperoleh secara illegal. Mulanya dokumen itu dijilid di sebuah percetakan di daerah Pasar Senen. Hasan yang juga memiliki percetakan, meminta bagian order pekerjaan dan diberi oleh percetakan di Senen tersebut untuk digandakan. Hasan ditangkap dan kepada aparat yang menangkapnya, dia menyebut Ustaz Hilmi juga memilikinya. Akhirnya Ustaz Hilmi ditahan dari Agustus 1981 sampai Juli 1983 (Hisyam dkk., 2012, 38).

Pada awal berdirinya gerakan Tarbiyah tahun 1983, posisi Muqorrib ‘Am dipimpin oleh Salim Segaf Al-Jufri²². Namun, setahun kemudian, lantaran Salim Segaf Al-Jufri harus melanjutkan studi di Timur Tengah, posisi Muqorrib ‘Am beralih kepada Hilmi Aminuddin hingga tahun 2015 (Munandar, 2011, 242).

Dalam perjalanannya, Hilmi Aminuddin-lah yang dianggap sebagai orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan metode-metode dakwah gerakan Tarbiyah, sekaligus orang yang paling konsisten dalam menjaga Jamaah Tarbiyah itu sendiri, sejak awal berdirinya hingga sekarang. Hilmi Aminuddin pula yang menciptakan baik landasan maupun model-model kurikulum Jamaah Tarbiyah yang dibuatnya secara praktis. Hilmi Aminuddin mengajar Aqidah, Al-Qur’an, Al-Hadits, Fiqh Islami, Siroh Nabawiyah, Akhlaq, Ghazwul

²² Istilah Muqorrib ‘Am adalah nama yang sangat mengental pada pemimpin utama Ikhwanul Muslimin.

Fikri, Wa'yu siyasi Tarbiyah Awlad, dan Fiqhun Nisaa'. Dengan pengajaran itu, diyakini akan terbentuk bibit-bibit kader-kader dakwah dengan kepribadian Islami dan pemikiran Islam yang kuat (Hisyam dkk., 2012, 36).

Dalam sebuah wawancara penulis dengan Muttaqin²³, beliau mengungkapkan tentang peranan penting Hilmi Aminuddin dalam menghadirkan sebuah gerakan Tarbiyah di Indonesia.

“Gerakan Tarbiyah itu kan sebenarnya penamaan dari luar, karena kita enggak pernah menyebut Jamaah Tarbiyah. Cuma, kita menyebutnya ikut Tarbiyah. Tarbiyah itu sebenarnya bahasa Arabnya dari ‘pendidikan’, ‘pembinaan’. Tarbiyah itu kan pembinaan. Ketika itu ada semangat untuk keislaman, kita identikkan juga dengan semangat kearaban. *Mangkanya* bahasa itu kita Arab-Arab-kan. Kalau kita melakukan pembinaan, ya mungkin kalau di organisasi lain namanya bukan pembinaan, tapi pengkaderan kan. Mungkin kalau di PKI atau apa ... atau organisasi lain, mungkin namanya pembinaan. Tapi karena kita nuansanya Islam, kita menggunakan istilah *tarbiyah* ... ‘ayo ikut tarbiyah’ ... artinya tadi, pembinaan. Dari hal seperti inilah, orang lain menyebutnya Jamaah Tarbiyah. Padahal, kita sendiri tidak pernah menyebut itu Jamaah Tarbiyah. Memang, ketika itu kita tidak terstruktur. Bukan sebuah *tandhim*, bukan sebuah organisasi, hanya sebuah komunitas aja yang menyatukan kita dikarenakan ada rasa yang sama, misi yang sama. Belum menjadi sebuah struktur yang ada pimpinannya, dan juga belum ada bidang-bidangnya.

Masing-masing kita itu punya guru sendiri-sendiri, ya mungkin kalau di sini saya *dulu* dengan Ustaz Rahmat Abdullah, atau mungkin yang lain dengan Aus Hidayat. Kita masing-masing. Namun, ketika itu semangat ke-Islam-an itulah yang menyatukan kita ... dan metode-metode pengajaran juga pembinaannya pun berbeda-beda. Kang Aus sendiri mungkin lebih banyak pembinaannya melakukan pendekatan dengan konsep *tadabbur*.

²³ Muttaqin merupakan salah seorang generasi kedua Jamaah Tarbiyah yang langsung mendapatkan pembinaan intensif dari Rahmat Abdullah. Kini beliau menjabat sebagai anggota legislatif DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS.

Ustaz Rahmat lain lagi yang lebih menekankan baca kitab. Jadi masing-masing itu punya gaya pembinaan yang berbeda sebenarnya, enggak satu konsep.

Titik temu di antara mereka terjadi ketika ada satu orang yang namanya Ustaz Hilmi Aminuddin. Dia bawa satu sistem pengajaran yang baru, dia menggunakan pendekatan dengan ringkasan pelajaran Islam dalam bentuk skema-skema. Nah, skema itu yang kemudian dipakai oleh semua. Semua *ngikut* ke situ. Jadi ketika kita belajar itu, semua dibikin bagan-bagan *gitu*. Nah, dengan bagan-bagan itu memang kita lebih mudah memahami permasalahan. Nah, semua itu akhirnya mengerucut ke situ. Di situ baru ada penyatuan metode. Di situlah letak perkumpulannya. Dari mentoring atau pembinaan yang terpencair-pencair itu, akhirnya dikumpulkan dan dipersatukanlah oleh Ustaz Hilmi Aminuddin. Itu terjadi sekitar tahun '80-an sudah mulai, itu enggak langsung bareng terkumpul semua, *tapi* satu-satu. *Nyantol* satu per satu ... sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi banyak. Dan inilah cikal bakal lahirnya Partai Keadilan, sedangkan konsep Ikhwānul Muslimin sendiri memang menjadi sebuah rujukan hampir semua pergerakan Islam. Memang Pak Natsir juga ingin sebenarnya bergabung dengan Ikhwānul Muslimin. Cuma, ketika saya masuk *training* pertama kali selama satu minggu pas saya masih SMA, yang ketika itu dikelola oleh kawan-kawan HMI, setelah itu kita diajarkan tentang *usroh*. Itu anak-anak ITB kan rata-rata. Dikumpulin lagi habis acara itu kan di musala, kita juga bingung kan *usroh* itu apa. Kita baca buku-buku tentang *usroh*. Kita baru tahu kalau ternyata *usroh* itu merujuk kepada sistem yang dijalankan oleh Ikhwānul Muslimin. Jadi orang-orang HMI orang apa menggunakan sistem *usroh*. DI/TII juga menggunakan sistem itu. Hampir semua gerakan mencoba menggunakan *usroh*, Dewan Dakwah atau gerakan yang lainnya.” (Wawancara dengan Muttaqin tanggal 4 Oktober 2014).

4. Abu Ridho

Sebagaimana diungkapkan pada subbagian DDII, Abu Ridho—yang memiliki nama asli Abdi Sumaithi—memiliki peranan penting dalam menyebarkan ideologi Ikhwānul Muslimin melalui buku. Ia adalah

tokoh muda DDII yang memang sangat rajin dalam menerjemahkan buku-buku pemikiran tokoh-tokoh Islam Internasional ke dalam bahasa Indonesia, sampai kemudian lebih memfokuskan kepada buku-buku pemikiran tokoh-tokoh Ikhwānūl Muslimīn. Antara tahun 1981–1987, DDII menerjemahkan dan menerbitkan belasan buku Ikhwānūl Muslimīn, antara lain *Beberapa Studi tentang Islam* (Sayyid Quthb), *Islam di Antara Kebodohan Umat dan Kejahilan Ulama* (Abdul Qodir Audah), *Peranan Mahasiswa Membangun Masa Depan* (Abul A'la Al-Maududi), *Tipu Daya Orientalis* (Musthafa As-Siba'i), *Sari Sejarah dan Perjuangan Rasulullah* (Musthafa As-Siba'i), *Derita Dunia Bila Islam Mundur* (Abu Hasan Ali an-Nadwi), *Rakyat dan Negara dalam Islam* (Abdul Karim Zaidan), *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna* (Yusuf Al-Qordhowi), *Konsep Pembaruan Masyarakat Islam* (Hasan Al-Banna), *Jalan Menuju Pembebasan* (Musthafa Masyhur), *Kebangkitan Kebudayaan Islam* (Musthafa As-Siba'i), *Pasang Surut Gerakan Islam Suatu Studi ke Arah Perbandingan* (Yusuf Al-Qordhowi), *10 Aksiomatik Islam* (Sayyid Hawa), *Jalan Dakwah* (Musthafa Masyhur), *Al-Hijrah wal Harakah* (Imaduddin Khalil), dan *Tafsir Atas Realitas* (Muhammad Quthb). Buku tokoh penting Ikhwānūl Muslimīn lainnya seperti *Fi Afaq at-Ta'lim* karya Said Hawwa serta trilogi karya Said Hawwa *Allah*, *Ar-Rasul*, dan *Al-Islam*. Buku-buku inilah yang dinilai membentuk karakter gerakan dakwah kampus. Penerjemahan atas buku-buku ini melibatkan Abu Ridho, A. Rahman Zainuddin, dan Nahbah Husein. Dalam hal ini, Abu Ridho sendiri telah menerjemahkan setidaknya tujuh buku (Rahmat, 2008, 108–109).

Abu Ridho sendiri berkenalan dengan pemikiran Ikhwānūl Muslimīn di Riyadh, Saudi Arabia. Dia termasuk generasi pertama yang mengikuti *training* LMD serta berinteraksi intensif dengan Imaduddin dan Anwar Ibrahim di Saudi Arabia. Sepulang dari Saudi Arabia, dia sempat mengajar di IPB dalam beberapa waktu, kemudian ia kembali aktif di DDII dan mendirikan Lembaga Studi Islam (LSI) bersama Abdul Qodir Jailani serta menerbitkan *Mimbar Islam*. Namun, tidak beberapa lama kemudian akhirnya LSI pun

dibubarkan oleh pemerintah. Sejak saat itulah, Abu Ridho beralih dan lebih banyak aktif dalam menerjemahkan buku-buku Ikhwānūl Muslimīn. Ia pula bersama kawan-kawannya yang mendirikan sebuah lembaga penerbitan yang banyak menerbitkan buku-buku pemikiran Ikhwānūl Muslimīn. Abu Ridho adalah generasi pertama alumni Timur Tengah yang memperkenalkan *manhaj* Tarbiyah dalam pembinaan LDK, selain Hilmi Aminuddin dan Rahmat Abdullah.

C. Asal Mula dan Fase Ideologis Gerakan Tarbiyah di Indonesia: Sebuah Analisis

Harus diakui bahwa berkembangnya gerakan dakwah kampus di berbagai universitas lebih disebabkan adanya *political opportunity structure* yang dimanfaatkan oleh DDII dan para alumni Timur Tengah untuk membangkitkan aktivisme Islam ala IM di kalangan mahasiswa di tengah represivitas negara terhadap politik Islam. Terlepas dari represivitas negara dan rivalitas antara islamisme (yang direpresentasikan oleh intelektual DDII dan liberalisme Islam yang direpresentasikan oleh sebagian cendekiawan muslim dalam memenangkan pertarungan hegemoni diskursus di tengah kalangan mahasiswa muslim), dua hal yang dilakukan oleh DDII selain membentuk/membangun struktur mobilisasi, repertoar, simbolisasi identitas, serta *managing and maintaining* di kalangan mahasiswa muslim adalah keberhasilannya dalam membentuk “ruang publik baru”—yaitu masjid kampus—yang selama ini tidak diproteksi oleh Rezim dan lawan politiknya sebagai instrumen yang sangat efektif dalam menyemaikan aktivisme Islam sekaligus mereproduksi inteligensi muslim baru.

Sejatinya, sejak awal berkembangnya, paham IM di Indonesia tidak dimotori oleh adanya struktur organisasi yang jelas yang langsung terhubung untuk menjadi representasi dakwahnya di Indonesia, tetapi justru dimotori oleh konsep dakwah *usroh*-nya yang telah menginspirasi DDII/LMD untuk mereplikasi konsep tersebut. Karena tidak adanya pelembagaan IM di Indonesia, hal tersebut telah mengakibatkan penafsiran para dai—yang terinspirasi oleh gerakan

IM—terhadap pelaksanaan konsep *usroh* berbeda-beda²⁴.Barulah di penghujung era 1970-an, Hilmi Aminuddin mulai mencoba menyatukan persepsi antarkalangan yang terinspirasi dengan gerakan IM di Indonesia, melakukan penyeragaman metode dakwah dan model kurikulum pembelajaran Tarbiyah, serta menyusun *manhaj* dan *tandhim* ideologi Tarbiyah (Hisyam dkk., 2012; Wawancara M, 4 Oktober 2014).

Pada era awal pembentukan ideologi jemaah, sejatinya penggunaan istilah *tarbiyah* (KBBI: tarbiah) tidaklah dilahirkan dari suatu konsensus yang dibentuk oleh para pendirinya. Pelekatan istilah *tarbiyah* sebagai sebuah identitas jemaah tersebut terjadi lantaran adanya beberapa faktor sosiologis yang mendasarinya. Setidaknya terdapat tiga faktor yang melandasi term *tarbiyah* digunakan sebagai identitas gerakan tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, di era penghujung 1970-an, istilah *usroh* yang berkembang di kalangan mahasiswa muslim terpaksa harus digantikan dengan kata *tarbiyah* atau pun *halaqah*. Pergantian istilah terjadi lantaran di era tersebut istilah *usroh* telah terkontaminasi oleh gerakan ekstrim DI/TII yang juga mengenakan istilah tersebut sebagai aktivitas kaderisasi mereka. Kedua, istilah *tarbiyah* yang bermakna ‘pendidikan’ juga diadopsi oleh Hasan Al-Banna sebagai kata lain daripada *usroh*. Ketiga, ketika kata “Tarbiyah” telah membumi di kalangan mahasiswa muslim, para pengamat di luar dari kelompok tersebut yang awalnya mengidentifikasi mereka sebagai gerakan *usroh* kini mulai berganti mengidentifikasi mereka sebagai gerakan Tarbiyah/Jamaah Tarbiyah (Salman, 2006; Machmudi, 2008, 44 dan 134–135). Sejak saat itulah, term gerakan Tarbiyah/Jamaah Tarbiyah juga digunakan oleh elite dan anggota sebagai sebuah “identitas” bagi gerakan tersebut.

Tepat pada tahun 1983, Hilmi Aminuddin bersama Abdullah Said Baharmus, dan Encep Abdul Syukur menetapkan Salim Segaf Al-

²⁴ Muttaqin mengungkapkan bahwa contoh dari perbedaan penafsiran penerapan konsep *usroh* adalah seperti berikut: Rahmat Abdullah menerapkan sistem *usroh* untuk mempelajari berbagai kitab-kitab Islam, Aus Hidayat menerapkan sistem *usroh* untuk mempelajari *tadabbur* Al-Qur’an, dsb. (Wawancara dengan M tanggal 4 Oktober 2014 di Depok, Jawa Barat)

Jufri sebagai Muqorrib ‘Am pertama gerakan Tarbiyah. Namun dalam perjalanannya, jabatan yang dipegang oleh Salim Segaf hanya mampu bertahan selama satu tahun, mengingat pada masa itu Salim harus kembali ke Timur Tengah untuk melanjutkan pendidikannya hingga jenjang S-3. Sejak saat itulah, posisi Muqorrib ‘Am beralih kepada Hilmi Aminuddin hingga tahun 2015 (Salman, 2006, 188; Munandar, 2011, 242). Sebagaimana diungkapkan oleh Tifatul Sembiring, pada tahun 1983 gerakan Tarbiyah mulai menemukan bentuknya menjadi suatu sistem pengajaran, tanpa suatu institusi (Hisyam dkk., 2012).

Harus diakui bahwa meskipun di fase pembentukan *tandhim* sebagian elite Tarbiyah melakukan komunikasi dengan gerakan IM, bukan berarti gerakan Tarbiyah sepenuhnya menerapkan pola-pola dakwah IM ala Mesir di Indonesia. Meskipun begitu, sebagaimana digambarkan oleh Supendi (2011) bahwa *background* gerakan Tarbiyah adalah sebagai bagian dari gerakan transnasional Islam—sebagaimana Salafi, Hizbut Tahrir, dan Jama’ah Tabligh. Meskipun secara koheren praksis politik dan dakwah gerakan Tarbiyah lebih mampu mengontekstualisasikan nilai-nilai dakwah IM ke dalam situasi sosial-politik lokal setempat, secara inheren visi ideologi gerakan tersebut tetap terkoneksi dengan agenda pelebagaan ideologi IM global yang bertujuan untuk membentuk *daulah islamiyah rasyidah* dengan cara menghubungkan *nidzom* asasi (aturan/anggaran dasar) gerakan Tarbiyah yang secara hierarkis terikat dengan *Nidham Aam* Ikhwānul Muslimin di level global. Kondisi seperti gerakan Tarbiyah juga terjadi di hampir seluruh cabang IM—khususnya yang berada di Jazirah Arab seperti Yordania, Suriah, Palestina, Kuwait, Sudan, dan Yaman—serta gerakan-gerakan yang terinspirasi oleh IM seperti An-Nahdah Tunisia maupun Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Meskipun bersama-sama mengusung konsep Hasan Al-Banna tentang bangsa Islam (*Islamic Nation*) yang melampaui batas-batas politik dan negara, gerakan cabang dan inspirasi tersebut tidak pernah benar-benar melepaskan diri dari batas-batas kebangsaannya lantaran disibukkan dengan isu-isu politik negaranya masing-masing dan terpaksa harus mengadaptasi agenda serta metode mereka dengan kebutuhan-kebutuhan lokal (Fealy & Bubalo, 2007, 35).

Lantaran adanya kebutuhan akan adaptasi dan kontekstualisasi inilah, sejak awal konstruksi *tandhim* dan *manhaj* gerakan Tarbiyah tidak terlalu *firm* terhadap metodologi dakwah IM serta bisa diinterpretasikan oleh setiap elite secara berbeda-beda. Meskipun pada awal terbentuknya *tandhim* dan *manhaj* Tarbiyah lebih terikat dengan etika-etika konsolidatif, bukan berarti etika konsolidatif tersebut tidak bersifat problematis, terlebih semasa Hilmi Aminuddin menjadi penggerak sekaligus Muqorrib 'Am gerakan tersebut.

Dalam konteks aktor, keberadaan Hilmi Aminuddin dalam gerakan tersebut masih menimbulkan tanda tanya, mengingat Hilmi Aminuddin adalah putra Danu Muhammad Hasan, salah satu tokoh penting DI/TII pimpinan Kartosuwiryo yang di kemudian hari beralih menjadi bagian dari anggota Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) serta berhubungan dekat dengan Pitut Soeharto, selaku mantan Direktur Operasi Khusus (OPSUS) badan Intelijen yang dibentuk Ali Moertopo²⁵. Di akhir tahun 1970-an, setelah

²⁵ Jenkins (2010, 75–76) dan Latif (2012, 446) menggambarkan bahwa Pitut Soeharto juga dianggap memiliki peranan penting dalam hadirnya Komando Jihad. Para pemimpin Komando Jihad sendiri terdiri dari para bekas pendukung DI/TII yang diasuh oleh Ali Moertopo. Komando Jihad sendiri ditengarai sebagai buah dari operasi intelijen yang dilakukan oleh Ali Murtopo untuk mendiskreditkan golongan Islam dengan kekerasan dan terorisme sehingga politik Islam PPP akan terisolasi secara politik, sekaligus dalam rangka menyediakan dalil bagi penangkapan aktivis politik muslim yang lebih luas. Dalam hal ini, Pitut Suharto dianggap memiliki peranan penting dalam mengurus rekayasa tersebut di hadapan Soeharto.

Sebagaimana digambarkan oleh Heru Cahyono (dalam Mubarak, 2008, 81), Ali Moertopo telah lama menjalin kerja sama dengan sejumlah bekas tokoh DI/TII. Setelah ikut opus, para bekas DI biasanya mendapati suplai keuangan secara rutin dari opus. Maklum, mereka umumnya hidup miskin. Opus rupanya selalu memelihara ilusi mengenai kemungkinan pendirian negara Islam.

MJASP mengungkapkan bahwa Ustaz Hilmi Aminuddin adalah anak Danu Muhammad Hasan. Danu Muhammad Hasan sendiri adalah bagian dari elite DI/TII yang sangat dekat dengan Ali Moertopo. Danu Muhammad Hasan juga yang menjadi bagian dari rekayasa Ali Murtopo untuk mendirikan Komando Jihad, yang ketika itu direkayasa untuk menjatuhkan politik Islam dengan menunjukkan Islam yang melegalkan tindak kekerasan. Beliau dianggap men-

Hilmi mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Putut Soeharto-lah yang mengantarkan Hilmi ketika ingin berangkat melanjutkan studi ke Fakultas Syariah, Universitas Islam Madinah (Tim Buku Tempo, 2011, 2014). Sepulangnya dari Madinah, Hilmi Aminuddin langsung bergaul erat dengan Suropto, mantan petinggi BAKIN, yang kemudian menjadi Kader PKS dan sekarang duduk di Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) (Munandar, 2011, 242).

Di tahun 1981, di saat dakwah gerakan Tarbiyah tengah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan di berbagai universitas, Hilmi Aminuddin justru selama dua tahun terpaksa harus mendekam ke dalam penjara lantaran ia dituding telah melakukan penyebaran dokumen rahasia milik Panglima Kopkamtib Laksamana TNI Sudomo (Machmudi, 2008; Hisyam dkk., 2012, 38)²⁶. Meskipun telah dibantah pernyataannya oleh Machmudi (2008) tentang tidak adanya nama Hilmi Aminuddin dalam struktur DI/TII maupun Komando Jihad dalam Kliping Komando Jihad milik Pusat Sejarah ABRI tahun 1978–1980, pernyataan Umar Abduh tentang sosok Hilmi Aminuddin menjadi Menteri Luar Negeri Darul Islam pimpinan Adah Jaelani di tahun 1980-an telah beredar luas (Machmudi, 2008, 93).

dapatkan pencarian hidup dari kubu Ali Murtopo. Danu Muhammad sendiri, dianggap sebagai pengkhianat oleh DI/TII akibat mendirikan Komando Jihad. Tidak dimungkiri bahwa pada dasarnya, Jamaah Tarbiyah masih memiliki keterikatan dengan DDII. Ketika fase-fase memasuki era reformasi bergulir, kalangan aktivis Jamaah Tarbiyah juga mengajak kalangan DDII untuk bersama-sama mendirikan partai Islam. Namun, DDII menolak dan justru mendirikan Partai Bulan Bintang. Penolakan tersebut disebabkan di dalam Jamaah Tarbiyah terdapat Hilmi Aminuddin yang dianggap sebagai bagian dari intelijen (Wawancara dengan MJASP tanggal 20 Oktober 2014).

²⁶ Konon, suatu hari Hilmi Aminuddin kedatangan seorang wartawan, yang juga mantan anggota PII, Hasan Surya Atmadja. Dia membawa sebuah dokumen Kopkamtib. Pada setiap lembar dokumen tersebut tertera tandatangan Sudomo dan terdapat tulisan “rahasia”. Dokumen tersebut berisi strategi pemenangan pemilu yang juga menyudutkan ummat Islam dan partai politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Hisyam dkk., 2012, 38).

Terlepas dari fakta atau fiktifnya berita tersebut, DDII sendiri mencoba menjaga jarak dengan Hilmi Aminuddin. Hal tersebut dibuktikan ketika pada era Reformasi DDII diajak oleh sebagian elite Tarbiyah—yang juga merupakan anggota DDII—untuk bersama-sama mendirikan partai Islam, DDII menolak ajakan tersebut lalu mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB)²⁷. Salah satu alasan DDII menolak tawaran tersebut adalah lantaran adanya Hilmi Aminuddin di gerakan tersebut yang dianggap oleh sebagian elite DDII bahwa ia merupakan bagian dari intelijen (Wawancara MJASP, 20 Oktober 2014).

Sudah barang tentu realitas biografi Hilmi Aminuddin tidak terlalu “*masyhur*” dibicarakan di lingkungan aktivis gerakan Tarbiyah, dibandingkan ketokohan Rahmat Abdullah dan Yoyoh Yusroh yang bersifat inspiratif. Selain lantaran sosok Hilmi Aminuddin diposisikan sebagai pemimpin *tandhim* (organisasi) yang cenderung tidak terlalu diperkenalkan terhadap publik dan disakralkan dalam struktur gerakan, hal tersebut juga terjadi lantaran sejak awal konstruksi ideologi Tarbiyah mengedepankan “*will to truth*”—husnuzan—terhadap berbagai aktivisme elite. Di sisi lain, level pemahaman dan kepentingan antarelite yang berada di dalam gerakan tersebut berbeda-beda pada era awal terbentuknya gerakan Tarbiyah. Meskipun demikian,, *conflict of interest* ataupun upaya untuk menelusuri jejak Hilmi Aminuddin lebih jauh ketika itu tidaklah tampak. Ini disebabkan lantaran prioritas mengekskspansikan gerakan di tengah otoritarianisme rezim serta pengimplementasian ideologi gerakan yang masih berorientasi pada penguatan konsolidasi dan pemingkanaan motivasi bagi setiap kader untuk menjadi pribadi-pribadi yang Islami dan keluarga-keluarga muslim sangatlah kental dan dominan. Dalam gerakan Tarbiyah, fase inilah yang disebut sebagai fase *mihwar tandhimi* (orbit peng-

²⁷ Di era Reformasi, anggota Keluarga Bulan Bintang (perkumpulan keluarga Masyumi dan DDII) mendirikan berbagai partai politik seperti PAN, PK, Partai Politik Indonesia Islam Masyumi (PPIIM), dan Partai Umat Islam (PUI) serta bergabung dengan PPP dan Golkar yang sudah lahir sejak era Orde Baru (Fealy & Platzdasch, 2005).

ideologisasi-an) (Munandar, 2011, 277)²⁸. Pada fase ini, elite dan kader Tarbiyah mulai membentuk berbagai lembaga penerbitan buku dan majalah yang menerbitkan tema-tema harakah IM dan dunia Islam, yaitu Penerbit Al-Ishlahy Press, Majalah Sabili (1985), Gema Insani Press (1986), dsb. (Damanik 2002; Haryadi, 2010; Sen & Hill, 2011).

Pada tahun 1988, di tengah Orde Baru mulai mengakomodasi Islam politik guna menyubtitusi “dukungan suara” militer yang mulai membelot Rezim, Hilmi Aminuddin memanfaatkan momentum *political opportunity structure* tersebut untuk mendeklarasikan bahwa gerakan Tarbiyah mulai memasuki *mihwar sya’bi* (orbit sosialisasi gerakan kemasyarakatan) yang berorientasi pada hal-hal berikut (Takariawan, 2009; Machmudi, 2008; Permata, 2008; Munandar, 2011, 277):

- 1) menguatkan peran publik para aktivis dakwah di tengah masyarakat;
- 2) mengintensifkan kegiatan dakwah ‘aammah (umum) di tengah masyarakat;
- 3) membuat organisasi sosial kemasyarakatan yang legal dan formal.

Sebagai implementasinya, para aktivis Tarbiyah didorong untuk menjalin interaksi seluas-luasnya, mulai dari berpartisipasi dalam rapat RT, arisan di lingkungan, dan lain-lain, hingga mendirikan berbagai *muassasah* (yayasan) untuk mewadahi berbagai kiprah kemasyarakatan para aktivis Tarbiyah. Tercatat menjamurnya berbagai lembaga sosial-kemasyarakatan milik para kader di akhir ’80-an dan di

²⁸ Dalam fase ini, banyak kisah-kisah heroisme keluarga generasi awal Tarbiyah. Contohnya adalah Yoyoh Yusroh, seorang aktivis muslimah Tarbiyah ketika pada masa itu telah membina sekitar 13 forum *halaqah* Tarbiyah, merelakan mahar emas miliknya yang sebesar 50 gram direlakan untuk membantu orang lain. Beliau pun memiliki 13 anak yang di antaranya sudah hafiz Al-Qur’an, terlibat dalam berbagai macam aktivitas sosial dan pengembangan lembaga sosial kemasyarakatan, aktivis yang menyerukan pembebasan Palestina di dunia internasional, membiasakan diri untuk tilawah Al-Qur’an sebanyak 3–5 juz dan salat malam setiap hari di tengah kesibukannya yang menumpuk, baik sebagai anggota legislatif DPR RI maupun amanahnya di DPP PKS itu sendiri (Tim Gema Insani Press, 2011).

era '90-an, seperti Yayasan Ibu Harapan, Yayasan Ibu Bahagia, Taman Quran Rabbi Radhiyya (Taman Kanak-Kanak Al Quran pertama), Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah Khoiru Ummah²⁹, Nurul Fikri (bimbingan belajar, kemudian mengembangkan pula kursus-kursus dan bimbingan belajar, klinik kesehatan, beasiswa kepemimpinan untuk mahasiswa, dan lain-lain), lembaga penerbitan seperti Era Intermedia, Al-Itishom, Majalah Ummi, Majalah An-Nida, dan masih banyak lagi.

Dalam konteks pendidikan formal, salah satu terobosan yang dilakukan oleh para aktivis Tarbiyah adalah didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dengan waktu sekolah yang lebih panjang, *full day school*. Setelah jenjang SD, konsep sekolah Islam terpadu juga diterapkan di jenjang-jenjang yang lebih tinggi sehingga lahirlah SMP Islam Terpadu (SMPIT) dan SMA Islam Terpadu (SMAIT). Selanjutnya, sekolah-sekolah Islam terpadu tersebut tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), yang memiliki ratusan anggota di seluruh wilayah Indonesia (Damanik, 2002; Munandar, 2011, 278–279). Hingga tahun 2013, jumlah sekolah yang menjadi anggota JSIT Indonesia mencapai 1.926 unit sekolah, terdiri atas 879 unit TK, 723 unit SD, 256 unit SMP, dan 68 unit SMA. Selain itu, masih terdapat sekitar 10.000 Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang belum tergabung ke dalam JSIT. Berdasarkan data JSIT tahun 2014, jumlah siswa yang terdaftar di SIT telah mencapai dua juta siswa (Hisyam dkk., 2012, 69; Suyatno, 2013, 357; Ruslan, 2014). Tentunya, beragam upaya ini dilakukan dalam rangka untuk melebarkan dakwah Islam gerakan Tarbiyah yang kian bergerak “dari kampus ke kampung”.

Ketika memasuki era Reformasi di tahun 1998, elite dan aktivis Tarbiyah juga memanfaatkan *political opportunity structure* tersebut

²⁹ Lembaga ini didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa orang, di antaranya Yusuf Supendi, Mukhlis Abdi, Abdullah Muadz, dan Rosihan Anwar. Di antara para pendiri tersebut berasal dari alumni Timur Tengah, LIPIA, ataupun IAIN yang bergerak menghimpunkan para aktivis dakwah untuk diterjunkan sebagai penggerak dakwah di berbagai macam daerah dan kelompok masyarakat seantero Nusantara seperti Jawa, Kalimantan Timur, Riau, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua (Damanik, 2002, 160–162; Permata, 2008).

untuk mempercepat memasuki *mihwar muassasi* (orbit pelembagaan politik) dengan cara membentuk Partai Keadilan (PK). Awalnya, berdasarkan musyawarah gerakan Tarbiyah pada tahun 1997, direncanakan fase tersebut dimulai tahun 2010, tetapi ternyata harus dideklarasikan 12 tahun lebih cepat (Munandar, 2011). Dua alasan utama dari percepatan memasuki *mihwar muassasi* adalah sebagai berikut. Pertama, era Reformasi telah memberikan angin besar bagi gerakan Tarbiyah untuk tampil dalam menegakkan *islahul hukumah* (perbaikan pemerintahan) yang merupakan bagian dari cita-cita dakwah Tarbiyah. Kedua, sebagai sebuah minoritas, gerakan Tarbiyah beranggapan bahwa pembentukan institusi partai lebih mendapatkan legitimasi negara dan publik yang lebih kuat dibandingkan organisasi masyarakat (ormas) yang sangat rentan dibubarkan oleh negara.

Guna menjembatani terbatasnya jumlah SDM partai baru tersebut lantaran minimnya jumlah aktivis Tarbiyah yang pada tahun itu hanya mencapai 33.000 kader, elite Tarbiyah memformulasikan sebuah doktrin "*al-Jama'ah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-Jama'ah*" ("*Jama'ah* adalah partai dan partai adalah *Jama'ah*"), yaitu setiap kader Tarbiyah harus juga menjadi kader partai. Sudah barang tentu, sejak awal dideklarasikannya doktrin tersebut telah mengakibatkan terjadinya ambivalensi identitas bagi sebagian kader Tarbiyah, khususnya kader-kader berikut (Munandar, 2011).

- 1) Mereka yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai swasta yang dituntut untuk independen dan tidak ikut serta ke dalam aktivitas politik praktis, terpaksa harus "diam-diam" dan "tersembunyi" mengikuti alur sistem kaderisasi partai dan terlibat dalam kegiatan kampanye partai.
- 2) Kader di tingkat siswa dan mahasiswa yang merupakan basis utama gerakan Tarbiyah, yang independensi mereka sebagai *agent of change* dan *social control* bagi masyarakat harus tergadaikan dengan keikutsertaannya dalam agenda politik praktis.
- 3) Para dai gerakan Tarbiyah yang sering kali harus menyesuaikan materi-materi dakwahnya dengan kepentingan untuk mendongkrak suara partai.

Ambivalensi identitas makin mengkristal ketika budaya militeristik sistem kaderisasi gerakan Tarbiyah yang menekankan adanya *sam'an wa tha'atan* (percaya dan taat) terhadap seluruh keputusan elite, justru telah dimanfaatkan oleh sebagian elite untuk menggunakan *will to truth* tersebut guna melakukan apa yang disebut oleh Foucault (1977) sebagai *the minute deviations, the false appraisals*, dan *the complete reversals-the errors*—tindakan-tindakan pragmatis elite dengan mengatasnamakan “demi kemaslahatan dakwah”, meskipun kelompok atau pun elite lain menilai absurd dan melenceng dari jati diri partai.

BAB 3

MEMPERJUANGKAN IDEOLOGI GERAKAN: ANTARA PURIFIKASI DAN POLITISASI

Untuk melihat lebih jauh dinamika sosio-historis PKS, penting bagi kita untuk memahami kerangka dasar ideologi gerakan Tarbiyah. Pemahaman terhadap kerangka dasar praksis tersebut tidak hanya sekadar melihat apa yang secara teks termaktub di dalam kurikulum-kurikulum kaderisasi gerakan tersebut, tetapi lebih jauh daripada itu ialah memadankannya dengan realitas praksis yang berkembang di masyarakat.

Untuk memadankan antara kerangka dasar ideologi dan praksis, dibutuhkan pengamatan lebih jauh terhadap akar muara subjek atau pun objek utama gerakan tersebut berkembang, yaitu ADK. Berdasarkan pendekatan inilah, pemahaman kita dalam menelaah dinamika sosio-historis PKS secara komprehensif mendapatkan koherensinya.

A. Arkeologi (Ideologi) Dakwah Gerakan Tarbiyah: Konseptualisasi Aksi

Perihal tersebut bisa dilihat dari cara mereka menciptakan strategi dakwah-nya. Dalam paham gerakan Tarbiyah, terdapat pola-pola atau tahapan-tahapan dakwah yang biasa disebut dengan “*marahilud dakwah*”, yaitu sebagai berikut (Ahmad, 2011, 142).

- 1) Proses *tabligh* (*marhalah* penyampaian) merupakan sarana dakwah yang dimaksudkan untuk meninggikan syiar Islam yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memberikan motivasi kepada para peserta agar semangat dalam mendalami dan mempelajari Islam. Model kegiatan dalam tahapan ini seperti Tablig Akbar, Isra dan Mikraj, Majelis Taklim, Nuzulul Qur'an, Tahun Baru Islam, maupun *stadium general mentoring*;
- 2) Proses *ta'lim* (*marhalah* pengajaran) merupakan sarana dakwah yang diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah lebih khusus, yaitu melalui forum *halaqah*.
- 3) Proses *takwin* atau dikenal juga sebagai suatu hal yang lebih spesifik dalam 'pembentukan' aktivis dakwah yang siap bergerak secara totalitas berdasarkan *fikrah* yang lurus, baik dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat *tasawwuf* maupun militeristik.
- 4) Proses *tandhim* atau dikenal dengan proses pelembagaan kegiatan dakwah secara terstruktur dan terorganisasi berorientasi pada lima hal berikut:
 - a) *mawatinus siyadah*, yaitu menjadi pemegang, pengendali, dan pemegang kedaulatan;
 - b) *mawatinul quwah*, yaitu memasuki posisi-posisi kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
 - c) *mawatinul 'izzah*, yaitu menduduki posisi-posisi prestise dan juga lembaga-lembaga yang bergengsi;
 - d) *mawatinul hisbah*, yaitu masuk ke dalam pusat-pusat pengontrol sosial ataupun pengendali;
 - e) *mawatinul amr wan nahiy*, yaitu posisi legal untuk *amar makruf nahi munkar*.
- 5) Proses *tanfidz*, yaitu para aktivis dakwah kader mulai diarahkan untuk melakukan kegiatan "aksi" dan "produksi" yang menuntut adanya totalitas dan ketaatan kerja dakwah".

Berdasarkan gambaran tersebut, harus diakui bahwa sejak awal konstruksi diskursus tahapan dakwah yang dibangun oleh gerakan

Tarbiyah sarat akan pengarusbalikan politik-kuasa-negara. Bahkan, di dalam institusi gerakan Tarbiyah terdapat sebuah adagium yang harus ditekankan oleh setiap kadernya, yaitu *wa'yul amni wa siyasi* (kesadaran akan keamanan dan politik). Maksud dari adagium tersebut adalah bahwa prinsip dan karakter dakwah Tarbiyah pada dasarnya bersifat terbuka, dan tak ada alasan untuk merahasiakannya, kecuali terdapat suatu hal yang bersifat darurat. Namun dalam perjalanannya, justru pendekatan 'kesadaran akan keamanan dan politik' tersebut sering kali ditafsirkan oleh aktor untuk menciptakan skema struktur dakwah dan politik yang bersifat *secret*, dan berpaku pada adagium "*sirriyah al-tanzim wa alamiyyah al-dakwah*" (struktur yang bersifat rahasia dan dakwah yang bersifat terbuka) sebagai salah satu strategi konvensional politik-dakwah PKS. Di kemudian hari, secara intrinsik adagium tersebut menjadi problematik ketika di tahun 2004 Hilmi Aminuddin membentuk unit intelijen PKS yang dikomandoi oleh Suripto, yang ternyata di tahun 2018 unit intelijen tersebut dianggap sebagai dalang yang melakukan "bersih-bersih" loyalis AM (tirto.id, 2018).

B. Bermula dari Universitas: Kontestasi Gerakan Tarbiyah dan Dimanika Islamisasi Kampus di Indonesia

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, ADK merupakan basis utama kader PKS. Oleh karena itu, PKS sangatlah *concern* dalam mengawal agenda islamisasi kampus sebagai sebuah strategi untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi gerakan tersebut. Sebagaimana gerakan Islam lainnya, penyemaian ideologi PKS ke dalam institusi kampus tidak melalui organisasi formal partai politik, tetapi memanfaatkan organisasi maupun unit kegiatan mahasiswa, yaitu Lembaga Dakwah Kampus, Asistensi Agama Islam, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Kelompok Studi, Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, dan sebagainya.

Lebih lanjut, dalam sistematika dakwah Tarbiyah di internal kampus, setidaknya terdapat tiga ranah dakwah utama yang dijalankan oleh ADK, yaitu

- 1) *dakwah siyasah* (dakwah melalui jalur politik” seperti pemenangan Pemilirah Raya Mahasiswa [Pemira] atau menduduki posisi kepemimpinan BEM fakultas hingga BEM universitas),
- 2) *dakwah da’awiy* (dakwah melalui Lembaga Dakwah Kampus seperti menggemakan syiar Islam melalui kegiatan-kegiatan yang digerakkan oleh LDK ataupun pengelolaan Asistensi Agama Islam [AAI]), dan
- 3) *dakwah ilmy* (dakwah melalui forum studi dalam melahirkan kader-kader dakwah yang berkompeten dalam mengembangkan tradisi ilmiah).

Di sisi lain, ada *dakwah sya’by*, yaitu dakwah pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, sebagian ADK ikut turut serta mengembangkan dakwah di luar kampus dengan cara menjadi aktivis pemberdayaan sosial di tengah masyarakat seperti menjadi guru TPA, pendamping pemberdayaan perekonomian masyarakat, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), ataupun relawan sosial dan bencana alam.

Adapun secara kelembagaan, aktor-aktor gerakan Tabiyah yang bertanggung jawab dalam menjalankan roda *dakwah siyasiyah* biasanya berkecimpung di dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan BEM. Dakwah da’awiy dijalankan oleh mereka yang menjadi pengurus LDK tingkat fakultas dan universitas ataupun pengurus dan mentor AAI, *dakwah Ilmy* dijalankan oleh mereka yang menjadi pengurus kelompok studi ilmiah di tingkat fakultas dan universitas, sedangkan *dakwah sya’by* biasanya dijalankan oleh mahasiswa lokal yang berasal dari daerah dekat universitas maupun sebagian dari mereka yang tersebar baik menjadi anggota KAMMI, LDK, maupun Kelompok Studi.

1. Lembaga Dakwah Kampus: Antara Islamisasi dan Pertarungan Ideologi

Sebagaimana telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya, secara historis penyemaian ideologi gerakan Tarbiyah makin masif dan terkoordinasi lintas kampus. Awalnya, ide untuk membentuk koordi-

nasi antaraktivis dakwah kampus diinisiasi oleh Jamaah Sholahuddin (JS) UGM melalui penyelenggaraan Sarasehan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) tahun 1986 yang diikuti oleh 26 peserta utusan 13 LDK se-Jawa, yaitu JS UGM, Jamaah Mujahidin IKIP Yogyakarta, LAI Undip Semarang, Unsoed Purwokerto, UNS Solo, Lpisat Usakti Jakarta, UI Jakarta, BKI Bogor, UIKA Bogor, Karisma Salman ITB Bandung, Unpad Bandung, UKKI Unair Surabaya, BDM Al-Hikmah IKIP Malang. Hasil dari Sarasehan tersebut adalah melanjutkan agenda Sarasehan kedua di tahun selanjutnya di ITB Bandung. Di sarasehan kedua inilah, ide untuk membentuk lembaga koordinator dakwah kampus terkristalisasi dengan terbentuknya Forum Silaturahmi Dakwah Kampus (FSLDK) (Yusanto, 1997).

Dalam perjalanannya, FSLDK bukan hanya berfungsi sebagai lembaga koordinasi antar-ADK, melainkan juga menjadi ruang kontestasi dan konflik baru antarberbagai gerakan Islam dalam mendominasi dan menghegemoni LDK di seluruh Indonesia (Machmudi, 2008). IY selaku ketua FSLDK angkatan pertama menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga gelombang gerakan Islam yang memperebutkan ruang publik LDK/FSLDK. Gelombang pertama ialah ketika aktivisme LDK pertama kali digerakkan oleh para aktivis gerakan ekstra-kampus, seperti HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan sebagainya. Gelombang kedua ialah aktivisme LDK setelah ditinggalkan oleh para aktivis gerakan ekstrakampus dan digerakkan oleh gerakan-gerakan lokal seperti Pengkajian Nilai Dasar Islam (PNDI), Pengkajian Risalah Tauhid, dan Forum Studi Islam. Gelombang ketiga ialah gelombang yang terjadi di era 1988-an, yang pada era tersebut LDK digerakkan oleh gerakan-gerakan Islam, yaitu gerakan Tarbiyah, HT, Salafi, dan sebagainya. Di gelombang ketiga inilah, LDK mengalami polarisasi yang sangat signifikan³⁰.

³⁰ “Barulah pada gelombang ketiga ini, setiap gerakan Islam mulai berebut pengaruh di LDK, berebut lahan, berebut kader, berebut kepengurusan, berebut pola pembinaan, dan saling mendominasi. Semenjak polarisasi itulah, kecenderungan yang terjadi di antara berbagai macam gerakan Islam dalam memperebutkan LDK bersifat menang kalah, kalau menang ya Tarbiyah, kalau kalah ya kemudian gerakan apa dan siapa. Selepas itu, dominasi Tarbiyah di Jamaah Sholahuddin sangat kuat. Ketika itu sudah mulai dikesankan yang namanya JS ya Tarbiyah. Barulah sekitar 10 tahun kemudian, polarisasi tersebut

Konflik antargerakan Islam di lembaga tersebut makin mengkristal pasca-Kongres FSLDK ke-VII tahun 1993 di Makassar yang menetapkan *Kitab Mafahim* karya pendiri HT, Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani (1909-1977) sebagai standardisasi buku pegangan aktivis LDK di seluruh universitas (Machmudi, 2008, 199). Namun, penggunaan *Kitab Mafahim* sebagai buku pedoman ADK tidaklah berlangsung lama lantaran dinilai sarat dengan kepentingan penyebaran ideologi HT itu sendiri. Harus diakui bahwa salah satu gerakan yang paling tidak menerima *Kitab Mafahim* sebagai rujukan adalah gerakan Tarbiyah, karena setahun sebelumnya gerakan tersebut sudah menyusun *Blue Print Dakwah Kampus* (BPKD) yang dimaksudkan sebagai pedoman umum pengelolaan ADK (Siddiq, 2003, 89).³¹

Memasuki tahun 1999, setelah terbentuknya PK, Pedoman Dakwah Kampus 1994 mengalami revisi lanjutan yang lebih menekankan akan pentingnya peran ADK dalam melakukan aktivitas pelayanan dan kemasyarakatan (*al-'amal al-khidami wa al-ijtima'iy*), aktivitas ilmiah dan keterampilan profesi (*amal al-'ilmi wa al-minhani*), aktivitas dakwah dan pembinaan (*amal ad-da'awi wa at-tarbawiy*), serta aktivitas politik (*amal siyasiy*). Pedoman Dakwah Kampus 1999 ini juga memasukkan prinsip-prinsip dakwah tambahan sebagai respons atas sejumlah persoalan dan kekurangan yang selama ini terdapat di kalangan aktivis dakwah kampus, seperti penekanan terhadap prinsip keseimbangan antara pendekatan struktural dan kultural, kemandirian daripada sikap paternalistis, dan mendorong sikap inovatif untuk mengatasi kejumudan, serta responsif baik terhadap perubahan politik lokal, nasional, maupun global (Siddiq, 2003, 91).

mulai mencair. Saya pun mulai dipanggil kembali oleh JS, saya bisa masuk dan mengisi acara-acara JS sekitar tahun 2000-an. Ini kepentingan politik pembinaan dakwah” (Wawancara Ismail Yusanto, 9 November 2014).

³¹ Mengacu kepada BPKD ini, gerakan Tarbiyah melakukan konsolidasi kelembagaan LDK, perluasan rekrutmen kader baru dan penyusunan langkah-langkah penyiapan untuk memasuki dakwah di kelambagaan formal kampus. Pada tahun 1994, BPKD ini direvisi menjadi Pedoman Dakwah Kampus (*Manhaj Ad-Da'wah Ath-Thulabiyah*) sebagai respons terhadap kebutuhan pengembangan dakwah kampus di tataran kelembagaan formal dan penataan dakwah di berbagai kampus yang makin beragam tingkat kematangannya (Siddiq, 2003).

Hanya membutuhkan waktu selama kurang lebih 15 tahun, masifnya gerakan Tarbiyah dalam melakukan infiltrasi, *hegemony* dan *counter-hegemony* terhadap LDK di berbagai universitas telah membuahkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data Kongres FSLDK Nasional XI di Universitas Indonesia pada bulan Juli tahun 2000, dari 219 LDK Se-Indonesia yang berasal dari universitas negeri dan swasta, tercatat sekitar 180-an LDK dipimpin oleh aktivis gerakan Tarbiyah. Kemudian pada FSLDK Nasional XII tahun 2002 di Universitas Andalas Padang, jumlah itu meningkat mencapai sekitar 240 LDK (Siddiq, 2003, 90).

Secara ekstrinsik, hegemoni gerakan Tarbiyah terhadap LDK telah berimplikasi pada tertutupnya ruang gerak berbagai gerakan Islam di institusi tersebut. Atas ketertutupan ruang gerak tersebutlah, pada tahun 2004 HT sebagai rival utama gerakan Tarbiyah mulai menginisiasi terbentuknya Badan Koordinasi LDK (BKLDK) sekaligus membentuk dualisme organisasi LDK di berbagai kampus, seperti Forum Remaja Masjid (FRM) UI, Harmoni Amal Titian Ilmu (HATI) ITB, LDK Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM) IPB, dan Dewan Kerohanian Masjid (DKM) Unpad. Di tengah LDK yang dikelola oleh gerakan Tarbiyah di universitas-universitas tersebut seperti SALAM UI, GAMAIS ITB, dan LDK Al-Hurriyyah IPB, LDK Forum Komunikasi Dakwah Islam Fakultas (FKDF) Unpad sudah jauh lebih mapan sejak dahulu. Adapun dalam konteks UGM, JS sendiri mencoba menampung berbagai gerakan Islam untuk terlibat aktif dalam menjalankan roda organisasi tersebut. Heterogenisasi gerakan Islam di tubuh JS sendiri terjadi setelah terbentuknya Tim Forum Peduli Jamaah Sholahuddin UGM tahun 2005 yang menyatakan kekecewaannya terhadap dominasi kelompok Tarbiyah di tubuh JS yang telah mengakibatkan JS makin eksklusif baik terhadap sesama mahasiswa maupun lingkungan sosial-masyarakat (Tim Forum Peduli Jamaah Sholahuddin, 2005). Meskipun begitu, harus diakui bahwa heterogenisasi yang saat ini sedang berlangsung di JS justru sering kali mengakibatkan pertentangan ideologis serta pergesekan kepentingan antarelite gerakan Islam.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Rivalitas antara gerakan Tarbiyah dan HT juga terjadi di dalam level gerakan mahasiswa ekstrakampus, yaitu pada tahun 1998 ketika gerakan Tarbiyah memanfaatkan FSLDK untuk membentuk KAMMI sedangkan pada tahun 2004 HT memanfaatkan BKLDK untuk membentuk Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan. Hingga tahun 2019, tercatat jumlah anggota dan alumni KAMMI mencapai 359.000 kader yang tersebar setidaknya di 12.15% dari total keseluruhan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia dan anggota FSLDK mencapai 25.215 kader yang tersebar di 15.34% dari total keseluruhan PT di Indonesia (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Jumlah Anggota KAMMI dan FSLDK Tahun 2019

	Jumlah Pengurus Daerah (KAMMI)/ Pusat Ko- munikasi Daerah (FSLDK)	Jumlah Komisariat tingkat Kampus (KAMMI)/ FSLDK tingkat Kampus	Jumlah Pengu- rus Luar Negeri	Presentase terhadap Jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia (3.293 Perguruan Tinggi)	Jumlah Anggota
KAMMI	120	400	9	12.15%	359.000 ³²
FSLDK	37	505	-	15.34%	25.215

2. Asistensi Agama Islam: Perjuangan Membumikan Ideologi

Di era Reformasi, aktivitas asistensi agama Islam di kalangan mahasiswa yang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an tersebut kembali mendapatkan legitimasinya setelah pemerintah menetapkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan SK Dirjen Dikti Depdiknas No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi yang mengharuskan adanya mata kuliah Agama di setiap jenis dan jenjang pendidikan (Munip, 2008, 15–16). Untuk mengimplementasikan UU tersebut, pihak Universitas

³² Jumlah tersebut sudah termasuk kader dan alumni KAMMI.

yang tengah kekurangan tenaga pengajar Agama dan kapasitas alokasi jam kuliah Agama Islam klasikal harus menyasiasi kondisi tersebut dengan cara membuat program kokulikuler Asistensi Agama Islam (AAI) berupa mentoring keagamaan di luar jam kuliah. Pada saat diberlakukannya AAI, LDK menjadi mitra strategis kampus dalam mengelola, membuat kurikulum, hingga menyediakan SDM mentor kegiatan asistensi tersebut. Pada kondisi inilah, LDK yang mayoritas didominasi oleh gerakan Tarbiyah mendapatkan angin segar untuk menyemaikan ideologi Tarbiyah di kampus secara *legitimate*.

Baik di ITB, UGM, maupun UI, pada dasarnya kegiatan AAI menjadi bahan perbincangan yang tak kunjung usai sejak tahun 1980-an hingga saat ini. Dalam konteks ITB, secara legal GAMAIS ITB ditugaskan oleh pihak Universitas untuk mengelola kegiatan Mentoring Agama dan Etika Islam sejak tahun 1990-an dengan bobot nilai 20% dari keseluruhan nilai Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) sebesar 2 SKS. Pada tahun 2000, menurut reportase Suara Hidayatullah, lembaga yang dikenal dengan istilah Asistensi Etika Islam (AEI, yang dikemudian hari berubah nama menjadi Asistensi Agama dan Etika Islam-AAEI) itu mengoordinasikan proses mentoring untuk 1.500 mahasiswa muslim setiap tahunnya, dengan jumlah mentor sekitar 200 orang. Berdasarkan gambaran itu, dapat dipastikan bahwa seluruh mahasiswa Muslim di ITB di tahun 1990-an ke atas pernah tersentuh dengan asistensi agama dan etika Islam GAMAIS (Siddiq, 2003, 73).

Dalam konteks UGM, Cholil Mahmud semasa ia menjadi Ketua JS 1988–1989 mencetuskan untuk diadakannya kegiatan AAI di kampus tersebut. Di penghujung tahun 80-an, gagasan tersebut mendapatkan legitimasinya dari Universitas. Meskipun begitu, dalam perjalanannya, kegiatan AAI UGM mengalami pasang surut yang diakibatkan oleh legitimasi dan delegitimasi Universitas. Pada sekitar tahun 1996-an, saat Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A. menjabat sebagai Rektor UGM, Pusat Komunikasi (PUSKOM) AAI tingkat universitas dinonaktifkan, dan kebutuhan untuk diadakannya kegiatan AAI secara otonom ditentukan oleh kebijakan fakultasnya masing-masing. Barulah pada tahun 2012 kegiatan A2I di UI sudah mulai tidak diberlakukan. Sementara itu, di UGM sendiri melalui SK Rektor No. 214/P/SK/HT/2014 kegiatan

AAI kembali resmi dibekukan. Adapun faktor dominan pembekuan Asistensi Agama Islam di dua kampus tersebut disinyalir sebagai salah satu langkah untuk membatasi “penyalahgunaan” mentoring agama yang digunakan sebagai alat kaderisasi gerakan dan politik PKS (Arrobi, 2020). Meskipun AAI dibekukan, bukan berarti hal tersebut telah sepenuhnya membekukan aktivitas kegiatan mentoring Islam di lingkungan kampus. Hal yang terjadi ialah, kegiatan mentoring Islam dikelola oleh LDK baik di tingkat universitas maupun fakultas, baik secara formal maupun informal. Di UI misalnya, kegiatan A2I diadakan kembali oleh SALAM UI melalui program #YukMentoring, program yang tidak lagi terasosiasikan dengan kurikulum atau pun mata kuliah agama di level kampus. Di sisi lain, dengan dibekukannya AAI, hal tersebut juga menjadi ruang terbuka bagi kelompok Islam lainnya seperti Nahdhatul Ulama’ (NU), Salafi, maupun kelompok pemikiran Islam yang dikelola oleh jaringan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) untuk menawarkan “platform”, model, dan perspektif baru terhadap kegiatan “pengajian Islam” di Universitas.

3. Pemenangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM): Antara Kemenangan Dakwah dan Dominasi Kuasa

Sejak dideklarasikannya PK(S) sebagai kendaraan politik gerakan Tarbiyah pada tahun 1998, ia telah memberikan implikasi terhadap transformasi paradigma ADK yang lebih ambisius dalam aktivisme politik mulai dari level kampus hingga level nasional. Dalam kaitannya dengan level kampus, gerakan Tarbiyah pasca 1998 makin berorientasi untuk menguasai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang merupakan representasi lembaga politik dan pemerintahan mahasiswa. Hingga saat ini, tercatat selama dua dekade terakhir gerakan Tarbiyah telah berhasil menjadikan anggotanya sebagai Ketua/Presiden BEM di hampir 300 kampus (KAMMI, 2021). Rangkaian prestasi politik aktivis-aktivis gerakan Tarbiyah ini terangkum dalam Tabel 3.2, Tabel 3.3, dan Tabel 3.4.

Dalam konteks tiga universitas yang menjadi lokus pembahasan buku ini, di UI sendiri sejatinya gerakan Tarbiyah sudah menguasai Senat Mahasiswa—yang di kemudian hari berubah nama menjadi BEM—tingkat universitas melalui pemenangan Pemira, jauh lebih dahulu sebelum dideklarasikannya PK(S), yaitu sejak tahun 1994 hingga sekarang. Sementara itu di UGM dan ITB, dua kampus tersebut baru menguasai BEM sejak tahun 1998 hingga sekarang.

Tabel 3.2 Daftar Presiden Mahasiswa UI yang Dimenangkan Gerakan Tarbiyah tahun 1994–2014

Nama Presiden Mahasiswa	Tahun	Profesi saat ini	Status Keanggotaan Gerakan Tarbiyah hingga saat ini
Senat Mahasiswa UI			
Zulkfliemansyah	1994–1995	Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat	Aktif/Partisipan
Kamarudin	1995–1996	Dosen FISIP UI	Aktif/Partisipan
Selamat Nurdin	1996–1997	Sekretaris DPW Partai Gelora	Tidak Aktif
Rama Pratama	1997–1998	Bakal Calon Wali Kota Depok tahun 2020	Tidak Aktif
BEM UI			
Bahtiar Firdaus	1999–2000	Staf Ahli Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri	Aktif/Partisipan
Taufik Riyadi	2000–2001	Wakil Sekjen Partai Gerindra	Tidak Aktif
Wisnu Sunandar	2001–2002	<i>Vice President</i> Bank Syariah Mandiri.	Tidak Aktif
Rico Marbun	2002–2003	Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gelora	Tidak Aktif
Achmad Nur Hidayat	2003–2004	Analisis di Badan Supervisi Bank Indonesia	Tidak Aktif
Gari Primananda	2004–2005	Calon Anggota DPR RI PKS 2019–2024	Aktif/Partisipan

Nama Presiden Mahasiswa	Tahun	Profesi saat ini	Status Keanggotaan Gerakan Tarbiyah hingga saat ini
Azman Muammar	2005–2006	Dosen Universitas Mercubuana	Tak Teridentifikasi
Ahmad Fathul Bari	2006–2007	Wakil Sekjen DPP PKS	Aktif/Partisipan
Muhammad Tri Andika	2007	Dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie	Tak Teridentifikasi
Edwin Nofsan Naufal	2008	Direktur Bimbingan Belajar EXIST. Penulis buku #CintaPedia, menjadi Motivator Muda.	Tak Teridentifikasi
Tri Setiatmoko	2009	Trainer ESQ. Konsultan ESQ-ACT, ESQ Umroh and Tours.	Tak Teridentifikasi
Maman Abdurrahman	2011	Professional Trainer PT. Toyota Astra Motor	Tak Teridentifikasi
Faldo Maldini	2012	Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatra Barat	Tidak Aktif
Ali Abdillah	2013	Dosen FH UI	Tidak Aktif
Mohammad Ivan Riansa	2014	Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Millenial Jokowi-Ma'ruf tahun 2019	Tidak Aktif

Tabel 3.3 Daftar Presiden Mahasiswa UGM yang Dimenangkan oleh Gerakan Tarbiyah tahun 1997–2014

Nama Presiden Mahasiswa	Tahun	Profesi saat ini	Status Keanggotaan Gerakan Tarbiyah hingga saat ini
BEM UGM			
Haryo Setyoko	1997–1998	Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS	Aktif/Partisipan
Subiyantoro	1998–1999	Tak Teridentifikasi	Tak Teridentifikasi

Nama Presiden Mahasiswa	Tahun	Profesi saat ini	Status Keanggotaan Gerakan Tarbiyah hingga saat ini
KM UGM			
Huda Tri Yudiana	1999–2000	Anggota DPRD Sleman Fraksi PKS Periode 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024	Aktif/Partisipan
Nurhidayanto	2000–2001	Mantan Tim Media DPW PKS DIY. CEO Hepicar	Tak Teridentifikasi
Rahman Toha Budiarto	2001–2002	Pengurus Keluarga Alumni KAMMI dan GARBI	Tidak Aktif
BEM KM UGM			
Muhammad Arif Fibrianto	2002–2003	Tak Teridentifikasi	Tak Teridentifikasi
Yudhi Eka Prasetya	2003–2004	Ketua Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha, Halmahera Selatan, Maluku Utara.	Tak Teridentifikasi
Romi Ardiansyah	2004–2005	<i>Vice President Human Initiative</i>	Aktif/Partisipan
Hanta Yudha AR	2005–2006	Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute	Tidak Aktif
Agung Nugraha	2006–2007	Tak Teridentifikasi	Tak Teridentifikasi
Agung Budiono	2007	Associate Research Pol-Tracking Institute	Tidak aktif
Budiyanto	2008	Direktur Beastudi Dompot Dhuafa.	Aktif/Partisipan
Qadaruddin Fajri Adi	2009	Direktur Pandawa Institute	Tidak Aktif
Aza El-Munadiyan	2010	Direktur Beastudi Bakti Nusa Dompot Dhuafa	Aktif/Partisipan

Nama Presiden Mahasiswa	Tahun	Profesi saat ini	Status Keanggotaan Gerakan Tarbiyah hingga saat ini
Lutfi Hamzah Husin	2011	Dosen FISIP Universitas Padjajaran	Aktif/Partisipan
Yanuar Rizki Pahlevi	2013	Internal Auditor PT. Gunanusa Utama Fabricators.	Aktif/Partisipan

Tabel 3.4 Daftar Presiden KM ITB Dimenangkan oleh Gerakan Tarbiyah tahun 1998–2013

Nama Presiden Mahasiswa	Tahun	Profesi saat ini	Status Keanggotaan Gerakan Tarbiyah hingga saat ini
KM ITB			
Vijaya Fitriyasa	1998–1999	Presiden Komisaris PT Minerba Trada Utama	Tidak Aktif
Sigit Adi Prasetyo	1999–2001	Direktur Operasi PT KGC Group Indonesia	Tak Teridentifikasi
Akbar Hanif Dawam Abdullah	2001–2002	Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Tak Teridentifikasi
Ahmad Mustofa	2003–2004	Tak Teridentifikasi	Tak Teridentifikasi
Anas Hanafiah	2004–2005	<i>Senior Drilling Operation Engineer</i> PT Pertamina EP	Tak Teridentifikasi
M. Syaiful Anam (2005–2006)	2005–2006	<i>Head of Product Development</i> Youtap Indonesia	Tak Teridentifikasi
Dwi Arianto Nugroho	2006–2007	Tak Teridentifikasi	Tak Teridentifikasi
Zulkaida Akbar	2007–2008	<i>Postdoctoral Research Associate</i> di University of Virginia	Tidak Aktif
Ridwansyah Yusuf Achmad	2009–2010	Tim Ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat	Tidak Aktif

Nama Presiden Mahasiswa	Tahun	Profesi saat ini	Status Keanggotaan Gerakan Tarbiyah hingga saat ini
Herry Dharmawan	2010–2011	Anggota TGUPP Bidang Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta	Tak Teridentifikasi
Tizar Bijaksana	2011–2012	Dosen ITB	Tak Teridentifikasi
Anjar Dimara Sakti	2012–2013	Dosen ITB	Tak Teridentifikasi

Dalam perkembangannya, aktivisme politik gerakan Tarbiyah dianggap cenderung kontraproduktif oleh sebagian kadernya, salah satunya adalah Aza El-Munadiyah seorang mantan Presiden BEM Keluarga Mahasiswa UGM (BEM KM UGM) tahun 2010, yang mengungkapkan;

“Masalah politik (di kampus) akhirnya mengalahkan masalah tarbiah, ukhuah, dan kepaahaman. Lihat saja hari ini. Hari ini, kegiatan politik itu menjadi suatu hal yang sangat dominan. Padahal, dalam Tarbiyah, politik itu bukan segalanya. Harusnya yang paling dominan ya kaderisasi. Saya anekdot ... dana 2 miliar untuk politik itu kecil, *tapi* 2 miliar untuk kaderisasi itu besar ... *Tapi* dana 2 miliar untuk politik itu lebih mudah didapat daripada dana didapat untuk kaderisasi ... Nah, ini kan lucu ya ... Padahal, melalui proses kaderisasi yang baik itulah karakter dan kualitas para kader menjadi kuat. Implikasinya adalah saat ini kader tidak lagi memiliki kualitas dan karakter yang memadai.”³³ (Wawancara dengan Aza El-Munadiyan, 27 Desember 2014).

³³ Pada tahun 2012, sebagaimana diungkapkan oleh Anis Matta ketika ia masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKS bahwa PKS mendapatkan dana *charity* lebih dari 300 miliar per tahun (Republika, 2012). Pada bulan April 2013, Marwan Gunawan, Staff Bendahara Umum PKS mengungkapkan bahwa biaya operasional PKS dalam setahun sekitar Rp23 miliar. Biaya tersebut meliputi gaji pegawai, konsumsi rapat, dan kunjungan rutin ke daerah. Total donatur, baik dari sumbangan maupun iuran anggota legislatif sekitar Rp25 miliar setahun, dan bantuan pemerintah setahun Rp886.134.168. Syahfan Badri, selaku Anggota

Di tahun 2013, lantaran minimnya ADK yang berkualitas, meskipun gerakan Tarbiyah berhasil memenangkan kurang lebih 13 Pemira Ketua BEM Fakultas, 11 Ketua BEM yang diusungnya bukanlah berasal dari kader inti ADK. Pada tahun 2015, Presiden BEM KM yang diusung oleh ADK sendiri ialah orang yang baru satu atau dua tahun bergabung di gerakan Tarbiyah.

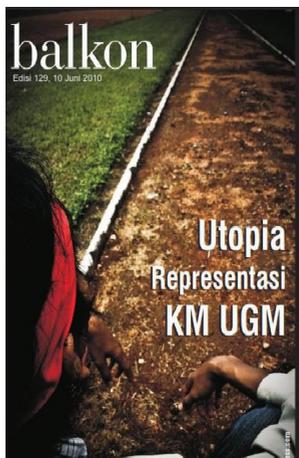
Apa yang dikeluhkan oleh Aza El-Munadiyan di UGM juga dikeluhkan oleh Fahmi Atriadi di ITB. Fahmi Atriadi yang merupakan anggota Majelis Syura GAMAIS ITB tahun 2013 mengungkapkan bahwa di era kepemimpinannya, ADK (khususnya di ITB) lebih memprioritaskan kemenangan politik kampus di tengah kualitas mereka yang mulai menurun. Implikasinya adalah, seorang ADK yang ditempatkan pada posisi kelembagaan kampus sering kali hanya memiliki kualitas keagamaan dan kepemimpinan yang biasa-biasa saja (wawancara dengan Fahmi Atriadi, 25 Februari 2015). Dalam konteks UI, Yon Machmudi (2014) selaku dosen senior FIB UI sekaligus mantan pendiri PKS mengungkapkan,

“Dulu, ketika aktivis-aktivis gerakan Tarbiyah pertama kali mengkritisi senior mereka terlalu berorientasi kepada kekuasaan dan politik, lalu mereka mencari dakwah Islam yang lebih mencerahkan, lebih damai, dan lebih bermanfaat bagi mereka. Tapi ... sepertinya peristiwa itu terulang kembali pada saat sekarang ketika sebuah gerakan keagamaan masuk ke dalam ranah politik. Dulu mereka bilang HMI itu jarang salat karena sibuk dengan politik, namun sekarang di kalangan Tarbiyah—meskipun tidak sampai meninggalkan sholat—namun sudah mulai para kader kampus lebih sibuk dengan politik”. (Wawancara dengan Yon Machmudi, 4 November 2014).

Majelis Syura PKS menambahkan, untuk Pemilu Legislatif 2014, diperkirakan biaya yang dikeluarkan partai berkisar Rp100 miliar hingga Rp150 miliar. Untuk satu daerah pemilihan (dapil), diperkirakan dibutuhkan dana Rp2 miliar (WIN /AB, 2013).



(a)



(b)

Keterangan: Beberapa majalah menulis politik golongan ataupun Tarbiyah, (a) *Suara Mahasiswa* Edisi 25 (XVI) tahun 2009, (b) *Majalah Balkon* Edisi 129 tahun 2010

Sumber: (a) Tim *Suara Mahasiswa* UI (2009), (b) Tim BPPM Balairung UGM (2010)

Gambar 3.1 Majalah Mahasiswa tentang Kiprah Politik Gerakan Tarbiyah

Pada tahun 2013, tepat beberapa pekan sebelum Luthfi Hasan Ishaq (LHI) selaku Presiden PKS ditangkap oleh KPK lantaran terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam proyek impor daging sapi, puluhan Ketua/Presiden BEM yang berafiliasi dengan gerakan Tarbiyah diundang mengikuti perkemahan mahasiswa yang diselenggarakan oleh DPP PKS. Di UGM sendiri, keikutsertaan Yanuar Rizki Pahlevi selaku Presiden BEM KM UGM yang ketika itu juga sedang menjabat sebagai Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) mendapatkan kecaman dari sebagian besar ketua BEM Fakultas yang dimenangkan oleh gerakan Tarbiyah. Terlebih, ketika usai LHI ditangkap oleh KPK, beberapa aksi yang diselenggarakan oleh BEM KM UGM dan BEM SI cenderung politis,

Buku ini tidak diperjualbelikan

khususnya ketika BEM SI melaksanakan aksi peringatan Reformasi di depan gedung KPK sembari membawa keranda sebagai sebuah pertanda atas kegagalan KPK dalam membongkar kasus megakorupsi Bank Century (Gambar 3.2 dan Gambar 3.3), di tengah ramainya pemberitaan media nasional tentang skandal korupsi yang melibatkan LHI dan beberapa oknum elite PKS lainnya.



Keterangan: BEM-SI menggelar unjuk rasa di depan kantor KPK pada peringatan Hari Reformasi pada 21 Mei 2013. Mereka membuat simbolisasi, "Telah Meninggal Abraham Samad" lantaran belum mampu menuntaskan BLBI dan Century.

Sumber: Hamzah (2013)

Gambar 3.2 Aksi Kontroversial BEM SI



Keterangan: BEM-SI menggelar unjuk rasa di depan kantor KPK pada peringatan Hari Reformasi pada 21 Mei 2013. Mereka membuat spanduk tentang “Abraham Samad tuntaskan Century”.

Sumber: Rastika (2013)

Gambar 3.3 Aksi Demo BEM SI di KPK

Di UGM sendiri, aksi BEM SI tersebut menuai kecaman dari Aliansi Mahasiswa Independen UGM yang terdiri dari beberapa perwakilan BEM Fakultas dengan membuat sebuah *press release* yang berjudul “Aksi 21 Mei BEM SI”:

“Dalam hal ini, kami mewakili mahasiswa UGM yang masih menjunjung tinggi idealisme dan independensi perjuangan melihat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BEM-SI bersama BEM KM UGM sebagai Koordinator Pusat dalam perspektif yang berbeda. **Pertama**, perlu dipahami bahwa BEM-SI bersama BEM KM UGM perlu secara serius mengkaji situasi politik terkini, di mana kasus korupsi sekarang sangat terkait dengan persaingan politik yang hangat terjadi di Senayan. Ketika BEM-SI bersama BEM KM UGM memutuskan untuk mengangkat isu skandal Century dalam masa-masa ini, dikhawatirkan bahwa publik akan menstigmatisasi mahasiswa berpihak pada satu golongan yang akan diuntungkan ketika mahasiswa mencoba untuk

memprioritaskan penyelesaian isu skandal Century. BEM KM UGM beserta BEM-SI perlu melakukan manajemen isu yang lebih baik lagi serta lebih waspada dalam mengamati kondisi politik terkini. **Kedua**, perjuangan mengawal agenda isu anti-korupsi seharusnya dilakukan bersama elemen-elemen sipil pro-demokrasi lainnya dengan tetap mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan seluruh kasus korupsi di Indonesia, bukan malah melakukan upaya-upaya demoralisasi KPK dalam bentuk apa pun. **Ketiga**, dalam upaya pengambilan keputusan strategis kampus sebelum melangkah lebih jauh ke tataran aksi, hendaknya BEM KM UGM selaku Koordinator Pusat BEM-SI dan BEM tingkat universitas di UGM perlu melakukan deliberasi yang serius dengan lembaga mahasiswa se-UGM guna mendengarkan aspirasi dan masukan lebih lanjut. Aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh lembaga mahasiswa di fakultas se-UGM hendaknya dijadikan pertimbangan yang serius dalam mengambil keputusan. **Keempat**, menyerukan semua elemen mahasiswa untuk menegakkan independensi dan integritas moral gerakan mahasiswa agar tidak terjebak dalam permainan elit dan kepentingan politik pragmatis, gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral harus bebas dari kooptasi kepentingan manapun.

Oleh karena itu, kami menyatakan sikap bahwa **tidak mendukung** aksi dan isu yang dibawa oleh BEM KM UGM beserta BEM-SI dalam aksi 21 Mei 2013 di Jakarta serta menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh BEM KM UGM **tidak merepresentasikan** aspirasi yang berkembang dari mahasiswa UGM secara umum. Dengan ini, kami juga mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk menegakkan independensi dan idealisme perjuangan gerakan mahasiswa Indonesia sesuai jiwa reformasi.”³⁴

³⁴ Press Release “Aksi 21 Mei 2013 BEM SI”: Aliansi Mahasiswa Independen UGM tanggal 26 Mei 2013. Aliansi Mahasiswa Independen dibentuk oleh DEMA FISIPOL UGM, Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fakultas Kehutanan UGM, BEM F MIPA UGM, dan BEM Sekolah Vokasi UGM. Sementara itu, beberapa BEM Fakultas yang lainnya, meskipun dimenangkan dan dipimpin oleh kader gerakan Tarbiyah, mereka tidak mendukung dan menolak aksi tersebut, di antaranya BEM KM F Geografi UGM, BEM F Biologi UGM, BEM FTP UGM, DEMA F Pertanian UGM, BEM F Farmasi UGM. Penolakan secara pasif juga dilakukan oleh LEM F Psikologi UGM, LEM FIB UGM, BEM FEB

Pada tahun 2014, Yanuar Rizky Pahlevi selaku mantan Presiden BEM KM UGM menjadi Koordinator aksi Koalisi Mahasiswa Yogyakarta yang mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta. Pada tahun 2014 akhir, kegiatan persiapan kampanye pemenangan BEM KM UGM gerakan Tarbiyah sempat dilakukan di gedung DPW PKS DIY. Sudah barang tentu aksi deklarasi dan kegiatan persiapan kampanye pemenangan tersebut menjadi isu yang cukup kontroversial di kalangan aktivis mahasiswa lantaran dinilai telah mencoreng institusi kampus yang seharusnya steril dari kampanye politik sekaligus juga telah mencederai independensi mahasiswa.

Kontroversi independensi BEM dan ADK juga terjadi di ITB. Tepat pada tanggal 17 April 2014, KM ITB melakukan aksi penolakan kedatangan Jokowi—yang ketika itu juga berstatus sebagai Calon Presiden RI—yang ingin melakukan MoU kerja sama antara ITB dan Pemprov DKI sekaligus memberikan *General Lecture* pada saat GAMAIS ITB justru tengah mengundang Hatta Radjasa, Anis Matta, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Daud Rasyid, dan Din Syamsuddin dalam acara *Islamic Leadership Festival* yang direncanakan digelar 10–11 Mei 2014 (Tempo, 2014). Sudah barang tentu, kondisi ini menimbulkan banyak kritik. Maraknya pemberitaan media yang menyoroti dualisme keberpihakan tersebut telah menstimulus KM ITB untuk melakukan dialog agar GAMAIS ITB mengurungkan niatnya untuk mengundang pembicara yang berasal dari partai politik. Hasil dari dialog antara KM ITB dan GAMAIS ITB adalah pernyataan sikap GAMAIS ITB yang berjudul “Klarifikasi Acara Islamic Leadership Festival (ILF): Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) ITB” yang salah satu poin dalam rilis tersebut adalah bahwa GAMAIS ITB akan tetap melaksanakan seminar kepemimpinan dengan pembicara dari kalangan ulama dan cendekiawan tanpa ada pembicara dari partai politik. Dalam wawancaranya dengan penulis, Ahmad Yasin Rabbani selaku Ketua GAMAIS ITB pada saat itu mengungkapkan,

UGM. Dalam aksi tersebut, BEM KM UGM hanya didukung oleh sekitar 3 BEM Fakultas.

“Sebenarnya *gini* ya, sebenarnya memang waktu itu memang ada arahan untuk bagaimana GAMAIS juga berperan dalam membaca kepemimpinan nasional. Namun ketika itu, kita belum ada gambaran untuk melakukan apa-apa. Dan ketika itu, kita juga belum tahu nih sikap kita bagaimana, karena ketika itu momentumnya adalah kita mempersiapkan acara ILF sebelum Pemilu legislatif, dan kita pun belum tahu siapa calon-calon presiden yang akan bertarung, dan koalisinya siapa-siapa aja. Apalagi, suara partai apa pun ketika itu belum keluar. Akhirnya saya inisiatif saja, saya mau mengumpulkan seluruh partai Islam, saya undanglah seluruh partai Islam itu. Saya *undang-undangin*, ah ... Rupaya waktu itu, pas Jokowi ke sini (ITB), itu teman-teman yang ADK lainnya malah menolak Jokowi ... *Hehehe* ... Panaslah kondisi kampus, pas Jokowi ditolak itu. Eh ... Rupanya *keendus* dan langsung heboh kan ... Padahal waktu itu kita *ngundang* pembicara aja belum selesai. Memang kita ketika itu punya misi mau mengarahkan partai-partai Islam ini berkoalisi. Dan kejadian ini sebelum Pemilu Legislatif. Padahal ketika itu saya juga mengajak SALAM UI dan JS UGM ketika itu tentang bagaimana kalau misalnya kita mengumpulkan partai-partai Islam, dan bagi tugas satu sama lain. Misalnya UI mengunjungi kantor-kantor partai Islam dan melakukan hubungan dialogis terhadap mereka, sedangkan UGM menyelenggarakan diskusi dengan partai Islam. Dan pusat pertemuan di antara tokoh-tokoh partai Islam di sini (ITB) pusatnya.”³⁵

Meskipun dalam konteks yang berbeda, dugaan terkait tercederainya independensi mahasiswa juga disoroti oleh Ade Armando, Dosen Ilmu Komunikasi UI yang berkomentar tentang agenda politik Gumilar Rusliwa Somantri (Rektor UI Periode 2007–2012) dalam membungkam suara kritis seluruh BEM di UI yang didominasi oleh gerakan Tarbiyah dengan cara ditempatkannya Kamaruddin (dosen FISIP UI yang juga merupakan Ketua Senat Mahasiswa (SM) tahun 1995 dari gerakan Tarbiyah dan dituding oleh Ade Armando bahwa Kamaruddin merupakan Aktivistis Dakwah Kampus Permanen) sebagai

³⁵ Hasil wawancara dengan AYR tanggal 26 Februari 2015 di Area Masjid Salman ITB, Kota Bandung, Jawa Barat.

Direktur Kemahasiswaan UI. Dalam blog pribadinya, Ade Armando menulis,

“... Gumilar kemudian melakukan langkah-langkah yang menyenangkan hati kaum Tarbiyah dengan berbagai cara. Misalnya saja dengan mendirikan masjid megah dengan dana Saudi di Salemba. Keputusan memberikan gelar *honoris causa* kepada sang Raja Saudi, antara lain dengan alasan peran sang Raja dalam membela Palestina, juga sejalan dengan itu.

Atau dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi aktivitas keislaman. Misalnya saat ada larangan bagi organisasi-organisasi intra universitas dan fakultas untuk membuat acara di luar kampus, seperti malam pelantikan mahasiswa baru di luar kota, Kamarudin ternyata mengizinkan organisasi Islam untuk menyelenggarakan acara di luar kota.

Di masa penerimaan Mahasiswa Baru, Rektorat juga sudah dua tahun menyelenggarakan semacam kegiatan membangkitkan motivasi secara spiritual (SQ) oleh motivator sekaligus pendakwah.

Kerana manipulasi citra inilah, Rektor kemudian dapat menjinakkan BEM-BEM di luar BEM Fasilkom, BEM FE dan BEM FK. Para punakawan Gumilar dengan licik membangun kesan bahwa serangan terhadap Gumilar adalah persekongkolan jahat antara kaum liberal-sekuler dan Kristen. Kebetulan memang yang menjadi ikon saat Save UI dan Pelita UI mulai menggugat Gumilar adalah Emil Salim yang digambarkan sebagai bagian dari ‘mafia Berkeley’. Dengan demikian, mereka membangun kesan bahwa Gumilar sebenarnya hanya menjadi korban fitnah kalangan yang anti-Islam.

Sejauh ini manuver Gumilar dalam memberangus mahasiswa tampaknya sangat berhasil. Sejumlah aktivis mengakui bahwa saat ini ada instruksi dari Imam (entah siapa) dan majelis syura bahwa BEM-BEM jangan bergerak—Mendukung Save UI tidak,

Mendukung Rektor tidak perlu. Mungkin mereka juga tidak sepenuhnya percaya bahwa Gumilar bersih. *Tapi* mereka juga tidak ingin rezim yang menguntungkan mereka sampai goyah.”

Namun, pada tanggal 5 Maret 2012, Ade Armando melalui blog pribadinya mengungkapkan permohonan maaf atas tuduhannya kepada BEM-BEM UI—khususnya BEM yang berasal dari gerakan Tarbiyah—yang pada dasarnya, seluruh BEM di UI juga merasakan keresahan yang sama serta tidak sedang bersikap bungkam atau pun diam terhadap kasus korupsi yang sedang terjadi di UI. Dalam tulisan permohonan maafnya, Ade Armando mengungkapkan,

“... Berkaitan dengan permintaan terakhir, saya tentu saja bersedia minta maaf kalau saya memang salah. Dalam tulisan ini, saya menyatakan **MAAF SEBESAR-BESARNYA PADA BEM-BEM DI UI BILA TERNYATA SAYA SALAH MENGANGGAP BAHWA BEM-BEM DI UI TIDAK TERLIBAT AKTIF DALAM MEMERANGI KORUPSI DAN MISMANAJEMEN UI DI BAWAH REKTOR PROF. DR. GUMILAR SOMANTRI.**

... Saya harus percaya karena mereka dengan sangat jelas menyatakan, “Kami percaya bahwa Rektor korup!”

Terkait permasalahan kasus korupsi di UI ini, pada pekan pertama bulan Juni 2012, BEM UI bersama BEM-BEM Fakultas UI membuat sebuah propaganda untuk menyadarkan masyarakat dan mahasiswa UI melalui sebuah baliho ukuran 30 × 4 m yang bertuliskan “Besar? Ada masalah di UI yang jauh lebih besar dari sekedar baliho ini!”. Para aktivis BEM itu rela untuk menjaga baliho tersebut hingga larut malam agar tidak ada pihak keamanan yang mencopotnya. Baliho ini mendapatkan banyak apresiasi.



Sumber: Malidini dalam Sazli (2012)

Gambar 3.4 Spanduk Besar Propaganda BEM UI dalam Menanggapi Kisruh UI

4. **Kuliah Kerja Dakwah: Menuju Dakwah Kampus yang Kontributif (?)**

Di luar kampus, gerakan Tarbiyah menekankan pada ADK untuk berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan gerakan Tarbiyah seperti Gerakan KAMMI Mengajar (GKM), Yayasan Indonesia Madani (YIM), Ikatan Mahasiswa Masyarakat Madani (IM3)—yang berubah menjadi Gerakan Rumah Indah Sehat Mahasiswa (GERISMA), dan yang langsung dibina oleh DPD PKS setempat, seperti DPD PKS Sleman dan DPD PKS Surabaya—memberlakukan kegiatan Kuliah Kerja Dakwah (KKD) bagi para kadernya. Aktivitas KKD lebih ditekankan terkait cara bagaimana para ADK terjun dan mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk kegiatan dakwah dan sosial dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks ADK UGM, salah satu terobosan kegiatan dakwah di luar kampus yang masih berlangsung hingga saat ini adalah kegiatan belajar mengajar membaca Al-Qur'an bagi masyarakat yang diadakan oleh GKM. Hingga tahun 2015, GKM memiliki empat desa lokasi binaan, yaitu

- 1) Desa Plosoedjo, Cangkringan, Gunung Merapi;
- 2) Shelter Hunian Tetap (Huntap) Batur, Cangkringan;
- 3) Perkampungan anak jalanan (lokasi tidak tetap) di daerah Sagan, Kota Yogyakarta; dan
- 4) Perkampungan Kali Code, Kota Yogyakarta.

Para Relawan yang berjumlah sekitar 30 orang diterjunkan ke daerah tersebut sekitar 2–4 kali dalam seminggu. Pada tahun 2011, GKM juga menginisiasi pemberdayaan perekonomian masyarakat di salah satu desa di Merapi dengan mengajarkan pada masyarakat untuk mengolah lele menjadi abon lele, hingga akhirnya mendapatkan penghargaan dari Fatigon dan diundang untuk menjadi salah satu narasumber inspiratif di *Kick Andy*. Pada tahun 2013, KAMMI Komisariat UGM meluncurkan Gerakan KAMMI Mengabdikan yang fokus pada kegiatan pengabdian di Gunung Merbabu.

Selain GKM, ADK UGM juga mendirikan YIM. YIM sendiri bergerak pada bidang pengembangan ekonomi masyarakat di salah satu pedesaan yang ada di daerah Bantul. Kegiatan YIM sendiri lebih banyak pada pendampingan masyarakat dalam mengelola koperasi yang diperuntukkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan sudah berkembang sekitar tiga tahun terakhir. Adapun dalam konteks di sekitaran area UGM, ADK UGM mendirikan GERISMA atau IM3 yang menginisiasi pemakmuran masjid di sekitaran area UGM dengan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar Al-Qur'an, pengajian warga, serta ikut terlibat, baik dalam kegiatan kepemudaan, kerja bakti gotong royong, maupun kegiatan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat. Dalam kegiatan pembinaan pelajar, para ADK UGM yang berasal dari Yogyakarta biasanya lebih banyak berpartisipasi menjadi mentor tetap di beberapa sekolah yang

ada di Yogyakarta melalui keikutsertaannya dengan *sm@rt syuhada* Corps Dakwah Masjid Syuhada (CDMS) yang sudah berdiri sejak tahun 1999, SKETSA Mentoring Pelajar Yogyakarta, ataupun pembinaan Forum Antar Rohis Kota Yogyakarta (Farohis Jogja). Pada tahun 2011, Menteri Sosial Masyarakat BEM KM UGM—yang berasal dari kader Gerakan Tarbiyah—berhasil dalam menciptakan Gajah Mada Mengajar yang mampu menghimpun sekitar 500 relawan pendaftar yang diperuntukkan untuk melakukan kegiatan kerelawanan mengajar di berbagai macam daerah pedalaman DIY.

Dalam konteks ITB, para ADK ikut berpartisipasi dalam kegiatan Salman ITB. Secara kelembagaan, Salman ITB merupakan lembaga independen yang berdiri di atas seluruh golongan, dan memiliki berbagai macam wadah pemberdayaan sosial masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua. Wadah pemberdayaan sosial tersebut memberikan ruang bagi para ADK yang ingin berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan Pembinaan Anak Salman (PAS) yang murid dibinanya dari anak TK hingga SD. Selain itu, para ADK juga ikut terlibat dalam kegiatan Keluarga Remaja Islam Salman ITB (Karisma ITB) yang sudah berdiri sejak tahun 1981. Karisma ITB sendiri merupakan lembaga yang melaksanakan program mentoring dan program pembinaan remaja—baik bagi SMP maupun SMA—yang diselenggarakan di lingkungan Masjid Salman ITB.

Di UI sendiri, para ADK juga tidak sedikit yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Meskipun tidak tampak dalam sebuah bentuk organisasi formal, banyak di antara mereka yang selain menjadi ADK, juga menjadi takmir masjid di daerah sekitar UI. Peristiwa di atas adalah suatu hal yang lumrah terjadi di area sekitar kampus. Di Kota Depok juga terdapat Kesatuan Pelajar Muslim Depok (KPMDD)—sebuah organisasi pelajar Muslim SMA se-Kota Depok—yang juga melibatkan sebagian ADK UI yang berasal dari Kota Depok dan sekitarnya dalam kegiatan pembinaan dan pendampingan.

Sudah barang tentu, proses *maintenance* dan pembiayaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut lebih banyak dikeluarkan oleh setiap ADK yang tergabung di dalamnya.

5. Beasiswa dan Asrama Mahasiswa: Pembinaan Muslim *Kaffah*, Penyemaian Ideologi, dan Pembentukan Aktor

Salah satu peran penting gerakan Tarbiyah dalam melakukan pembentukan muslim *kaffah* dan pembentukan aktor ialah melalui pemberian skema beasiswa, baik non-asrama, asrama, maupun sistem asrama berbayar yang diperuntukkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sejatinya, asrama-asrama mahasiswa tersebut tidaklah berhubungan langsung dengan proses kaderisasi gerakan Tarbiyah ataupun terkoneksi dengan kelembagaan PKS, mengingat pembangunan asrama-asrama mahasiswa tersebut didanai oleh wakaf perorangan, yayasan pendidikan, lembaga sosial, ataupun lembaga dakwah seperti DDII dan Ikatan Dai Indonesia (IKADI).

Dalam konteks Yogyakarta, sekalipun asrama-asrama mahasiswa seperti Asma Amanina (putri), Daarush Sholihat (putri), Daarul Hiro' (putra), dan Takwinul Muballighin (putra) dipimpin oleh para *asatidz* dan *asatidzah* yang memiliki latar belakang gerakan Tarbiyah, kurikulum asrama-asrama mahasiswa tersebut lebih berorientasi pada pembelajaran *tazkiyatun nufus*, *tahfidzul Qur'an*, *fiqh*, dan *syariah* dibandingkan *harakah*. Lantaran kondisi inilah, meskipun keempat asrama tersebut berafiliasi dengan para *asatidz* dan *asatidzah* yang berlatar belakang gerakan Tarbiyah, mereka yang menjadi santri di asrama-asrama tersebut tidaklah sepenuhnya berlatar belakang ADK ataupun memiliki ikatan emosional yang kuat baik dengan gerakan Tarbiyah ataupun PKS.

Berbeda dengan Islamic Center Al-Muhtadin Yogyakarta, yang konon pembangunan Asrama Mahasiswa tersebut didanai oleh DDII, tetapi saat ini asrama tersebut telah dijadikan sebagai salah satu “episentrum” pusat kegiatan pembelajaran agama, sosialisasi ideologi, maupun konsolidasi dakwah dan politik ADK di luar kampus. Santri-santri di asrama yang berlokasi daerah Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta tersebut didominasi oleh mereka yang berlatar belakang ADK dan memiliki hubungan emosional terhadap gerakan Tarbiyah dan PKS yang sangat kental. Di sisi lain, berbeda dengan asrama-asrama mahasiswa sebelumnya yang

lebih berorientasi pada pembentukan pribadi muslim yang *kaffah*, Islamic Center Al-Muhtadin lebih berorientasi pada pembentukan kurikulum pembelajaran yang memadukan antara *tazkiyatun nufus* dan militansi *harakah* yang kuat.

Sejatinya, baik di Yogyakarta, Depok, maupun Bandung juga terdapat sebuah asrama mahasiswa yang dikelola langsung dengan Yayasan Pendidikan Nurul Fikri yang dimiliki oleh elite gerakan Tarbiyah, yaitu Asrama Program Pembinaan SDM Strategis (PPSDMS)-NF yang kini berganti nama Rumah Kepemimpinan (RK). RK yang saat ini memiliki asrama di sembilan wilayah telah menjadi *iron stock* kepemimpinan elite mahasiswa di berbagai organisasi, mulai dari BEM, dewan perwakilan mahasiswa (DPM), kelompok studi, LDK, hingga komunitas mahasiswa berprestasi. Berbeda dengan penerima beasiswa PPSDMS/RK Yogyakarta yang lebih membuka diri untuk menerima peserta didik dari berbagai latar belakang ideologi dan aktivisme yang sangat heterogen, ataupun penerima beasiswa PPSDMS/RK Bandung yang cenderung didominasi oleh mereka yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan akademis dan *entrepreneur*, penerima beasiswa asrama PPSDMS/RK Jakarta (UI) lebih didominasi oleh mereka yang memiliki *background* ideologi keagamaan yang cenderung homogen dan lebih berorientasi pada kegiatan aktivisme politik dan dakwah Tarbiyah, baik di level universitas maupun fakultas. Lebih lanjut, PPSDMS/RK Jakarta sering dijadikan sebagai tempat konsolidasi gerakan Tarbiyah menjelang Pemira (Budiman, 2012, 59–60 dalam Arrobi, 2020, 99–100).

Meskipun begitu, harus diakui bahwa baik di Yogyakarta, Depok, maupun Bandung, melalui *tagline*-nya “Pemimpin Muda untuk Bangsa”, beasiswa PPSDMS/RK telah berhasil dalam melahirkan tokoh-tokoh pemuda inspiratif dan populer di masa kini berkat karya dan aktivitasnya yang luar biasa, beberapa di antaranya adalah Goris Mustaqim (*founder* Asgar Muda Foundation, alumni PPSDMS Bandung), Achmad Zaky (CEO Bukalapak, alumni PPSDMS Bandung), Gibran Huzaifah (CEO E-Fishery, alumni PPSDMS Bandung), Andreas Senjaya (CEO iGrow, alumni PPSDMS

Jakarta), Faldo Maldini (politisi Partai Solidaritas Indonesia, alumni PPSDMS Jakarta), Reza S. Zaki (pendiri Rumah Imperium, politisi Nasional Demokrat, alumni PPSDMS Yogyakarta), dan Nur Agis Aulia (pelopor Agropreneur Muda, politisi PKS, alumni PPSDMS Yogyakarta). Hanya saja, harus disadari bahwa lahirnya tokoh-tokoh muda berprestasi itu bukan berarti bisa dinilai adanya kesepaduan antara kesuksesan yang mereka dapatkan hari ini dengan tingginya loyalitas yang mereka berikan kepada gerakan Tarbiyah. Justru sebaliknya, meskipun mereka menaruh loyalitas yang cukup besar kepada PPSDMS/RK yang telah berkontribusi dalam membangun karier mereka, sebagian besar di antara mereka justru enggan untuk bergabung ke dalam gerakan Tarbiyah, lebih memilih menjadi seorang profesional, dan cenderung melakukan kritik yang tajam dan keras terhadap gerakan Tarbiyah dan PKS itu sendiri.

Harus diakui bahwa salah satu faktor tingginya skeptisisme para penerima beasiswa PPSDMS/RK terhadap gerakan Tarbiyah dan PKS dipengaruhi oleh sistem pembelajaran di PPSDMS/RK yang lebih menekankan pada nilai-nilai kepemimpinan, budaya skeptis terhadap dinamika sosial politik kontemporer, serta kepekaan terhadap realita sosial. Berbeda dengan kurikulum *halaqah* ADK yang lebih menekankan pada nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan yang bersifat statis terhadap ideologi Tarbiyah dan instruksi elite, kurikulum PPSDMS justru lebih menekankan nilai-nilai yang menuntut seseorang untuk menjadi makin kompetitif, kritis, dinamis, dan selalu berpikir inovatif dalam menjawab segala tantangan masyarakat, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Karena tingginya skeptisisme itu juga, di UGM, para penerima beasiswa PPSDMS/RK berani membentuk partai mahasiswa sendiri, yaitu Future Leader Party, partai yang berseberangan dengan partai besutan ADK, yaitu Partai Bunderan dan berani memunculkan calon Presiden Mahasiswa sendiri yang berseberangan dengan pilihan majelis syura ADK.

Dalam konteks UI, gerakan Tarbiyah juga turut serta mendinamisasi berbagai kegiatan dan program Mahasiswa di Asrama Mahasiswa UI. Melalui pembentukan Lembaga Dakwah (LD) Sahabat

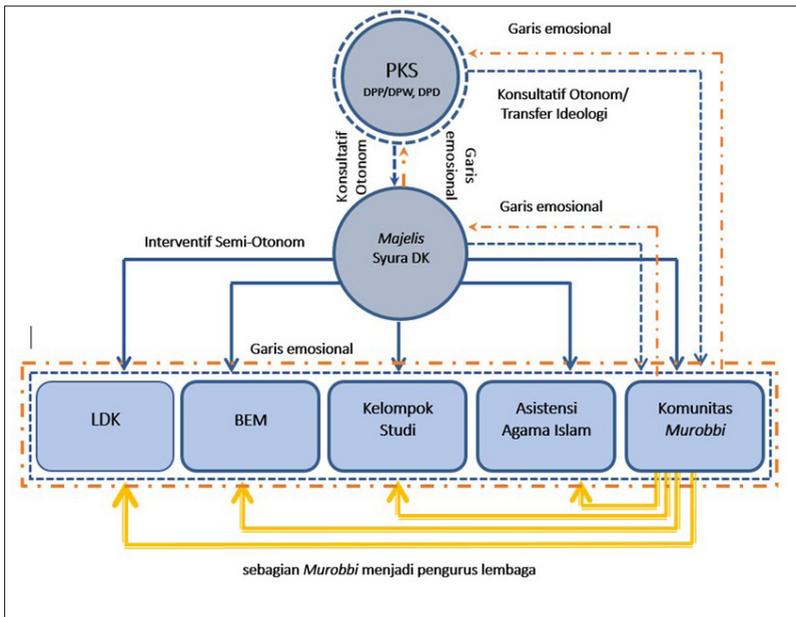
Asrama UI, ADK mencoba melakukan penyemaian ideologi Tarbiyah melalui pelaksanaan kegiatan mentoring dan berbagai macam kegiatan keislaman lainnya selayaknya LDK. Dibandingkan PPSDMS/RK Jakarta yang kurikulum pembelajaran dan program kegiatannya sangatlah otonom dari pengaruh dan intervensi struktur gerakan PKS, kegiatan dan program Sahabat Asrama UI terkoneksi dengan instruksi dan intervensi majelis syura ADK.

6. Majelis Syura Kampus: Miniatur Struktur Gerakan Tarbiyah di Indonesia

Selayaknya miniatur struktur kelembagaan gerakan Tarbiyah tingkat nasional, struktur kelembagaan Tarbiyah di tingkat kampus juga memiliki struktur yang hampir serupa, yaitu majelis syura kampus diposisikan sebagai pemegang otoritas tertinggi dakwah Tarbiyah di tingkat kampus. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, majelis syura kampus berhak untuk menentukan berbagai rencana dan kebijakan strategis dakwah kampus. Alur otonomi dakwah kampus ditunjukkan pada Gambar 3.5.

Adapun proses pemilihan majelis syura kampus tingkat universitas maupun fakultas lebih banyak ditentukan oleh rekomendasi *murobbi* dan para majelis syura tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu, semisal keaktifan dalam kegiatan gerakan dan partai, amal ibadah *yaumiyah* (harian), dan ketaatan terhadap segala keputusan gerakan dan partai itu sendiri. Adapun kriteria tambahan untuk menjadi seorang anggota majelis syura kampus tingkat universitas ialah mereka yang telah mengikuti kegiatan kaderisasi PKS dan telah ditetapkan menjadi kader pendukung PKS baik di tingkat Pemula (*Tamhidi*) maupun Muda (*Muayyid*). Biasanya, mereka yang ditetapkan sebagai anggota majelis syura kampus ialah para mahasiswa yang telah memasuki tahun ke-5, mereka yang baru lulus sarjana, ataupun dosen muda yang baru menjadi bagian dari aktivis dakwah kampus permanen (ADKP) di kampus tersebut. Sementara itu, mereka yang ditetapkan sebagai majelis syura tingkat fakultas ialah para mahasiswa yang telah memasuki tahun ke-3.

Bagi ADK, majelis syura kampus tingkat universitas merupakan orang yang dianggap sangat paham dengan situasi dan kondisi dakwah kampus, sehingga secara *secret* kedua entitas tersebut memiliki peranan yang sangat sentral bagi aktivisme dakwah kampus, bukan hanya dalam mengartikulasikan garis besar kebijakan gerakan dan partai di level kampus, melainkan juga ia memiliki otoritas tertinggi dan legitimasi otonom dalam menentukan agenda dan arah dakwah kampus secara spesifik, memproyeksikan kader ADK untuk mengisi pos-pos kepemimpinan lembaga seperti LDK, BEM, Senat, UKM Keilmuan, dan KAMMI, hingga membatat kepengurusan majelis syura di tingkat fakultas. Di sisi lain, majelis syura tingkat universitas juga berperan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bidang Gerakan Pemuda dan Profesi (biasa juga disebut dengan Dewan Thullaby) PKS baik di tingkat DPC, DPD, DPW, maupun DPP.



Sumber: Aidulsyah (2015, 179)

Gambar 3.5 Ilustrasi Alur Otonomi Dakwah Kampus

Sejatinya, baik di UGM, UI, dan ITB, isu tentang keberadaan “majelis syura” adalah suatu hal yang cukup sensitif sekaligus kontroversial baik di lingkungan para ADK maupun aktivis mahasiswa pada umumnya. Pasalnya, melalui penanaman konsep “*sirriyah al-tanzim wa alamiyyah al-dakwah*” (struktur yang bersifat rahasia dan dakwah yang bersifat terbuka), struktur organisasi majelis syura kampus sengaja untuk dirahasiakan baik kepada sesama anggota ADK maupun khalayak umum, tetapi segala instruksi, keputusan, dan kebijakannya berkaitan dengan aktivitas dakwah dan politik adalah suatu hal yang dikesankan wajib dan penting untuk dipatuhi dan dijalankan oleh setiap ADK.

Lantaran instruksinya yang terkesan monolitik dan tidak transparan, hal tersebut sering kali menjadi kritik tersendiri bagi sebagian ADK. Di sisi lain, karena pengaruhnya yang terkesan *powerful* dalam menentukan arah dan sikap politik BEM—yang dipimpin oleh ADK—terhadap gejala sosial politik di level negara, hal tersebut juga menjadi momok tersendiri bagi kalangan aktivis mahasiswa lainnya.

Dalam konteks UGM dan UI, bahkan terkadang penetapan kebijakan majelis syura—khususnya di level universitas—dikesankan diputuskan secara otoriter, tidak membuka ruang partisipatif, serta hanya mengandalkan kewajiban bagi setiap ADK untuk *tsiqoh* (percaya), patuh dan taat terhadap segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh majelis syura tanpa dibarengi rasionalisasi yang jelas tentang mengapa keputusan dan kebijakan tersebut harus ditetapkan. Lebih lanjut, bagi ADK yang melakukan kritik terhadap keputusan majelis syura tersebut justru kadang kala dilabelkan sebagai seseorang yang “tidak taat”, dianggap bukan bagian dari ADK, atau bahkan “pembanggang”.³⁶ Berkaitan hal tersebut, Isdhama Miswardhana mengeluhkan,

³⁶ Peristiwa seperti ini juga pernah terjadi pada Pemira UGM tahun 2012 dalam bentuk yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui, pada Pemira UGM tahun 2011 Partai Bunderan (partai yang dikelola oleh ADK) mengalami kekalahan dan tidak dapat menempati struktur kabinet BEM KM UGM. Lalu pada Pemira UGM tahun 2012, Partai Bunderan—yang ketika itu mengusung Yanuar Rizki Pahlevi—pun memenangkan Pemira. Ketika usai penghitungan suara, salah seorang elite ADK memberikan sebuah *tauji* kepada para Tim Sukses peme-

“Dalam memahami *tsiqoh*, banyak kader saat ini yang cenderung menganggap ‘*tsiqoh*’ sebagai suatu hal yang mutlak, yang harus ditaati segala macam keputusannya secara mutlak. Konteks ‘*tsiqoh*’ baik terhadap apa yang disampaikan oleh para *asatidz* maupun pada keputusan majelis syura. Ada yang salah dalam memahami konsep ‘*tsiqoh*’ saat ini yang cenderung menjadi sebuah nilai yang sakral, namun tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh, bahkan cenderung bangunan ‘ke-*tsiqoh*-an’ tersebut karena bersifat patronasi dari kalangan elite—baik Partai maupun majelis syura kampus. Konsep kepercayaan secara mutlak terhadap keputusan struktur yang ‘di atas’ karena struktur yang ‘di atas’ dianggap lebih *saleh*, karena diisi oleh para *asatidz* dan orang-orang yang berkompeten memahami dan mengetahui segala macam hal, namun tanpa diimbangi dengan pemahaman yang utuh dari kader terhadap maksud dari keputusan tersebut masih menjadi budaya di tengah-tengah kader, tanpa mempertimbangkan perhitungan-perhitungan yang lain” (wawancara Isdhama Miswardhana, 24 Oktober 2014).

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Nandika Aisyah Pertiwi,

“Kadang para majelis syura memaksakan metode yang mereka kembangkan di zamannya, untuk juga diterapkan di zaman yang berbeda. Dan terkadang, sistem itu sangat saklek, jadi orang itu langsung di *judge*, kamu enggak taat, kamu enggak *tsiqoh*, kamu enggak apa ketika itu berbeda *gitu*. Dari struktur harus seperti ini, seperti ini, dan seperti ini misalnya. Terus, padahal di lapangan *pengennya* kaya begini *gitu* kan. Terus, nanti yah entar enggak sesuai dong, yah entar enggak apa dong, *gitu* kan. Sebagai contoh, ketika saya di BEM, ketika Presiden dan Menko Ekstenal BEM saya ketika itu, mereka lebih berani untuk mengambil keputusan, meskipun itu berseberangan dengan keputusan Majelis Syura

nangan Yanuar Rizki Pahlevi dengan menganggap bahwa kekalahan Pemira tahun 2011 dianalogikan dengan kekalahan kaum muslim pada Perang Uhud di masa Rasulullah saw. Secara semantik, penganalogian kekalahan Pemira tahun 2011 seakan-akan ingin memberikan pesan bahwa apa yang terjadi para Pemira tahun 2011 adalah Partai Bunderan dikalahkan oleh “partai orang-orang yang tidak baik”.

DK. Semisal, penentuan menteri-menteri yang krusial itu kan seharusnya diselamatkan dengan orang-orang kita (anggota gerakan Tarbiyah) yang seharusnya menjabat di situ. Idealnya seperti itu. Dari ‘atas’ (Majelis Syura) sudah mempersiapkan orang-orang untuk menteri ini si ‘ini’, menteri ini si ‘ini’, si ‘ini’ dan ‘ini’. Namun, ternyata ketika Presiden memutuskan menteri dari kalangan yang lain, *weeuh ...* ternyata itu langsung ramai di atas (Majelis Syura), sampai presidennya di panggil, menteri-menteri yang dari Tarbiyah di panggil, kenapa bisa seperti itu. *Tapi* memang Presiden saat itu *nanggepinnya* ‘iya, iya, iya’ namun ketika di lapangan, dia benar-benar yang menentukan dan berani mengambil keputusan yang bertentangan dengan Majelis Syura” (Wawancara Nandika Aisyah Pertiwi, 21 Desember 2014).

Hal seperti ini juga sama dengan apa yang terjadi di UI, terutama sebelum tahun 2012 ketika Majelis Syura Kampus belum mengubah *Manhaj* Renovasi Dakwah Kampus menjadi *Manhaj* Revitalisasi Dakwah Kampus. Setelah tahun 2012, kegiatan Gerakan Tarbiyah UI lebih banyak ditentukan oleh setiap ADK melalui kegiatannya masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh Erin Nuzulia Istiqomah,

“Pasca-2012, setiap ADK boleh berkreasi. Ini memang keputusan Majelis Syura untuk *merubah* format yang terbuka agar para ADK bisa lebih kreatif, enggak dibatasi, suka-suka jalan sendiri, semuanya diserahkan kepada ADK, jadi enggak terpasung sama gerakan Tarbiyah. Sekarang itu, Majelis Syura *ngomong* A, itu terserah sekarang, terserah mau diterima atau enggak ... Keputusan *merubah* format itu, katanya sih berdasarkan *jaulah* dan evaluasi. Kalau *dulu*, sebelum 2012, itu enggak bisa ... kalau Majelis Syura *ngomong* A, ya kita harus A.

Mungkin ada Majelis Syura Kampus yang punya keputusan, *tapi* saya sendiri enggak tahu siapa orangnya. Mungkin hanya orang terpilih yang direkrut kembali, jadi kalau dulu misalnya yang menjadi intinya itu besar, bisa sampai 400 orang, *tapi* mungkin sekarang hanya sekitar 40. Saat ini di UI ada sekitar 3.000 ADK, karena yang ikut *liqo*’ ya dianggap ADK. Yang namanya ADK itu semua di bawah (kendali) Majelis Syura SALAM UI” (wawancara dengan Erin Nuzulia Istiqomah, 22 Februari 2015).

Meskipun begitu, hal ini berbeda dengan kondisi yang terjadi di ITB, yaitu Majelis Syura DK yang lebih bersifat cair. Sebagaimana dinyatakan oleh Tizar Bijaksana,

“Selama ini, ketika saya di KM ITB sendiri, kalau bicara intervensi dari gerakan Tarbiyah sendiri sih enggak ya. Cuma, ketika itu hanya ada *request* kalau bisa menterinya dari Tarbiyah, kalau enggak Tarbiyah, dari muslim. Hanya sampai situ aja. Nah, saya waktu itu ingin memasukkan mahasiswa misionaris Kristen di kabinet ... dan ketika itu, sepenuhnya saya yang menentukan menteri saya siapa saja, saya pun memasukkan si misionaris Kristen itu. Karena menurut saya, memang dialah yang kompeten ketika itu. Ya Majelis Syura pun akhirnya terima-terima aja, karena mereka pun kadang-kadang enggak bisa *nyari* orang juga. Akhirnya ketika itu, kasarnya ya enggak *nurut* terhadap keputusan (Majelis Syura) pun enggak apa-apa. Sebenarnya hampir enggak ada sih, keputusan Majelis Syura itu yang seakan-akan mengekang kemerdekaan kabinet. Saya dan kawan-kawan kabinet sendiri yang menentukan” (wawancara Tizar Bijaksana, 25 Februari 2015).

Dalam konteks kelembagaan majelis syura kampus, baik di UGM, UI, maupun ITB memiliki pola kelembagaan yang berbeda-beda. Di UGM, kegagalan ADK dalam mendominasi JS telah menyebabkan ADK membentuk Forum Silaturahmi Mahasiswa Muslim (Forsalamm) UGM, sebuah lembaga semiformal yang dijadikan sebagai wadah perkumpulan antarmajelis syura sekaligus ruang konsolidasi dakwah ADK UGM. Dengan menjadikan Masjid Mardliyyah UGM sebagai *home base*, Forsalamm UGM dan lembaga sayap yang dikelolanya, Forum Studi dan Dakwah (Fosda) Mardliyyah secara rutin mengadakan berbagai macam program pembinaan dan kajian yang diperuntukkan bagi ADK UGM seperti kajian pekanan, *mabit*, *daurah*, dan *rihlah*. Meskipun secara formal LDK tingkat fakultas secara rutin berkoordinasi dengan JS sebagai lembaga induk UKM bidang kerohanian Islam tingkat universitas, secara informal para pengurus JS dan LDK yang berafiliasi dengan gerakan Tarbiyah juga turut melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Forsalamm UGM itu sendiri.

Berbeda dengan UI yang sejak awal kelembagaan SALAM UI telah didominasi oleh ADK, Majelis Syura UI memanfaatkan kelembagaan SALAM UI untuk mengonsolidasikan agenda politik dan dakwah gerakan mereka. Sementara itu, Majelis Syura ITB juga memanfaatkan struktur kelembagaan GAMAIS ITB. Lebih daripada itu, hingga saat ini, struktur kelembagaan GAMAIS ITB banyak mereplikasi model struktur organisasi PKS seperti adanya majelis syura—yang sebelumnya dikenal sebagai majelis pertimbangan organisasi (MPO)—yang ditempatkan sebagai pimpinan tertinggi GAMAIS ITB, dewan syariah, lembaga dakwah wilayah (LDW), dan *levelling* jenjang kaderisasi keanggotaan seperti mula, muda, madya, dan purna. Meskipun begitu, jika dibandingkan antara UI dan UGM yang aktivisme dan kebijakan majelis syura-nya cenderung kaku, *strict*, dan *more politically oriented*, aktivisme dan kebijakan Majelis Syura GAMAIS ITB justru cenderung terbuka, *more religious oriented* dan *negotiable*. Komparasi majelis syura ketiga kampus ini ditunjukkan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Komparasi Majelis Syura Kampus di UI, UGM, dan ITB

	UI	UGM	ITB
Konfigurasi politik majelis syura DK tingkat kampus	Sebelum tahun 2012, bersifat tertutup. Setelah tahun 2012 bersifat semi-terbuka.	Bersifat tertutup	Bersifat semi-terbuka
Kualifikasi majelis syura DK tingkat universitas	Sebelum tahun 2012 , Majelis Syura UI berasal dari mahasiswa tingkat akhir atau sarjana muda yang masih menjabat dalam struktur informal ADK. Setelah tahun 2012, Majelis Syura UI yang include dengan SALAM UI berasal dari kalangan mahasiswa tingkat akhir, ataupun mahasiswa yang berasal dari angkatan satu tahun di atas angkatan pengurusnya. Mengikuti kaderisasi PKS.	Mahasiswa tingkat akhir atau sarjana muda. Mengikuti kaderisasi PKS.	Mahasiswa tingkat akhir atau sarjana muda. Mengikuti kaderisasi PKS.

Buku ini tidak diperjualbelikan

	UI	UGM	ITB
Kualifikasi majelis syura DK tingkat fakultas	-	Mahasiswa tingkat 2 atau tingkat 3. Tidak semua mengikuti kaderisasi PKS, tetapi mengikuti <i>halaqah</i> ADK.	Mahasiswa tingkat 2 atau tingkat 3. Tidak semua mengikuti kaderisasi PKS, tetapi mengikuti <i>halaqah</i> ADK.

Sumber: Aidulsyah (2015, 195)

7. KAMMI: Antara Sayap Gerakan dan “Benalu” Jamaah

Harus diakui bahwa baik di UGM, UI, maupun ITB, *positioning* KAMMI di dalam gerakan Tarbiyah cukup berbeda. Di kampus-kampus menengah negeri maupun swasta lainnya, KAMMI difungsikan sebagai tempat bernaungnya majelis syura kampus, diposisikan sebagai “episentrum” kegiatan ADK sekaligus menjadikannya sebagai wadah utama konsolidasi dakwah dan politik antar-ADK. Namun, di kampus-kampus besar seperti UGM, UI, dan ITB justru yang terjadi ialah sebaliknya, yaitu struktur dan kelembagaan majelis syura kampus yang sangat hegemonik di organisasi intra Universitas telah mengakibatkan KAMMI hanya dianggap sebagai “angin lalu” atau bahkan terkadang dianggap sebagai “benalu” gerakan.

Di UI misalnya, kehadiran KAMMI Komisariat UI—yang dideklarasikan tahun 2013—justru diinisiasi oleh mereka yang selama ini berseberangan dengan segala kebijakan dan otoritas Majelis Syura Kampus, termasuk dalam kaitannya dengan sosok yang akan dicalonkan oleh Majelis Syura Kampus untuk menjadi Ketua BEM UI. Di ITB, KAMMI Komisariat ITB—yang sebenarnya di masa-masa awal pendirian KAMMI, ADK ITB berhasil mengantarkan Vijaya Fitriyasa sebagai Sekjen PP KAMMI—lambat laun makin ditinggalkan dan tidak diminati oleh para ADK lantaran pengaruh, ruang gerak di internal kampus, perannya menjadi gerakan ekstra-parlementer, serta fungsinya dalam mendinamisasi kehidupan dakwah kampus mulai dianggap tidak terlalu signifikan.

Buku ini tidak diperjualbelikan

Di UGM, KAMMI ditempatkan oleh Majelis Syura Kampus sebagai wadah aktivisme bagi mereka yang telah purnatugas dari kepengurusan BEM baik tingkat fakultas maupun universitas. Posisi kepemimpinan KAMMI Komisariat UGM selalu diupayakan oleh Majelis Syura Kampus diduduki oleh mereka yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap gerakan Tarbiyah. Namun sejatinya, KAMMI Komisariat UGM merupakan ruang yang *contested*, yaitu antara mereka yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap gerakan Tarbiyah dan mereka yang kritis terhadapnya. Keduanya saling berupaya untuk berebut pengaruh di organisasi tersebut satu sama lain. Dalam sejarahnya, KAMMI Komisariat UGM—yang sejak awal KAMMI berdiri—dikenal telah banyak berkontribusi dalam mendinamisasi ideologi dan arah politik pergerakan KAMMI di kancah nasional serta telah mengantarkan aktivis-aktivis di dalamnya untuk menduduki posisi-posisi penting di kepengurusan pusat KAMMI. Namun, hingga saat ini, KAMMI Komisariat UGM juga dikenal sebagai salah satu episentrum kemunculan gerakan oposisi terhadap KAMMI di tingkat pusat. Pertentangan sebagian aktivis KAMMI Komisariat UGM terhadap *tandhim* gerakan Tarbiyah dan PKS telah melahirkan kemunculan kelompok atau individu yang menamai diri mereka sebagai KAMMI Merah, yaitu Aktivis KAMMI yang terpengaruh dengan ideologi dan teori-teori Marxian dan KAMMI Kultural, yaitu Aktivis KAMMI yang menuntut adanya independensi KAMMI dari intervensi PKS. Keduanya cukup banyak menarik simpati para aktivis KAMMI secara luas.

Lantaran berbagai *positioning* tersebut, baik di UGM maupun ITB, KAMMI yang dahulu difungsikan sebagai lembaga “sayap” gerakan Tarbiyah di level kampus kini perannya hanya dimanfaatkan pada momen-momen tertentu saja, semisal menjadi tim sukses di masa Pemira maupun menjadi koordinator aksi di luar lingkungan Universitas. Di UI, pada dasarnya posisi Ketua PP KAMMI di masa-masa awal ditempati oleh para ADK UI seperti Fahri Hamzah, Fitra Arsil, dan Andi Rahmat. Namun, sejak awal, KAMMI sangat sulit untuk didirikan di UI lantaran muncul anggapan dari ADK UI bahwa

KAMMI hanya akan menciptakan *overlapping* kerja-kerja dakwah dan politik yang selama ini telah dijalankan oleh para ADK baik di SALAM UI maupun BEM UI. Kini, KAMMI Komisariat UI hanyalah tinggal “sejarah” yang sengaja dibiarkan oleh ADK UI agar segera layu sebelum berkembang.

Saat ini, di tengah berkembangnya gerakan anti-*tandhim* di tubuh PP KAMMI, menguatnya konflik antara Fahri Hamzah—se-laku *founding fathers* KAMMI—dengan PKS, serta adanya dominasi loyalis Fahri Hamzah sekaligus kader Gerakan *Arah Baru Indonesia* (GARBI)/Partai Gelombang Rakyat (Gelora) di posisi-posisi penting di Keluarga Alumni KAMMI (KA-KAMMI), telah mengakibatkan posisi KAMMI di tiga universitas tersebut cenderung tidak mendapat tempat di mata “*tandhim*” kampus dan diabaikan oleh Dewan Thullaby PKS setempat yang membawahkannya.

C. Dilema Dakwah Kampus: Antara Perjuangan Politik Partai dan Perjuangan Politik Ummat

Sebagaimana telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, adagium “*al-Jama’ah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-Jama’ah*” (“Jamaah adalah Partai dan Partai adalah Jamaah”) juga dimaknai oleh ADK bahwa mereka juga merupakan bagian dari kader partai. Adanya kesatuan struktur kepemimpinan antara jemaah dan partai telah mengakibatkan instruksi kampanye partai merupakan bagian dari instruksi jemaah, begitu pun sebaliknya. Atas dasar kondisi inilah, sering kali ADK dimanfaatkan oleh elite partai untuk dimobilisasi menjadi bagian tim kampanye partai, baik lokal maupun nasional. Terlebih lagi, secara organisatoris, konsep kejemaahan dan kepartaian yang dibangun memiliki budaya yang semi militeristik dengan penekanan pada *sam’an wa tha’atan* (percaya dan taat) antara *qiyadah* (pemimpin) dan *jundiyyah* (anggota). Dengan pemahaman seperti ini, tidak dimungkiri bahwa sebagian ADK yang selain aktif menjadi aktivis mahasiswa yang mengelola kelembagaan mahasiswa, di sisi lain juga menjadi anggota partai yang ikut terlibat aktif dalam agenda-agenda partai, baik dalam agenda kaderisasi maupun agenda kampanye politik partai.



Keterangan: Aktivist Gerakan Tarbiyah UGM angkatan 2012 yang bergabung dalam komunitas Selusin turut serta berpartisipasi dalam agenda kampanye politik PKS.

Sumber: Nurdiyanto (2014)

Gambar 3.6 Selusin PKS

Di berbagai universitas, ADK sering kali dimobilisasi oleh elite PKS untuk menjadi tim pemantau pemenangan pilkada dan pemilu di berbagai daerah. Di DKI Jakarta dan Jawa Barat misalnya, terdapat sekitar 29 pilkada provinsi, kabupaten, dan kota yang dilaksanakan dalam waktu 5 tahun masa jabatan. Sementara itu di DIY, terdapat 5 pilkada kabupaten dan kota yang dilaksanakan dalam waktu 5 tahun masa jabatan. Selama 5 tahun di berbagai macam Pilkada itulah, ADK—baik UI, UGM, maupun ITB—juga digerakkan dalam agenda pemenangan pilkada. Dalam konteks DIY, sebagian ADK UGM berpartisipasi dalam kegiatan kampanye pilkada di beberapa daerah di DIY. Gambar 3.6 menampilkan dokumentasi komunitas Selusin (yang beranggotakan aktivis gerakan Tarbiyah UGM angkatan 2012) turut serta berpartisipasi dalam agenda kampanye politik PKS. Sementara itu, dalam konteks DKI Jakarta dan Jawa Barat, sebagian

Buku ini tidak diperjualbelikan

ADK UI berpartisipasi dalam kampanye pilkada DKI Jakarta, pilkada Wali Kota Depok, pilkada Gubernur Jawa Barat. Di ITB sendiri, sebagian ADK ITB berpartisipasi dalam pilkada Wali Kota Bandung, pilkada Bupati Bandung, pilkada Gubernur Jawa Barat, dan pemilu. Partisipasi ADK dalam pilkada tersebut biasanya menjadi relawan yang melakukan *spreading* dan melakukan kampanye *door to door* ke setiap rumah warga, hingga menjadi panitia dalam penyelenggaraan kampanye di area perumahan warga. Di sisi lain, ADK sebisa mungkin mencoba mengondisikan lingkungan kampus dalam keadaan steril dari kampanye partai politik apa pun. Meskipun begitu, tidak dimungkiri bahwa dalam beberapa kondisi, ADK adakalanya “keceplosan” atau bahkan sengaja mengampanyekan PKS di kampus seperti yang pernah terjadi di UGM beberapa tahun lalu³⁷. Tabel 3.6 menunjukkan perolehan suara PK(S) pada Pemilu 1998–2014 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan tingkat nasional.

Tabel 3.6 Perolehan suara PK/PKS Sejak Pemilu 1998–2014 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta

Tahun Pemilu	Jakarta	Jawa Barat	DIY	Nasional
1999	231.545 (4,46%)	537.897 (2,12%)	27.808 (1,44%)	1.436.565 (1,36%)
2004	1.057.246 (22,32%)	2.369.231 (11,44%)	141.114 (7,33%)	8.325.020 (7,34%)
2009	696.706 (17,23%)	2.025.755 (10,86%)	159.132 (9,07%)	8.204.846 (7,88%)
2014	537.905 (10,71%)	1.903.548 (8,00%)	147.875 (6,66%)	8.480.204 (6,79%)

Sumber: Aidulsyah (2015, 160)

Harus diakui bahwa dalam gerakan Tarbiyah, loyalitas terhadap Jamaah dan partai serta kepatuhan terhadap sistem dan instruksi elite/

³⁷ Hanya beberapa insiden saja yang menunjukkan terjadinya kampanye partai politik di kampus, seperti yang terjadi di UGM semasa Pemilu 2014, yaitu terdapat beberapa ADK yang melakukan pose foto dengan tulisan PKS di depan Masjid Kampus UGM.

struktur merupakan bagian dari konstruksi kesalehan individu. Oleh karena itu, dalam hal ini sangat wajar apabila sebagian besar kader gerakan Tarbiyah—khususnya mereka yang sedang menjadi ADK—berani secara terang-terangan menunjukkan identitas ke-Tarbiyah-an/ke-PKS-an mereka di depan publik. Terlebih, bagi sebagian besar kader Tarbiyah, aktivisme *show off* identitas Tarbiyah serta keterlibatannya dalam kampanye partai di-*framing* sebagai bagian dari agenda dakwah Tarbiyah itu sendiri.

Meskipun begitu, harus dipahami bahwa sejatinya instruksi elite/struktur yang diterima oleh ADK tidaklah secara formal langsung berasal dari DPC, DPD, DPW, maupun DPP PKS, melainkan melalui sistem instruksi informal majelis syura dan *murobbi* kampus.

Dalam konteks ITB, Fahmi Atriyadi mengungkapkan,

“Biasanya sih, kalau diajak kegiatan-kegiatan partai itu lewat *murobbi* melalui *liqo'*, tapi kalau secara kelembagaan formal Tarbiyah kampus sih enggak. Seperti LDK, Himpunan, BEM, itu enggak terlibat dengan agenda Partai. Melalui forum *liqo'* itu, kemarin itu ADK ITB mungkin ada sekitar 100 orang yang turun bantu kampanye PKS di daerah-daerah” (wawancara dengan Fahmi Atriyadi, 25 Februari 2015).

Tidak jauh berbeda dengan Fahmi Atriyadi, Kartika Nur Rahman yang merupakan Ketua PP KAMMI tahun 2016–2018 sekaligus mantan ADK UGM juga mengungkapkan,

“Jadi, memang sistem Tarbiyah di kampus itu jujur atau enggak itu membentuk jadi pemimpin, *Akh*. Jadi orang bisa berpikir, situasi mahasiswa pasti membuat orang akan berpikir ya. Sebagian besar kebijakan dakwah kampus itu diputuskan oleh mahasiswa. Jadi arahan-arahan kebijakan dari Partai itu hampir tidak pernah, bukan berarti tidak pernah sama sekali ya. Paling nanti para *asatidz* memberikan masukan, namun untuk keputusan ditentukan oleh para pemimpin ADK. Yang dibiasakan itu kan percaya kepada hasil musyawarah, artinya ustaz *kalo ngasih* keputusan kan juga jarang, dia *ngasih taujih*, yang dipercaya dalam konteks itu. *Tapi* dalam konteks keputusan,

itu yang dipegang itu hasil musyawarah. Pendapat ustaz biasanya, yang bab keputusan ya, itu bersandar pada hasil musyawarah. Karena memang ciri yang dipegang itu. Dan itu yang diyakini secara umum dalam Tarbiyah kan itu ya, dalam mengambil keputusan harus dibuat sistem melalui mekanisme musyawarah. Sebenarnya yang sangat menentukan keputusan yang di kampus, dalam mikro-kampus itu kan ditentukan oleh semacam majelis syura tingkat mahasiswa yang terpilih. Intinya, segala keputusan yang ada di PKS itu kan diturunkan dari yang ada di hasil keputusan Majelis Syura di tingkat DPP PKS itu ya, nah kurang lebih sebenarnya struktur dan keputusan yang ada di kampus seperti itu juga, yaitu bersifat *top-down* (keputusan majelis syura kampus untuk kader gerakan Tarbiyah kampus). *Ahlul halli wal aqdh* kan *top-down*, tapi mendengarnya kan *bottom-up*. Relatif semacam itu” (wawancara dengan KNR, 21 Oktober 2014).

Lantaran tingginya loyalitas dan kelekatan emosional dengan struktur Jamaah dan Partai, sering kali kebijakan majelis syura dan *murobbi* kampus sangat rentan mencampuradukkan kepentingan dakwah kampus dengan kepentingan Partai. Kondisi ini biasanya terjadi ketika mendekati momen-momen politik tertentu. Dalam konteks UGM, kondisi ini pernah terjadi di akhir tahun 2013 ketika Anggit Adi Wijaya selaku kandidat calon Presiden BEM KM UGM terkuat yang ingin dimajukan oleh Partai Bunderan terpaksa harus digantikan oleh Dzikri Asykarullah lantaran elite Tarbiyah tidak ingin mengakomodasi tuntutan Anggit Adi Wijaya untuk tidak diintervensi oleh partai politik apa pun.

Dalam konteks yang tidak jauh berbeda, di UI sempat terjadi friksi antara Majelis Syura UI dengan kalangan Tarbiyah yang tidak sepakat dengan kebijakan Majelis Syura UI yang memutuskan Ivan-Aid sebagai Capresma dan Cawapresma BEM UI lantaran dianggap tidak transparan. Erin Nuzulia Istiqomah selaku kader Tarbiyah UI yang cenderung kritis terhadap kebijakan tersebut mengungkapkan,

“Kalau ingat setelah 2012 tadi, banyak friksi ya, banyak orang yang enggak sependapat ya. Sampai misalnya Pemira kemarin, PPSDMS mengajukan sendiri-sendiri beda sama keputusan MS misalnya, karena ketika itu kita enggak dikasih tahu sama

sekali. Misalnya, MS memutuskan untuk memajukan Ivan-Aid (Capresma dan Cawapresma BEM UI), tapi kita enggak dikasih tahu kenapa mereka memutuskan Ivan-Aid misalnya, kita menjadi bagian dari mereka bukan? Jadi enggak ada tuh, beda sama *dulu*. Kalau *dulu* ada, kenapa kita harus memilih si 'A', kita juga pasti disosialisasikan. Kalo sekarang enggak ada, dan ketika itu kita merasa punya opsi yang lebih baik untuk diusung, ya *udah*, ditawarkan. Cuma, akhirnya musuh sama ADK, iya mungkin, sampai ada kata-kata yang ditujukan kepada kita, 'kok kalian membangkang ya', itu ya adalah. Sampai dibikin ribut-ribut sekampus, sampai berasa kita berhadapan dengan musuh, ya ada. Bahkan kita sampai dipanggil sama *Murobbi*, ditanya 'kenapa enggak ikut keputusan Jamaah?' Lo, memang kita bagian dari Jamaah? Wong kita enggak pernah diajak ngobrol sama Jamaah, misalnya kaya begitu. Terus teman-teman yang sudah berubah sikap, teman yang dulunya akrab sama kita *gitu* ya, terus tiba-tiba merasa bahwa kita musuhnya, Cuma yang dianggap lucu-lucuan aja ketika itu. Justru *Murobbi* saya dibilang begini, "ya *kalo* bisa yang ada di dalam sana (pendukung calon lain di luar Ivan-Aid), bisa mengalihkan suara untuk pilihan DK. Di sisi lain, karena kita tinggal di asrama, dan di situ ada ADK juga, akhirnya kita hubungannya renggang, atau kaya berantem-beranteman gitu, ya ada. *Tapi* beberapa bulan setelah itu ya *udah*, selesai. Setelah itu, akhirnya ya *temenan* lagi biasa." (Wawancara dengan Erin Nuzulia Istiqomah, 22 Februari 2015).

Kultur kebijakan majelis syura kampus yang cenderung mengedepankan otoritas yang bersifat monologis telah menyebabkan kebijakan majelis syura kampus dikesankan sebagai suatu hal yang sakral. Lebih lanjut, kesakralan terhadap kebijakan majelis syura kampus terjadi lantaran adanya indoktrinasi yang memadukan antara unsur kohesivitas, rasionalisme dengan metafisika fondasionalistik yang digunakan oleh majelis syura kampus guna meneguhkan otoritas, legitimasi dan hirarki majelis syura kampus kepada kadernya. Atas dasar kesakralan inilah, ADK yang tidak sependapat dengan kebijakan majelis syura kampus—khususnya berkait kebijakan politik kampus—dengan mudah distigmakan oleh oknum majelis syura dan *murobbi* kampus sebagai golongan "Barisan Sakit Hati" (BSH) (wawancara

Ade Nuansa Wibisono, 1 November 2014). Secara garis besar, realitas majelis syura kampus seakan mencoba melakukan tindakan protektif terhadap kebebasan berpikir kader dengan cara-cara yang dikesankan bersifat religius, kohesif, masuk akal, serta seakan demokratis.

Dalam kaitannya dengan stigmatisasi, Isdhama Miswardana mengungkapkan,

“Melihat dakwah di kampus bukan hanya sebatas melihat dakwah secara ‘Islam’, melainkan juga melihat dakwah secara gerakan. Seharusnya, pikiran kader lebih terbuka dalam memahami dakwah Tarbiyah itu sendiri. Namun, yang terjadi adalah kepehaman terhadap dakwah Tarbiyah seakan mengalami pengeroposan ideologis, karena kecenderungan seseorang sudah melakukan dakwah Tarbiyah saat ini lebih cenderung diukur dari kedekatan mereka terhadap ‘simbol dakwah’ ketimbang ‘nilai dakwah’ yang dikembangkannya itu sendiri. Banyak kader yang mementingkan ‘simbol dakwah’ yang dipakainya apa, ketimbang menilai substansi dari ‘nilai dakwah’ yang dikembangkannya itu apa. ‘Simbol dakwah’ yang dimaksud di sini adalah simbol yang langsung tertujukan dengan label Partai. Pemaknaan dan pemahaman terhadap simbol telah mengalahkan pemahaman dan pemaknaan terhadap paradigma nilai itu sendiri. Dari perihal inilah, akan terjadi sebuah fenomena yang menunjukkan adanya kader yang melakukan pengebirian terhadap kader yang bukan karena ‘nilai’ yang dibangunnya, melainkan karena ‘simbol’ yang digunakannya” (wawancara dengan Isdhama Miswardana, 24 Oktober 2014).

Secara periodik, istilah BSH sendiri baru mengemuka di lingkungan ADK beberapa tahun terakhir ini, khususnya setelah munculnya Forum Kader Peduli (FKP) di sekitar tahun 2009-an. Sebelum itu, terlebih sebelum tahun 1998 ketika ADK masih melakukan konsolidasi dan intimasi ideologis serta belum terlalu berambisi dalam dunia politik praktis, fenomena *labelling* terhadap mereka yang tidak bersepakat cenderung tidak terjadi.

BAB 4

DARI PKS KE UNIVERSITAS: PENGARUH PERTARUNGAN WACANA ELITE DALAM MEMENGARUHI LOGIKA DAKWAH KAMPUS

Sebagaimana digambarkan pada bab-bab sebelumnya, harus diakui bahwa meskipun pada hakikatnya PKS tidak memiliki garis inter-ventif yang *firm* terhadap ADK, tetapi lantaran adanya kelekatan dan emosional yang kuat antara majelis syura dan *murobbi* kampus dengan PKS telah mengesankan bahwa kebijakan majelis syura kampus harus *in line* dengan kebijakan Partai. Di sisi lain, karena adanya kesinambungan indoktrinasi yang bersifat teologis *cum* militeristik tentang pentingnya “*tsiqoh* terhadap *qiyadah*” (patuh terhadap pemimpin), baik hubungan ADK dengan majelis syura dan *murobbi* kampus maupun majelis syura dan *murobbi* kampus dengan elite PKS di berbagai tingkat kepengurusan partai telah mengakibatkan tradisi diskursif dan kritis terhadap kebijakan menjadi suatu hal yang tabu. Akibatnya adalah, hegemoni diskursus—yang sering kali mengalami penyimpangan-penyimpangan temporal, pembalikan total-kekeliruan, penilaian yang bersifat kamuflase terhadap nilai-nilai ideologis mereka—yang tengah dikembangkan oleh elite PKS menjadi suatu hal yang “terkesan” wajib untuk diinternalisasikan tanpa perlu mengetahui tentang proses, dinamika, dan konflik yang terjadi dalam

Buku ini tidak diperjualbelikan

pembentukan hegemoni diskursus tersebut. Kondisi inilah yang telah mengakibatkan massa ADK rentan dimobilisasi oleh elite PKS guna mengakselerasi kepentingan-kepentingan pribadi tertentu, bahkan untuk mendukung atau pun menjatuhkan kelompok atau seseorang yang selama ini berseberangan dengannya.

Dalam konteks internal, perihal ini makin mengemuka pada sekitar tahun 2014, ketika Anis Matta yang ketika itu masih menjabat sebagai Presiden PKS mendirikan komunitas Anis Matta Pemimpin Muda (AMPM) dan gagasan Arah Baru Indonesia (ABI) yang banyak diikuti dan dikampanyekan ADK yang bergabung dengan komunitas tersebut, di tengah Anis Matta dan loyalisnya sedang mengalami friksi yang cukup tegang dengan faksi ideologis. Namun, setelah faksi ideologis berkuasa, terlebih sejak munculnya naskah presentasi “Mewaspadai Gerakan Mengkudeta PKS”, AM beserta ormas loyalis AM GARBI dianggap sebagai aktor utama gerakan yang ingin melakukan makar tersebut. Lebih jauh daripada itu, GARBI mencoba menjalankan gagasan AM tentang Arah Baru Indonesia—yang di Pemilu Tahun 2014 diamini oleh seluruh elite dan disosialisasikan oleh para ADK di kampus. Namun, justru AM dan loyalisnya di-*framing* oleh ADK sebagai gerakan “liberal” dan keluar dari “jalan dakwah”.

Sebelumnya, kondisi seperti ini pernah terjadi di sekitar tahun 2009-an, ketika sebagian kader senior partai membentuk FKP sebagai sebuah forum yang melakukan berbagai kritik terhadap kebijakan dan tingkah laku elite yang dianggap menyimpang dari jalan dakwah. Namun, sejak FKP terbentuk, sejak itu pula elite membentuk wacana dominan yang di dalamnya seluruh kader—termasuk ADK—diinstruksikan untuk tidak berkomunikasi dan dekat dengan tokoh-tokoh FKP lantaran mereka dianggap sebagai BSH dan telah keluar dari Jamaah. Barulah ketika PKS di bawah kendali faksi ideologis, mereka mulai mengakomodasi kalangan FKP untuk kembali berkarya di partai dan jamaah.³⁸

³⁸ Noor (2006, 363) menyatakan bahwa sejatinya FKP tidak pernah menjadi arus utama (*mainstream*) di PKS. Bahkan di Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat gerakan FKP, forum ini hanya menarik sekitar 5% dari total kader. Di luar DKI Jakarta, persentase pendukung FKP jauh lebih rendah. Di Kabupaten Bekasi

Dalam konteks eksternal, sosok Ahmad Dhani yang selama ini seringkali diasosiasikan oleh ADK sebagai agen Zionis Indonesia dan pendukung Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) tiba-tiba berubah sebagai sosok yang harus didukung oleh ADK ketika ia dicalonkan menjadi wakil Bupati mendampingi Sa'aduddin yang merupakan kader PKS di Kabupaten Bekasi tahun 2017 silam. Dan dalam konteks kasus korupsi LHI, sebelumnya ADK adalah salah satu kelompok yang cukup lantang menyuarakan dukungan terhadap KPK, terlebih di saat adanya "rumor" bahwa banyak pegawai KPK yang juga merupakan bagian dari aktivis dakwah Tarbiyah. Namun, kondisi ini berubah ketika LHI dipidanakan di mana sebagian ADK justru menyatakan bahwa KPK sudah tidak lagi independen dan adanya upaya "pendzaliman" terhadap dakwah Tarbiyah dan LHI.

Anomali politik ADK ini juga terjadi ketika Pilkada DKI Jakarta Tahun 2007 silam, ketika PKS mengusung Adang Daradjatun-Dani Anwar melawan Fauzi Bowo (Foke)-Priyanto. Oleh kalangan ADK, dinarasikan bahwa Foke-Priyanto tidak pro terhadap agenda Islam, terlebih melihat latar belakang pendidikan SD-SMA Foke yang ditempuh di pendidikan Katolik. Namun, kondisi ini berubah ketika Foke-Narchrowi Ramli (Nara) bertarung dengan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok, non-Muslim) di Pilkada DKI Tahun 2012 tahap terakhir. Saat itu, narasi ADK terhadap Foke-Nara lebih pro terhadap agenda Islam dibandingkan Jokowi-Ahok. Padahal dalam konteks Solo, pada Pilkada Solo Tahun 2010 lalu, PKS merupakan salah satu partai pengusung pasangan *incumbent* Joko Widodo (Jokowi)-FX Hadi Ruyatmo (Non-Muslim) untuk menjadi Walikota-Wakil Walikota dua periode.

Jika dilihat dalam konteks partai politik, fenomena anomali politik dengan terjadinya *shifting value and shifting interest* dalam berpolitik adalah suatu hal yang dapat dimafhumi. Namun dalam konteks PKS, kondisi tersebut jauh lebih menarik karena meskipun

misalnya, FKP hanya dapat menarik 4-5 kader dari sekitar 10.000 kader. Di Tangerang, jumlah eksponen FKP tidaklah signifikan. Di luar pulau Jawa, pendukung gerakan ini hampir tidak ada.

sering kali kebijakan politik PKS bertentangan dengan narasi ideologi Tarbiyah yang selama ini disemaikan di setiap kegiatan *halaqoh* pekanan, hal tersebut tetap mendapatkan simpati ADK lantaran setiap inkonsistensi kebijakan *qiyadah* (pemimpin) tersebut akan selalu disampaikan melalui *bayanat* (*reasoning* tentang diambilnya kebijakan tersebut) yang dikemas dengan dalil-dalil teologis. Meskipun secara tidak sadar, sering kali dalil-dalil teologis yang dihadirkan untuk satu *bayanat* tertentu bertentangan dengan dalil teologis yang dihadirkan untuk *bayanat* yang lain. Selain itu, sejatinya jika ditelusuri lebih jauh, konstruksi *bayanat* resmi yang dihadirkan oleh PKS sering kali masih menjadi kontroversi, afirmasi, dan negasi yang terjadi di antara faksi ideologis dan loyalis AM.

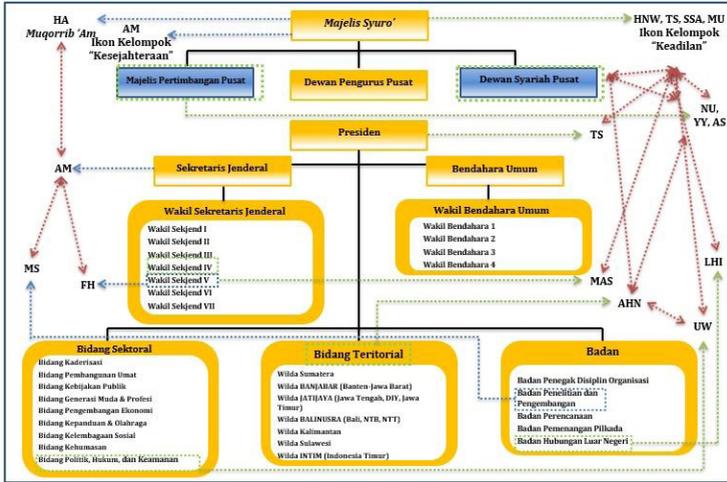
A. Memahami Dinamika Elite PKS: Antara Kontestasi dan Kolektivitas

Sebagaimana telah digambarkan pada bab-bab sebelumnya, benih utama fenomena pengelompokan, faksionalisasi, dan konflik internal di tubuh elite PKS telah terjadi pasca-Pemilu Tahun 2004, ketika PKS mulai mendapatkan “porsi” di dalam jajaran kabinet pemerintahan era SBY. Menurut Munandar (2011, 73-74), faktor krusial dari terjadinya faksionalisasi tersebut diawali oleh adanya ketidaksamaan kepentingan dalam memahami halal-haram-*syubhat* di dalam melakukan *fundraising* partai yang berujung pada perbedaan gaya hidup (Munandar, 2011, 73-74; Machmudi, 2013). Berdasarkan tiga faktor tersebut, faksionalisasi di tubuh PKS terjadi ke dalam dua kelompok besar, yaitu 1) mereka yang dianggap “masih berpegang pada pola-pola autentik Tarbiyah” yang diasosiasikan sebagai kelompok ideologis, fundamentalis, dan berorientasi pada visi islamisme dan direpresentasikan oleh mereka yang berinisial HNW, SI, TS, MU, dan MAS; serta 2) mereka yang dianggap “pragmatis” yang diasosiasikan sebagai loyalis AM, seperti Mafhudz Siddiq, Fahri Hamzah, dkk.. Hingga tahun 2015, di samping kedua kelompok besar tersebut, terdapat pula kelompok kecil yang keluar dari Partai atau anti-Partai yang menyalahkan pilihan berpartai sebagai akar penyebab “degradasi” kualitas kader Tarbiyah.

Di tubuh deklarator PK(S), setidaknya 5 dari 52 orang deklarator PK tahun 1998 dan 1 dari 51 deklarator PKS tahun 2003 menjadi kelompok yang ketiga, yaitu “kelompok yang keluar dari partai” dan di antara mereka beralih menjadi motor penggerak FKP (Munandar, 2011, 83-84).

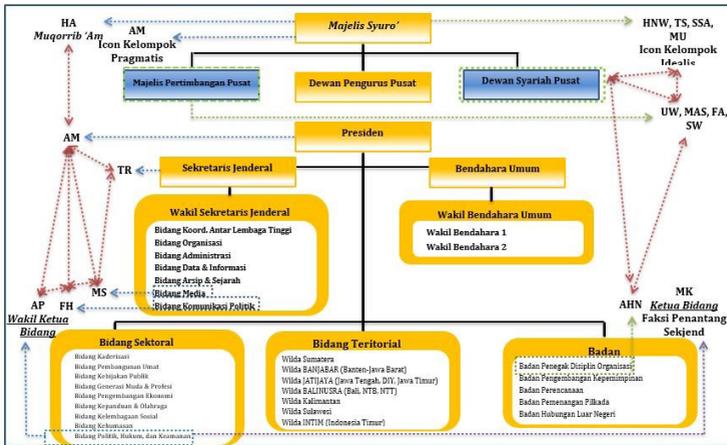
Meskipun pada dasarnya PKS masih didominasi oleh kelompok ideologis, sejak tahun 2004 hingga pertengahan 2015, kepengurusan tingkat pusat PKS lebih banyak dikendarai oleh loyalis AM. Jika melihat pada struktur DPP PKS tahun 2005–2010 dan 2010–2015, loyalis AM menguasai beberapa posisi-posisi strategis di dalam struktur, seperti Sekretaris Jenderal, Ketua Bidang Pembinaan Kader, Ketua Departemen Kemahasiswaan, dan Departemen Dakwah. Secara garis besar, hal tersebut terjadi lantaran adanya persepsi tentang rendahnya *skill* berpolitik yang dimiliki oleh sebagian besar kelompok ideologis partai. Sejatinya kondisi tersebut sangatlah berbeda dengan loyalis AM, yaitu kelompok tersebut bukan hanya ahli dalam berpolitik, melainkan juga ahli dalam mengelola organisasi, mendapatkan berbagai sumber daya finansial, serta “kue kekuasaan” di tingkat pemerintahan pusat (Munandar, 2011).

Dari posisi strategis kebijakan partai inilah, dari tahun 2014–2015 faksi kesejahteraan dengan mudah melakukan apa yang disebut oleh Wickham (2004b) sebagai hegemoni diskursus dengan cara 1) membangun struktur mobilisasi, 2) *framing*, 3) repertoar, 4) simbolisasi identitas, dan 5) *managing and maintaining*. Secara umum, gambaran struktur DPP PKS ditampilkan pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 4.3.



Sumber: Aidulsyah (2015, 222)

Gambar 4.1 Ikhtisar Konfigurasi Struktur DPP PKS 2005–2010



Sumber: Aidulsyah (2015, 223)

Gambar 4.2 Ikhtisar Konfigurasi Struktur DPP PKS 2010–2015³⁹

³⁹ Pada tahun 2013, LHI (Presiden PKS) bersama Ahmad Fathanah saat itu dijadikan tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus suap impor sapi. Hal yang menarik adalah, berdasarkan hasil perbincangan penulis dengan AH (Mantan

Dalam konteks struktur mobilisasi, melalui posisi-posisi strategis tersebut, loyalis AM berhasil memanfaatkan mobilisasi potensi massa untuk mendukung agenda dekonstruksi diskursus ideologi PKS yang dilakukan olehnya dari posisi ideologis ke arah posisi yang lebih pragmatis. Setidaknya, terdapat tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan pemanfaatan mobilisasi potensi massa tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a) Sebagaimana fenomena pada umumnya, kemampuan loyalis AM dalam menggunakan doktrin teologis yang menyatakan bahwa kepercayaan (*tsiqah*) dan kepatuhan (*tha'at*) terhadap pemimpin Jamaah/Partai merupakan bagian daripada indikator kesalehan seorang muslim untuk mengunci kepatuhan setiap kadernya dengan segala narasi dan kebijakan yang disesuaikan oleh kepentingan ekonomi-politik kelompok tersebut, meskipun sering kali narasi dan kebijakan tersebut sangatlah bertentangan dengan kepentingan massa.
- b) Kemampuan loyalis AM dalam menganalisis kebijakan publik secara mendalam.
- c) Produktivitas mereka dalam menulis dan menerbitkan berbagai macam buku yang berkaitan dengan dakwah dan politik telah berkontribusi besar dalam mengukuhkan legitimasi loyalis AM sebagai pemegang otoritas partai. Hingga tahun 2015, buku-buku karya Anis Matta menjadi salah satu buku yang sering kali dirujuk oleh para kader di setiap sesi *halaqoh* dan kajian Islam.

Harus diakui, proses mobilisasi yang digunakan untuk mengafirmasi diskursus pragmatisasi ideologi tersebut bukan hanya berimplikasi terhadap deviasi praktik politik lantaran adanya penyesuaian dengan kepentingan elite, melainkan juga berdampak terhadap terjadinya bias praksis ideologi yang mengaburkan kepentingan elite dalam bingkai jemaah bagi para kader di akar rumput, termasuk di level kampus.

Penasehat KPK), AH mengungkapkan bahwa antara LHI dengan Ahmad Fathanah dipengaruhi oleh AM, yang menjadi faktor penghubung keduanya. Pada saat itu, HNW dan TS telah menasihati LHI agar tidak berhubungan dengan Ahmad Fathanah karena *track record*-nya yang selama ini negatif (hasil diskusi informal dengan AH pada tanggal 26 April 2014 di Sekretariat JS UGM, Yogyakarta).

Guna menambal-sulam realitas konflik antarfaksi dan bias praksis ideologi tersebut, baik loyalis AM maupun keadilan bersama-sama menggunakan *framing* dan repertoar teologis terhadap sesama mereka tentang kewajiban untuk saling menutupi aib sesama muslim serta pentingnya menjaga persatuan dan *ukhuwwah Islamiyah* sebagai landasan keutuhan Partai dan Jamaah. Secara sosiologis, dua landasan teologis tersebut juga dianggap cukup berhasil dalam memperkuat simbolisasi identitasnya sebagai partai yang dikesankan selalu solid oleh akar rumput dan publik. Terhadap fenomena tersebut, Munandar (2011, 73) mengungkapkan,

“Tidak mudah memperoleh gambaran yang konklusif tentang pengelompokan, faksionalisasi, apalagi konflik internal di tubuh PKS. Sebagai jelmaan gerakan Tarbiyah yang sebelumnya bergerak di bawah tanah dan sarat dengan nilai-nilai Islam, berbagai doktrin, antara lain *khusnuzh zhan* (prasangka baik), *ukhuwwah* (persaudaraan), *syura'* (musyawarah), *ath thaa'ah* (ketaatan), dan *iltizam bil Jama'ah* (komitmen terhadap Jamaah), membuat sebagian besar kader PKS tidak mudah mengekspresikan perbedaan, ketidaksetujuan, ketidakpuasan, atau ketidaksukaan yang mereka rasakan secara terbuka, apalagi menajamkannya hingga mengerucut menjadi kelompok-kelompok atau faksi-faksi yang saling berhadapan atau bertentangan. Terdapat kecenderungan yang relatif kuat untuk menelan perasaan-perasaan tersebut secara personal, mendiamkannya, sambil terus berjalan seperti semula.”

Sudah barang tentu, upaya untuk menyimbolisasikan dirinya sebagai partai yang solid merupakan salah satu strategi yang ampuh untuk mempertahankan *managing and maintaining* elite terhadap akar rumput. Di sisi yang lain, *managing and maintaining* elite juga dilakukan dengan memberikan asupan-asupan apa yang disebut oleh McAdam dkk. (1996), dan Wickham (2004b) sebagai mikromobilisasi, insentif-insentif selektif, dan pembingkai motivasi. Dalam konteks PKS, tiga instrumen tersebut saling berkelindan dan lebih banyak diperankan oleh *murobbi* melalui forum *halaqoh*. Bagi PKS, forum *halaqoh* sendiri merupakan jantung kaderisasi partai tersebut.

Sejak gerakan Tarbiyah berdiri, visi forum *halaqoh* bukanlah sebatas sebagai wadah bagi *murobbi* untuk mentransmisikan ideologi dan instruksi partai terhadap *mad'u*, melainkan lebih jauh daripada itu, visi utama forum tersebut adalah dalam rangka membangun *Islamic peer-group* yang menekankan nilai-nilai persaudaraan dan kelekatan sosial lainnya di dalam *inner-circle* forum tersebut. Baik *murobbi* maupun sesama *mad'u* berupaya berperan dalam menyelesaikan persoalan krusial setiap individu di dalamnya, melakukan *munashoroh* (donasi) yang diperuntukkan bagi anggotanya yang membutuhkan, hingga mencarikannya pasangan hidup melalui Biro Konsultasi Bahagia Sejahtera (BKKBS) PKS. Sering kali, karena lekatnya hubungan sosial tersebut, para *mad'u* lebih memilih mengikuti pendapat *murobbi* dan *inner-circle* dibandingkan guru atau pun orang tua mereka sendiri. Dengan adanya kelekatan sosial tersebut, *murobbi* yang selama ini berada di bawah instruksi departemen kaderisasi PKS melakukan mikro-mobilisasi terhadap *mad'u* sesuai dengan arah kebijakan dan instruksi partai, serta kebersamaannya dengan berbagai insentif-insentif selektif. Dalam hal ini, *murobbi* seakan memiliki hak prerogatif tersendiri untuk memberikan keuntungan-keuntungan baik material maupun nonmaterial tertentu bagi seorang *mad'u*. Hal ini diukur dari sejauh mana ketaatan dan loyalitasnya terhadap ajaran Islam, *murobbi*, dan jemaah. Contoh keuntungan yang diberikan secara selektif tersebut adalah rekomendasi *murobbi* terhadap jodoh ataupun pasangan hidup yang tepat bagi seorang *mad'u*, rekomendasi kenaikan jenjang keanggotaan, rekomendasi untuk ditunjuk sebagai calon anggota legislatif, diberikan amanah dalam sebuah organisasi tertentu, ataupun rasa aman dan nyaman dalam bersaudara dan ber-Islam. Bagi gerakan Tarbiyah sendiri, rekomendasi *murobbi* adalah suatu hal yang dianggap sakral dan ada pengesanan untuk dipatuhi setiap rekomendasi tersebut, baik bagi setiap individu maupun Partai. Secara tidak sadar, realitas insentif-insentif selektif tersebut membentuk patronasi terselubung (*hidden patronage*) yang tidak disadari, baik oleh *murobbi* maupun *mad'u*.

Di sisi lain, baik loyalis AM maupun kelompok ideologis juga secara khusus memberikan insentif-insentif selektif di luar dari jalur

halaqoh dan *murobbi* kepada keturunan mereka atau pun kader-kader tertentu yang secara terbuka membangun hubungan *patron-klien* terhadapnya. Hubungan tersebut terbentuk secara instan, *shortcut system* dan lebih dipengaruhi oleh perhitungan suara dan ekonomi-politik dibandingkan lamanya mereka mengikuti sistem Tarbiyah, keterikatannya dengan dakwah, terlebih loyaltasnya terhadap Partai.

Dalam konteks insentif-insentif selektif terhadap keturunan, setiap elite kepentingan di PKS berupaya menempatkan anak-anak kandung mereka—baik yang berusia remaja maupun dewasa— untuk tergabung dalam wadah Garuda Keadilan (GK). Secara sosial, GK sendiri dikesankan memiliki privilese yang lebih dibandingkan ADK, yaitu GK memiliki program-program *capacity building*, sarasehan, dan akselerasi untuk mengurus posisi jabatan strategis di PKS Muda ataupun pencalonan mereka menjadi calon anggota DPRD di tengah kurangnya militansi serta kondisi pemahaman sosial-politik mereka yang belum matang.

Lebih lanjut, dalam konteks insentif-insentif selektif yang bersifat *patron-klien*, kecenderungan mereka yang terbuka dan terhubung dengan relasi tersebut adalah mereka yang berlatar belakang aktivis, pebisnis, pejabat negara, ataupun artis, berikut adalah beberapa contohnya.

- 1) Tamsil Linrung, sosok anggota legislatif PKS yang kontroversial dan selalu diidentikkan dengan berbagai isu korupsi, justru dimandatkan oleh Partai sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI. Sebelumnya, Tamsil Linrung merupakan politisi PAN yang akhirnya dipecat oleh partainya lantaran terdampak isu sebagai pemasok senjata bagi kalangan separatis Filipina (Dituding anggota teroris, 2002; Muhtadi, 2012).
- 2) Muhammad Misbakhun, seorang pengusaha yang di kemudian hari menjadi anggota DPR RI fraksi PKS periode 2009–2014. Sejak adanya tuduhan bahwa Misbakhun terbelit dalam kasus *Letter of Credit* (L/C) fiktif Bank Century, PKS melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadapnya dan digantikan oleh Muhammad Firdaus. Namun, setelah adanya peninjauan kembali

(PK) dari Mahkamah Agung (MA) bahwa Misbakhun tidak bersalah (secara tidak bulat), PKS tidak melakukan rehabilitasi terhadap martabat dan jabatannya. Di tahun 2013, Misbakhun keluar dari PKS dan melanjutkan karier politik di Partai Golkar.

- 3) Dicalonkannya Jenderal Polisi (Purn.) Adang Daradjatun pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2007 dan Anggota DPR RI dari fraksi PKS tahun 2009–2014. Ketika itu, ia diisukan memberikan uang mahar pada Partai antara Rp. 13–15 miliar serta mencoba menutupi rekam jejak istrinya yang tersangkut kasus korupsi (Muhtadi, 2012, 155–156; Buehler, 2012).
- 4) Adly Fairuz, seorang aktor yang sejak awal tahun 2018 menjadi ikon PKS Muda serta menjadi tokoh sentral dalam berbagai kegiatan *meet and greet* PKS di beberapa daerah, tetapi akhirnya di penghujung pendaftaran caleg DPR RI ke KPU justru berpindah menjadi caleg dari Partai Nasdem;
- 5) Pada pemilu Tahun 2019, PKS menjadikan Achmad Dimiyati Natakusumah, mantan anggota DPR RI fraksi PPP (2009–2019) yang juga mantan Bupati Pandegelang (2000–2009, dua periode) selama ini kerap diisukan dengan berbagai tindakan suap, korupsi, dan kriminal lainnya sebagai anggota DPR RI dari PKS.

Praktik-praktik pragmatisasi *patron-klien* yang bersifat anomali tersebut dengan mudah diamini dan dipatuhi oleh setiap kader ketika ia dibaluti dengan *bayanat* yang disampaikan dengan penuh kelekatan kohesif dan berbagai pembingkai motivasi, seperti “ini demi kemenangan dakwah”, “agar parlemen dan kepala daerah dipimpin oleh mereka yang mendukung dakwah”, “agar parlemen dan daerah dipimpin oleh orang-orang yang mengaji”, atau pun “agar kita tetap bisa berdakwah”, dsb.

Sejak serangkaian pendekatan kohesif dan pembingkai motivasi tersebut dilakukan, dengan mudahnya elite mendapatkan simpati, partisipasi, hingga sumbangan finansial dari para kader akar rumput dan ADK untuk memenangkan calon yang diusungnya. Sebagai contohnya adalah pada masa pencalonan pasangan Ahmad

Heriawan-Dedy Mizwar pada Pilkada Provinsi Jawa Barat Tahun 2013, melalui pembingkai motivasi yang dikemas dalam acara kajian bulanan, dalam waktu singkat TPPRa PKS Tanah Baru Depok berhasil melakukan lelang dan penggalangan dana untuk kampanye pemenangan Aher-Demiz. Di antara para kader yang ikut serta dalam kajian bulanan tersebut, ada kader yang menginfakkan sepeda lipat baru miliknya senilai Rp1.000.000, dan ada juga yang menginfakkan TV monitor flat baru senilai Rp250.000. Selain itu, ada infak 2 Celengan yang berisi koin recehan senilai Rp500.000-an, *microwave*, buku-buku senilai Rp2.000.000, ponsel Nokia, jam tangan, bahkan 3 cincin nikah + 1 giwang (Subhanallah, kader-kader grassroot, 2013). Pada tahun 2012, PKS berhasil mengumpulkan dana sumbangan dari kadernya hingga mencapai Rp300 miliar per tahun (Putra & Ruslan, 2012). Lebih daripada itu, berbagai aktivitas kependuan PKS yang berada di berbagai provinsi di Indonesia yang selalu siap siaga menjadi relawan sosial ketika terjadinya bencana alam juga telah berkontribusi dalam memperkuat hubungan yang bersifat kohesif di antara kader.

Dari serangkaian pendekatan itulah, elite yang memenangkan struktur dan posisi strategis kepemimpinan partai—khususnya bidang kaderisasi, kemahasiswaan, dakwah, dan kependuan— akan dengan mudah menggerakkan akar rumput sesuai dengan instruksi yang diarahkannya⁴⁰. *Murobbi* yang selama ini diimajinasikan sebagai seorang *dai*, pengayom, sekaligus mereka yang sangat berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai ideologis ke akar rumput serta lebih melihat persoalan konflik yang terjadi di level elite dengan menggunakan kacamata Islam dan nilai-nilai kejemaahan dibandingkan dengan kacamata

⁴⁰ Sepanjang tahun 2010–2015, loyalis AM menempati seluruh posisi-posisi strategis di DPP PKS, khususnya departemen kaderisasi, dakwah, dan kemahasiswaan. Namun di era Shohibul Iman, seluruh struktur DPP PKS ditempati oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok ideologis atau faksi keadilan. Kini, Musyafa Ahmad Rahim, eks Ketua Departemen Kaderisasi DPP PKS 2010–2015; Ahmad Zainuddin, eks Ketua Bidang Pembangunan dan Keummatan DPP PKS 2010–2015; Zahfan B. Sampurno, eks Ketua Badan Pemenangan Pilkada DPP PKS 2010–2015; Budiyanto, eks Ketua Badan Hubungan Luar Negeri DPP PKS 2010–2015; dan Ahmad Faradis, eks Ketua Bidang Kependuan DPP PKS 2005–2010 hijrah mendukung GARBI dan membentuk Partai Gelora.

politik. Dengan pendekatan Islam tersebut, selama keputusan elite adalah keputusan yang sudah ditetapkan secara musyawarah antara DPP, Majelis Syura, dan Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS, maka sesuai dengan anjuran Islam, keputusan tersebut haruslah ditaati dan dipatuhi, meskipun sering kali ia bertentangan dengan pandangan setiap individu *murobbi*. Pembauran antara kepentingan politik dengan legitimasi teologis inilah yang menyebabkan *murobbi* serta akar rumput sejatinya tidak memiliki *bargaining position* yang besar dalam menentukan wajah dan arah politik partai.

Kondisi tersebut kian mendapatkan presedennya ketika konflik antara kelompok ideologis dan loyalis AM makin keruh, mengeras, dan terbuka di sepanjang tahun 2015–2018 yang berujung pada pembersihan seluruh loyalis AM dari struktur DPP PKS, banyaknya PAW yang dilakukan oleh elite terhadap anggota DPR RI/DPRD, rotasi, ataupun pemecatan terhadap pimpinan dan kader tingkat daerah yang dianggap sebagai bagian dari loyalis AM, juga yang bergabung ke GARBI dan partai baru loyalis AM, Partai Gelora⁴¹. Selain itu, terjadi pengunduran diri massal pengurus DPW/DPD PKS di berbagai daerah lantaran ketidaksetujuannya dengan instruksi pusat (Gambar 4.4), tetapi elite dengan mudah melakukan *framing* bahwa mereka yang dipecat ataupun mengundurkan diri adalah mereka yang telah terkena virus ide-ide modernisasi AM yang sarat dengan unsur-unsur pragmatis, liberal, dan tidak lagi taat dan sevisi dengan agenda jemaah, dakwah, dan ideologi Ikhwānul Muslimīn⁴².

⁴¹ Secara tersirat, seluruh anggota GARBI telah bertransformasi menjadi anggota Partai Gelora. Hingga saat ini, Partai Gelora sendiri masih mempertahankan beberapa model sistem kepartaian ala PKS, di antaranya sebagai berikut. 1) Ditetapkannya 99 Dewan Pendiri Partai Gelora (95% diantaranya merupakan mantan elite PKS baik di tingkat pusat maupun daerah) yang merupakan replikasi dari 99 Anggota Majelis Syura PKS. Penentuan kuota Dewan Pendiri atau anggota Majelis Syura tersebut terinspirasi dari 99 Asma'ul Husna. 2) Dibentuknya forum kerelawanan Partai Gelora yang menyerupai Pandu Keadilan PKS. Per 1 Juni tahun 2021, Partai Gelora telah memiliki 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) di seluruh Provinsi Indonesia, dengan dengan klain jumlah anggota yang mencapai 200.000 kader.

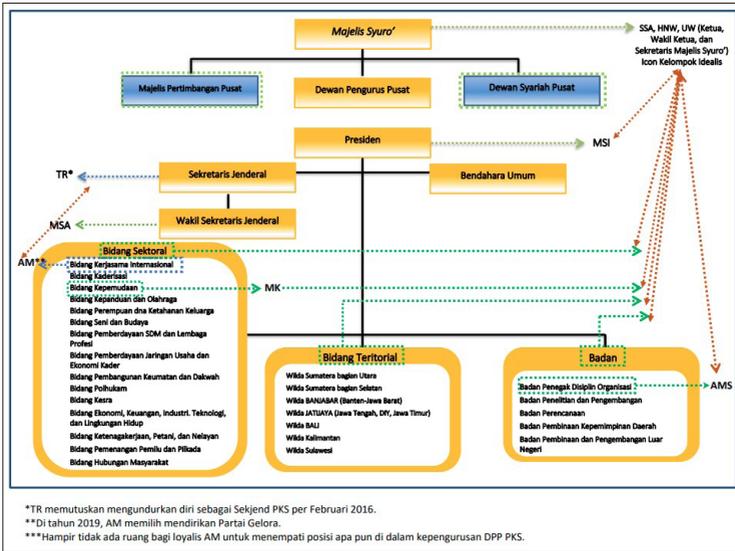
⁴² Adapun kader yang di-PAW dari kursi anggota DPR RI/DPRD, dirotasi, ataupun dipecat sebagai kader karena dianggap sebagai loyalis AM atau karena ketidaksetujuannya dengan instruksi elite di antaranya adalah sebagai berikut:

Secara tersirat, *framing* tersebut secara masif disosialisasikan oleh elite yang dianggap sebagai faksi keadilan—yang kini menguasai seluruh struktur DPP PKS—kepada *murobbi* melalui Surat Edaran Tadzkirah (peringatan) DSP PKS No. 60 1439 H tentang Komitmen (Iltizam) Kepada Jamaah, yang kemudian *tadzkirah* tersebut dirasionalisasikan terhadap *mad'u*. Dengan berbagai *framing* tersebut, tersebar juga instruksi elite DPP PKS dan DPW PKS terhadap akar rumput untuk tidak hadir dalam Deklarasi Pencalonan Presiden AM, kegiatan GARBI, terlebih Partai Gelora, serta memutuskan komunikasi dengan kader yang berafiliasi dengannya. *Framing-framing* ini juga muncul dalam berbagai media seperti kaus dan spanduk (Gambar 4.5). Sebagaimana yang juga pernah dilakukan oleh loyalis AM ketika mereka berkuasa, dengan menggunakan doktrin “*al-Jama'ah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-Jama'ah*”, secara otomatis mereka yang keluar atau dikeluarkan dari partai juga telah keluar dari Jemaah Tarbiyah, serta tidak diwajibkan kembali bagi mereka untuk berkomitmen terhadap *bai'at* gerakan maupun menjalankan kegiatan-kegiatan ideologis dan kejemaahan gerakan Tarbiyah. Loyalis AM yang selama ini juga turut serta melakukan koordinasi dengan gerakan Ikhwānūl Muslimīn di

1) anggota DPR RI: FH, AZ, Rofi Munawwar (RM), dan Mahfudz Siddiq (MS); 2) Ketua DPW/DPD PKS: Ezra Saladin (Sumatra Selatan), Kamal Fauzi (Jawa Tengah), Ahmad Syahdan (Sulawesi Barat), M. Hafez (Sumatra Utara), Mallarangan Tutu (Sulawesi Selatan), Masykur Sarmian (Kalimantan Timur), Imam Ashori (Situbondo), Bahrān Djafar (Pinrang), Ali Muchsin (Blitar), Ambo Upe (Wajo), dsb. Baik rotasi maupun pemecatan terhadap pengurus daerah tidak hanya terjadi pada pucuk kepemimpinan, tetapi juga pengurus daerah yang menyertainya.

Di lain pihak, terdapat juga beberapa pengurus tingkat daerah yang secara berjemaah memutuskan untuk mengundurkan diri, bahkan keluar dari PKS, seperti Pengurus DPW dan DPD PKS se-Bali, DPD PKS Mojokerto, DPD PKS Siduarjo, DPD PKS Bayumas, DPD PKS Langkat, DPD PKS Labuhan Batu, DPD PKS Kota Binjai, dsb. Sebagian besar alasan pengunduran diri kepengurusan PKS secara massal tersebut ditengarai oleh sikap protes mereka terhadap tindakan otoriter DPP PKS yang melakukan pemecatan kader inti secara massal dan instruksi Partai yang menyatakan bahwa setiap bacaleg harus melakukan penandatanganan terhadap Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri/ Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dianggap sangat memberatkan bagi setiap bacaleg.

tingkat global, dengan statusnya yang keluar atau dikeluarkan dari PKS, juga secara otomatis tidak bisa lagi “mendaku” menjadi bagian dari Ikhwānul Muslimin. Gambar 4.6 menunjukkan AM yang berfoto dengan para loyalisnya di partainya yang baru, Partai Gelora.



Sumber: Fachri Adulsyah (2021)

Gambar 4.3 Ikhtisar Konfigurasi Struktur DPP PKS 2015–2020



(a)



(b)

Keterangan: (a) Puluhan kader perempuan PKS Bali, (b) pengurus DPD PKS Binjai. Keduanya secara berjemaah menyatakan diri untuk mundur dari jabatan struktural dan kader Partai. Kini, mayoritas pengurus dan kader PKS Bali bergabung dengan GARBI.

Sumber: (a) Banglulis TV dalam Santika (2018); (b) Kurniawan (2018)

Gambar 4.4 Pengunduran Massal Kepengurusan PKS di Daerah



(a)



(b)

Keterangan: (a) Kaus GARPU yang diduga dibuat oleh kader PKS sebagai sebuah antitesis terhadap GARBI. *Tagline*-nya adalah mendoakan agar kader eks PKS di GARBI segera insaf. (b) Mulai muncul spanduk yang tersebar di berbagai lokasi di Jakarta dan sekitarnya tentang “Bahaya Laten Garbi” dan “PKS Jabodetabek Menolak Garbi”.

Sumber: (a) Garpu (2018); (b) Tim detikcom (2019)

Gambar 4.5 Kontra GARBI



Sumber: Partai Gelora Indonesia Prov. Bali (t.t.)

Gambar 4.6 Baju Baru Wajah Lama: Dari PKS ke Gelora

Sudah barang tentu, kondisi pembauran antara kepentingan-kepentingan politis yang diterjemahkan secara teologis telah mengakibatkan kader PKS di akar rumput sangatlah rentan dengan terjadinya *split* identitas, yang akan selalu terjadi dan mengalami penyesuaian dengan konstruksi hegemoni diskursus elite yang berkuasa saat itu.

B. Dinamika Pembentukan Agen Jamaah: Antara Harapan dan Oligarki

Sebagaimana telah dipaparkan, di dalam gerakan Tarbiyah ataupun PKS, sistem *halaqoh* yang digerakkan oleh *murobbi* memiliki peranan yang sangat sentral dan langsung bersentuhan dengan akar rumput. Hingga tahun 2013, hampir setiap pekan terdapat 200.000 kelompok *halaqoh* yang terlaksana di Indonesia (Sasmita, 2013). Dalam konteks ADK, di tahun yang sama terdapat 3.000 kader ADK UI, 2.000 kader UGM, dan 600 kader ITB yang juga ikut serta dalam kegiatan *halaqoh* pekanan, baik yang diselenggarakan oleh partai maupun oleh struktur ADK itu sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, meskipun sistem kaderisasi ADK tidak secara langsung terhubung dengan agenda kepartaian PKS, tetapi melalui Bidang Gerakan Pemuda dan

Profesi PKS, partai tersebut tetap melakukan monitoring dan pembinaan terhadap sistem kaderisasi yang dijalankan oleh ADK melalui kegiatan *daurah murobbi*—kegiatan pelatihan bagi para *murobbi* ADK. Rasionalisasi PKS untuk tetap melakukan monitoring dan pembinaan terhadap ADK adalah lantaran bagaimanapun juga, ADK merupakan *resources* utama kaderisasi Partai. Lonjakan jumlah kader Tarbiyah/PK(S) yang sejak era Orde Baru hingga tahun 1999 mencapai 60.000 kader dan di tahun 2009 meningkat secara drastis, yaitu 532.803 kader, didominasi oleh (mantan) ADK (Munandar, 2011, 136). Komparasi anggota dan pemilih PKS tahun 1999, 2004, dan 2009 ditunjukkan pada Tabel 4.1.

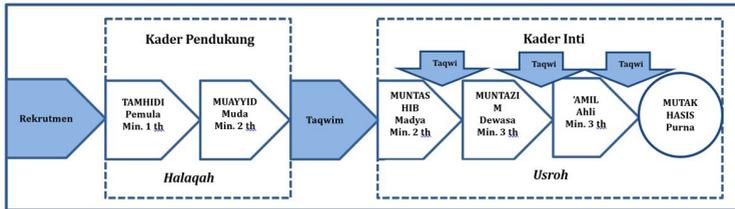
Tabel 4.1 Anggota dan Pemilih PKS tahun 1999, 2004, 2009

Pemilu	Kualifikasi Anggota	Jumlah Anggota	Jumlah Pemilih
1999	Kader Inti	3.000	1.436.565
	Kader Pendukung	57.000	
	Total	60.000	
2004	Kader Inti	21.444	8.325.020
	Kader Pendukung	372.746	
	Total	394.190	
2009	Kader Inti	36.021	8.206.955
	Kader Pendukung	496.782	
	Total	532.803	

Sumber: Data Sekretariat DPP PKS dalam Soekanto (2012)

Sudah barang tentu, dengan adanya kegiatan monitoring dan pembinaan tersebut, kualitas *murobbi*—yang juga merupakan kader tingkat bawah—sangatlah ditentukan oleh kualitas pendidikan dan manajemen SDM yang diterapkan oleh PKS. Pada alur pembinaan takwim kader PKS (diilustrasikan pada Gambar 4.7 dan untuk lebih detailnya ada pada “Lampiran 1: Kriteria dan Level kaderisasi PKS”) dapat dilihat bahwa proses untuk menyelesaikan seluruh jenjang kaderisasi Partai membutuhkan waktu minimal 12 tahun, bergantung

pada terpenuhinya syarat pengangkatan jenjang kaderisasi yang telah diterapkan, seperti telah hafal 1–7 juz Al-Qur’an beserta pemahaman tafsirnya



Sumber: Munandar (2011, 181)

Gambar 4.7 Alur Pembinaan dan Takwim Kader PKS

Sulitnya prasyarat kenaikan jenjang kaderisasi di tengah tidak adanya lembaga yang *firm* dan fokus untuk memfasilitasi setiap kader agar mampu menyelesaikan setiap prasyarat tersebut, serta intensnya agenda politik—baik Pemilu maupun Pilkada—yang sering kali berimplikasi pada penomorduaan *maintenance* kaderisasi yang berkualitas telah mengakibatkan terjadinya jumlah proporsi yang terlalu timpang antara kader pendukung dan kader inti. Di sisi lain, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa melonjaknya jumlah kader PKS tidaklah berkorelasi positif terhadap peningkatan proporsi di setiap jenjang kaderisasi PKS secara signifikan. Hingga tahun 2010, jumlah kader pendukung (*tamhidi* dan *muayyid*) mencapai 92%, sedangkan jumlah kader inti hanyalah 8% dengan proporsi kader ahli dan purna hanya 1 %. Sudah barang tentu, kondisi ketimpangan tersebut secara tidak langsung juga telah berimplikasi pada penguatan oligarki elite. Perkiraan proporsi kader PKS ditunjukkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perkiraan Proporsi Kader PKS Tahun 2010

No.	Jenjang	%	Laki-laki	Perempuan
1	Pemula (<i>Tamhidi</i>)	74%	25%	75%
2	Muda (<i>Muayyid</i>)	18%	50%	50%
3	Kader Pendukung	92%	30%	70%
4	Madya (Muntasib)	3%		
5	Dewasa (Muntazhim)	4%		
6	Ahli dan Purna (Amil & Mutakhasis)	1%	75%	25%
	Kader Inti	8%		
	Jumlah Kader	100%		

Sumber: Munandar (2011, 195)

Secara teoretis, kondisi ketimpangan kaderisasi dan penguatan oligarki elite tersebut juga sangatlah riskan bagi proses regenerasi kualitas elite partai di masa mendatang.

C. *Split* Identitas: Antara Purifikasi vs. Syariatisasi “Kebijakan”

Sebagaimana telah digambarkan pada bab-bab sebelumnya, harus diakui bahwa realitas *split* identitas yang terjadi di kalangan ADK telah berimplikasi pada sikap dan tindakan yang bersifat paradoks antara visi ideologi dan ajaran Islam yang selama ini disemai dengan praksis politik mereka, serta telah berdampak pada terbentuknya berbagai *split* identitas antar-ADK yang saling bersifat dikotomis satu sama lain. Realitas *split* identitas telah melahirkan empat karakter ADK berikut.

- 1) Sekelompok ADK yang lebih berorientasi pada nilai-nilai sinkretisme, yaitu mengedepankan kepatuhan dogmatis ideologi yang dianggapnya sebagai bagian dari konstruksi jati diri “kesalahan” terhadap Islam. Lantaran konstruksi teologis inilah, ADK yang berorientasi pada sinkretisme tanpa perlu berpikir panjang akan selalu mengedepankan kepatuhan terhadap arahan dan instruksi elite, meskipun sering kali arahan tersebut bertentangan dengan

konstruksi nilai dan ajaran Islam yang selama ini mereka yakini. Sebagai salah satu contohnya adalah tentang ADK—baik Ikhwān maupun *akhwat*—yang ikut serta mendukung koalisi muslim-nonmuslim ataupun nonmuslim-muslim. Pada 57 pilkada sepanjang tahun 2008, pilwako Surabaya dan Solo tahun 2010, serta pilgub Papua Barat tahun 2017, ADK meramaikan sekaligus menjadi panitia penyelenggara kampanye yang menghadirkan pedangdut ketika masa kampanye berlangsung. Keikutsertaan para kader terdokumentasikan video dan vlog yang sedikit erotis. Selain itu, mereka melakukan pembenaran-pembenaran terhadap tindakan *money politics* semasa pemilu/pilkada yang terjadi di beberapa daerah di Jawa dan Sumatra yang sejatinya bertentangan baik dengan konstruksi *siyasah* Islam maupun peraturan Bawaslu.

- 2) Mereka yang berorientasi pada akses-akses politik yang bersifat oportunistis, yang memanfaatkan bahasa dan legitimasi ideologis guna memenuhi hasrat kepentingan ekonomi-politik pribadi. Kecenderungan dari ADK yang mengedepankan sisi-sisi oportunistis tersebut adalah mereka secara sadar memahami bahwa banyak kebijakan yang dibentuk oleh elite bertentangan dengan visi ideologi Tarbiyah yang selama ini diajarkan, tetapi mereka cenderung mencoba mengabaikan berbagai deviasi ideologi tersebut serta tetap memanfaatkan “ketaatan” yang dilakukan olehnya untuk bisa mendapatkan jabatan-jabatan strategis tertentu. Salah satu contoh daripada tipologi ini adalah beberapa aktivis KAMMI atau mantan aktivis kampus yang mencoba mempertahankan “ketaatannya” sekaligus menjaga hubungan *parton-klien* dengan elite dengan harapan agar bisa memanfaatkan sel atau jejaring PKS di level institusi negara guna mendapatkan proyek atau pun keuntungan ekonomi tertentu, serta dicalonkan sebagai calon anggota legislatif ataupun ditunjuk sebagai tenaga ahli DPR/DPRD. Di sisi lain, baik elite keadilan dan kesejahteraan juga selalu menjaga hubungan *patron-klien* tersebut guna melakukan infiltrasi terhadap institusi yang dianggap strategis, salah satunya adalah dengan KAMMI. Selama ini, baik loyalis AM maupun

mereka yang terasosiasi ke dalam kelompok ideologis Partai, secara tertutup mencoba mengusung calon Ketua Pengurus Pusat (PP) KAMMI pada Mukhtar Nasional yang selalu diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Infiltrasi tersebut sering kali mengakibatkan terjadinya berbagai mobilisasi massa, saling melakukan klaim sebagai “pilihan DPP PKS”, sekaligus berimplikasi pada terjadinya konflik antarpatron elite yang ikut serta menjadi peserta muktamar tersebut. Salah satu contoh klimaks dari konflik yang diakibatkan oleh infiltrasi elite terjadi pada Mukhtar VII dan Mukhtar VIII ketika Fikri Azis selaku sosok yang dijagokan oleh loyalis AM terpaksa harus disingkirkan karena dianggap telah melakukan *money politics* dan telah melakukan kesalahan fatal karena ikut serta dalam Deklarasi Megawati-Prabowo pada Pilpres tahun 2009 silam.

- 3) Mereka yang mengedepankan sikap-sikap *critical*, yang secara kritis melakukan kritik terhadap konstruksi-konstruksi dogmatis yang dikembangkan oleh elite baik dengan menggunakan perspektif Islam maupun Barat. Kecenderungan ADK yang mengedepankan cara pandang kritis ialah mereka selalu dieksklusi oleh kelompok sinkretis dan oportunistis lantaran dianggap sebagai kalangan yang tidak *tsiqoh* terhadap keputusan Jamaah yang semestinya harus diyakini dan dihormati. Sebagian besar partisipan ADK yang mengedepankan cara pandang kritis tetap memilih bertahan untuk tetap di dalam gerakan Tarbiyah dengan segala konsekuensinya, dan sebagian yang lain memilih untuk keluar dari PKS dan bergabung ke gerakan kiri, nasionalis-sekuler atau gerakan Islam lain, yaitu Muhammadiyah, Salafi, dan berbagai komunitas Islam populis.
- 4) Mereka yang memilih “hati-hati” dan tidak mudah mengambil sikap dalam memahami kondisi moderasi dan pertarungan faksi yang terjadi di internal partai dengan cara melakukan *engagement* aktivisme partai di satu sisi dan mengambil jarak terhadapnya di sisi lain. Kelompok ADK yang memilih sikap ini cenderung didominasi oleh mereka yang lebih bergelut dengan dunia *socio-*

entrepreneur, lebih aktif dalam kegiatan akademik dan kelompok studi dibandingkan aktif dalam kegiatan politik kepartaian. Di sisi lain, mereka juga lebih berorientasi dalam membangun relasi di luar gerakan Tarbiyah.

Jika ditelisik lebih lanjut, kelompok ADK yang berorientasi pada nilai-nilai sinkretisme merupakan kelompok mayoritas dan dominan. Di kampus-kampus besar seperti UI, UGM, dan ITB, kelompok yang mengedepankan nilai-nilai sinkretisme berada di garda terdepan dalam menjalankan aktivitas dakwah gerakan Tarbiyah sekaligus menjadi mesin mobilisasi yang menyuburkan kepentingan elite di tingkat akar rumput. Di sisi lain, baik kelompok oportunistis, kritis, maupun “hati-hati” adalah kelompok minoritas. Yang membedakan ialah, kelompok oportunistis, selain mereka lebih mampu beradaptasi dan mampu mengambil mencari kesempatan ekonomi politik dalam setiap perubahan dan dinamika gerakan, mereka juga mampu terlibat dalam menentukan arah dan kebijakan dakwah dan politik ADK. Kondisi ini berbeda dengan kelompok yang cenderung kritis dan bersikap “hati-hati”, yang cenderung tidak memiliki akses apa pun dalam menentukan arah dan kebijakan dakwah dan politik ADK, serta menjadi kelompok yang secara struktural cenderung “terabaikan”, baik di lingkungan elite ADK maupun elite Partai sendiri.

Di saat konflik elite berbuntut pada perpecahan antara PKS vs. Gelora, pandangan politik ADK dan alumninya pun mulai mengalami pembelahan, baik mereka yang lebih memilih tetap setia pada PKS maupun beralih kepada Gelora. Dengan bergabungnya sebagian ADK dan alumni ke dalam Gelora, hal tersebut tentu memiliki konsekuensi terhadap tertutupnya segala akses-akses ideologi, sosial, ekonomi, maupun politik gerakan Tarbiyah yang selama ini mereka miliki.

Secara garis besar, baik ADK maupun alumni yang berpegang teguh pada nilai-nilai sinkretisme, mereka tetap berpegang teguh untuk menyuarakan “loyalitas terhadap Jamaah” sekaligus melakukan eksklusivitas terhadap ADK dan alumni yang lebih memilih merapat dengan Gelora sembari mengampanyekan bahwa Gelora merupakan

kelompok “pembangkang” dan “liberal” yang wajib dijauhi oleh ADK lain.

Di sisi lain, sejak beberapa tahun silam, kelompok ADK dan alumni yang berorientasi pada nilai-nilai oportunistik mencoba memanfaatkan momentum perpecahan tersebut untuk makin merapat kepada PKS ataupun merapat kepada Gelora, tergantung pada besaran keuntungan akses kuasa yang akan diperoleh dari dua partai tersebut. Sebagian yang lain dari kelompok oportunis memilih untuk secara langsung “hijrah” dari PKS menuju partai-partai politik yang berkoalisi dengan rezim Jokowi. Hal tersebut terlihat dari beberapa mantan petinggi BEM maupun KM baik di UI maupun ITB yang selama ini melekat dengan ikon “kader Tarbiyah” justru memilih bergabung ke dalam “partai rezim”. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi dengan banyaknya mantan atau pun pengurus PP KAMMI yang lebih memilih bergabung dengan partai-partai politik lain seperti PAN, PKB, ataupun Golkar lantaran partai-partai tersebut dianggap lebih “menjanjikan” dibandingkan berkarier di PKS yang memiliki jenjang keanggotaan dan karier politik yang membutuhkan waktu terlalu lama. Pada sisi inilah, KAMMI yang selama ini diasosiasikan sebagai kepanjangan tangan elite politik PKS *an sich* menjadi lebih beragam, yaitu proses-proses negosiasi dan politik di tubuh KAMMI mulai lebih dibumbui oleh banyak kepentingan dari berbagai partai politik, terlebih di saat banyaknya mantan dan pengurus KAMMI yang justru bergabung ke dalam barisan Gelora, yang terus-menerus mencoba menginfiltrasi dan mengambil alih kekuasaan baik di level kepengurusan maupun organisasi alumni KAMMI. Dalam konteks ADK dan alumni, baik yang berorientasi pada nilai-nilai kritis maupun mereka yang lebih “berhati-hati” dalam menentukan sikap, adanya pembelahan politik yang terjadi di tubuh PKS makin mengukuhkan mereka untuk makin berjarak dengan kegiatan politik praktis dan lebih memilih bergabung ke dalam dunia profesionalisme, organisasi pemberdayaan, ataupun gerakan Islam alternatif lainnya, sekaligus mencari “penghidupan” ekonomi di luar dari organisasi atau lembaga yang berafiliasi dengan PKS dan gerakan Tarbiyah itu sendiri, yaitu sekolah, lembaga filantropi, pondok pesantren, dan yang lainnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan

BAB 5

MENEROPONG MASA DEPAN GERAKAN TARBIYAH DI INDONESIA

PKS sebagai sebuah partai yang tumbuh dan berkembang dari gerakan dakwah telah banyak memberikan warna dan corak terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia. Trajektori, konsolidasi, serta resistensi yang terdapat di dalamnya terus menjadi daya tarik tersendiri bagi para cendekiawan gerakan Islam untuk menelaahnya lebih jauh. Penelaahan dalam buku ini, menggabungkan dua objek antara elite dan akar rumput, telah memberikan sebuah temuan baru bahwa hegemoni diskursus yang dibentuk oleh elite tidak hanya dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk melakukan mobilisasi akar rumput *an sich*, melainkan lebih jauh daripada itu, ia juga digunakan untuk melegitimasi dominasi struktur sekaligus “pemberangusan” terhadap aktor yang berposisi dengannya sekaligus untuk mengukuhkan jejaring *patron-client* yang tengah dibentuk oleh mereka yang mendapatkan kuasa.

Tentunya, dinamika pertarungan diskursus yang terjadi di level elite seakan juga tereplikasi dalam kehidupan sosial-politik gerakan Tarbiyah di level kampus. Realitas kontestasi narasi antarelite telah berimplikasi pada terjadinya *split* antara diskursus ideologi dengan politik praktis yang juga mengakibatkan terjadinya *split* identitas bagi ADK. Lebih jauh, terjadinya *split* identitas yang terjadi di akar rumput juga memiliki implikasi terhadap proses pengaderan, regenerasi, sekaligus penerimaan publik terhadap PKS di masa mendatang.

Dalam konteks akademik, buku ini memformulasikan teori dan kerangka analisis baru dalam memahami fenomena gerakan Tarbiyah di Indonesia. Setidaknya, terdapat tiga pendekatan teoretis dan kerangka analisis baru yang dihadirkan dalam buku ini, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pendekatan sosio-historis dalam buku ini mencoba memberikan kontribusi ilmiah untuk menjelaskan kerangka sejarah terbentuknya gerakan Tarbiyah dan PKS dilihat dari sudut yang bersifat trajektoris, tetapi tidak lupa untuk melakukan analisis terhadap suatu hal yang bersifat kronologis dan behavioralistik di dalamnya.
- 2) Pembacaan melalui pendekatan sosio-antropologis PKS diharapkan mampu memberikan perspektif baru terhadap kajian gerakan Islam dalam memetakan pertarungan antaraktor dan diskursus, serta implikasinya terhadap realitas sinkronis dan diakronis ideologi dan praksis gerakannya.
- 3) Penggabungan objek penelitian antara PKS sebagai sebuah institusi partai dengan ADK diharapkan mampu mengisi ruang kosong terhadap berbagai literatur-literatur politik Islam terbarukan yang lebih banyak berorientasi pada subjek elite, tetapi melupakan implikasinya terhadap objek massa.

Problematisasi “elite” dan implikasi “massa” telah memberikan ruang bagi kita untuk bertanya, *ke arah manakah masa depan politik dan dakwah gerakan Tarbiyah akan melaju?* Secara sosiologis dan historis, dalam konteks eksternal, perkembangan gerakan Tarbiyah turut bergantung pada “keterbukaan” dan “ketertutupan” struktur kesempatan politik rezim penguasa negara. Di sisi lain, secara internal, perkembangan gerakan Tarbiyah juga sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik kepentingan antarelite di lingkup kepengurusan partai politik. Ini telah menjadi fondasi terpenting dalam menentukan “narasi hegemonik” dan praksis politik massa, yang acapkali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ideologis yang dianut mereka. Berangkat dari hal inilah, selama gerakan dan partai politik bermuara

pada demokrasi dan kuasa negara, fenomena *split* identitas di tubuh massa—yang ditunjukkan oleh adanya dualisme narasi dan praksis antara “*pragmatisme* politik” dan “*idealisme* ideologi”—adalah suatu hal yang sepatutnya dimafhumi dan tidak dapat “dibendung”. Justru sebaliknya, pembendungan yang berlebihan, baik terhadap “*pragmatisme*” maupun “*idealisme*”, hanya akan melahirkan kontradiksi sosial yang akut, yang mengakibatkan terjadinya turbulensi konflik dan perpecahan antarmassa yang membesar.

Setidaknya, kondisi inilah yang terjadi di dalam dinamika sosial politik gerakan Tarbiyah dan PKS yang terjadi selama lebih dari satu dekade hingga hari ini. Keinginan antarfaksi untuk mendominasi struktur kepengurusan di tingkat pusat telah bermuara pada terjadinya perpecahan yang signifikan di tubuh massa. Apa yang menjadi harapan dari penguatan gerakan dakwah dan politik massa melalui misi “*penyeragaman*”, justru yang terjadi ialah sebaliknya, anomali-anomali dan pelemahan-pelemahan konsolidasi dakwah dan gerakan massa terlebih di tingkat ADK menjadi suatu hal yang niscaya.

Oleh karena itu, sekali lagi, jika pertanyaan yang diajukan ialah *ke arah manakah masa depan politik dan dakwah gerakan dakwah Tarbiyah akan melaju?* Hal tersebut akan sangat ditentukan oleh sejauh mana gerakan tersebut memanfaatkan “ketertutupan” atau pun “keterbukaan” struktur kesempatan politik rezim penguasa, sekaligus sejauh mana ia mampu mengonsolidasikan realitas “*pragmatisme*” dan “*idealisme*” dalam berdemokrasi yang tidak akan pernah padam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaza, M. (1999). *Pendidikan Islam dan pergeseran orientasi: Studi kasus alumni Al-Azhar*. Penerbit LP3ES.
- Abdullah, T., & Siddique, S. (ed). (1989). *Tradisi dan kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Penerbit LP3ES.
- Abdulrahim, M. 'I. (2002). *Islam sistem nilai terpadu*. Gema Insani Press.
- Abuza, Z. (2007). *Political Islam and violence in Indonesia*. Routledge.
- Ahmad, N. (2011). *Etika Jama'ah: Telaah evaluatif kedisiplinan terhadap rambu-rambu jama'ah dakwah*. Media Insani.
- Aidulsyah, F. (2015). *Membaca dinamika ideologi Partai Keadilan Sejahtera: Studi genealogis terhadap perubahan dan tantangan aktivis dakwah kampus di setiap mihwar Jama'ah Tarbiyah* [Skripsi]. Universitas Gadjah Mada.
- Ali, A. S. (2012). *Ideologi gerakan pasca-Reformasi*. Penerbit LP3ES.
- Aliansi Mahasiswa Independen UGM. (2013). *Aksi 21 Mei 2013 BEM SI: Aliansi Mahasiswa Independen UGM tanggal 26 Mei 2013* [Siaran pers].
- Amirullah. (2013, 16 Juni). Dosen UI pengkritik korupsi jadi tersangka. *Tempo*. <https://nasional.tempo.co/read/488642/dosen-ui-pengkritik-korupsi-jadi-tersangka>
- Aktivis 98 dan BEM SI Dukung Prabowo-Hatta. (2014, 16 Juni). *Inilah*. <https://www.inilah.com/aktivis-98-dan-bem-si-dukung-prabowo-hatta>

- Armando, A. (2012, 29 Januari). Bungkamnya BEM-BEM UI: Tak peduli, pengecut atau dikadali? *adearmando wordpress*. <https://adearmando.wordpress.com/2012/01/29/bungkamnya-bem-bem-ui-tak-peduli-pengecut-atau-dikadali/>
- Armando, A. (2012, 4 Maret). BEM-BEM di UI segera bertindak; rektor dan para kacungnya gagal! *adearmando wordpress*. <https://adearmando.wordpress.com/2012/03/04/bem-bem-di-ui-segera-bertindak-rektor-dan-para-kacungnya-gagal/>
- Arrobi, M. Z. (2020). *Islamisme ala kaum muda kampus: Dinamika aktivisme mahasiswa Islam di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia di era pasca-Suharto*. Gadjah Mada University Press.
- Ashiddiqie, J. (ed). (2002). *Bang 'Imad: Pemikiran dan gerakan dakwahnya*. Gema Insani Press.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Aspinall, E. (2013). A nation in fragments: Patronage and neoliberalism in contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, 45(1), 27–54.
- Azra, A. (2005). *Jaringan ulama timur tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII*. Kencana.
- Bachtiar, T. A. (2011). *Lajur-lajur pemikiran Islam: Kilasan pergulatan intelektual Islam di Indonesia*. Komunitas Nuun.
- Barton, G. (1999). *Gagasan Islam liberal di Indonesia*. Paramadina.
- Bayat, A. (2005). Islamism and Social Movement Theory. *Third World Quarterly*, 26(6), 891–908.
- BEM KM UGM. (2012, 4 Maret). *Pengunduran BEM KM UGM dari Aliansi BEM seluruh Indonesia* [Siaran Pers].
- Bila Anis Matta dan Hatta datang awal Mei ini, KM ITB jamin akan bergerak. (2014, 21 April). *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-2560446/bila-anis-matta-dan-hatta-datang-awal-mei-ini-km-itb-jamin-akan-bergerak>
- Boland, B. J. (1982). *The struggle of Islam in modern Indonesia*. Martinus Nijhoff.
- Brocker, M., & Künkler, M. (2013). Religious parties: Revisiting the inclusion-moderation hypothesis 1-Introduction. *Party Politics*, 19(2), 171–186.

- Bubalo, A., Fealy, G., & Mason W. (2008). *Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia, and Turkey*. Lowy Institute for International Policy.
- Buehler, M. (2012). Revisiting the Inclusion-Moderation Thesis in the context of decentralized institutions: The behavior of Indonesia's Prosperous Justice Party in national and local politics. *Party Politics*, 19(2), 210–229.
- Damanik, A. S. (2002). *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Penerbit Teraju.
- Dituding anggota teroris internasional isteri Tamsil Linrung minta surat kelakuan baik ke Polda. (2002, 1 April). *Gatra*. <http://arsip.gatra.com/2002-04-01/artikel.php?id=16550>
- Effendy, B. (2011). *Islam dan Negara: Transformasi gagasan dan praktik politik Islam di Indonesia*. Democracy Project.
- Fealy, G. (2008). Consuming Islam: Commodified religion and aspirational pietism in contemporary Indonesia. Dalam G. Fealy & S. White (Ed.), *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies-ISEAS.
- Fealy, G., & Bubalo, A. (2007). *Jejak kafilah: Pengaruh radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Lowy Institute for International Policy; Mizan.
- Fealy, G., & Platzdasch, B. (2005). The Masyumi legacy: Between Islamist idealism and political exigency. *Studia Islamika*, 12(1).
- Feillard, A., & Madinier, R. (2011). *The end of innocence? Indonesian Islam and the temptations of radicalism*. KITLV Press.
- Foucault, M. (1977). Nietzsche, genealogy, history. Dalam D. F. Bouchard (Ed), *Language, counter-memory, practice: Selected essays and interviews*. Cornell University Press.
- Gamais ITB. (2007). *Blue print Keluarga Mahasiswa Islam Institut Teknologi Bandung* [Buku Saku Organisasi]. GAMAIS ITB.
- Gamais ITB. (2014, 23 April). *Klarifikasi acara Islamic Leadership Festival (ILF): Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) ITB* [Siaran Pers].
- Garpu. (2018, 15 Desember). Group GARPU [Foto Profil]. *Facebook*. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=305914543383985&set=pb.100072313059296.-2207520000>.
- Gold, D. (2003). *Hatred's Kingdom: How Saudi Arabia supports the new global terrorism*. Regnery Publishing.

- Hamayotsu, K. (2011). The political rise of the Prosperous Justice Party in Post-Authoritarian Indonesia: Examining the political economy of Islamist mobilization in a muslim democracy. *Asian Survey*, 51(5), 971–992.
- Hamayotsu, K. (2013). Bringing clientelism and institutions back in: The rise and fall of religious parties in Indonesia's electoral democracy. Dalam D. Tomsa, & A. Ufen (Ed.), *Party politics in Southeast Asia: Clientelism and electoral competition in Indonesia, Thailand and the Philippines*. Routledge.
- Hamzah, A. (2013, 21 Mei). BEM SI bawa pocong ke KPK [Foto]. *Aktual*. <https://aktual.com/185349bem-si-bawa-pocong-ke-kpk/>
- Haryadi. (2010). *Islamic popular culture and the new identity of Indonesian Muslim youths* [Paper Presentasi]. *The 18th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Adelaide, 5–8 July 2010*.
- Hasan, N. (2008). *Laskar Jihad: Islam, militansi, dan pencarian identitas pasca-Orde Baru*. Penerbit LP3ES.
- Hasan, N. (2009). Islamist party, electoral politics and da'wa mobilization among youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *RSIS Working Paper*. S. Rajaratnam School of International Studies.
- Hasan, N. (2012). Islamist party, electoral politics and da'wah mobilization among youth: The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*,6(1).
- Hefner, R. W. (1997). *Islamization and democratization in Indonesia*. Dalam R. W. Hefner dan Horvatich, P. (Ed.). *Islam in an era of nation-states: politics and religious renewal in Muslim Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslim and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hidayat, S. (2012). *Managing moderation: The AKP in Turkey and the PKS in Indonesia* [Disertasi Ph.D.]. University of Exeter.
- Hisyam, U., Nursaiful, A., & Sharudi. (2012). *Sepanjang Jalan Dakwah Tifatul Sembiring*. Dharmapena Citra Media.
- House, K. E. (2012). *On Saudi Arabia: Its people, past, religion, fault lines and future*. Alfred A. Knopf.
- Husaini, A. (2012). *Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam*. Gema Insani Press.

- Hwang, J. C. (2010). When parties swing: Islamist parties and institutional moderation in Malaysia and Indonesia. *South East Asia Research*, 18(4), 635–674.
- Irhamisyah, F. (2010). *Peranan K.H. Rahmat Abdullah dalam gerakan Tarbiyah Di Indonesia 1972-2001* [Skripsi]. Universitas Negeri Jakarta.
- Jenkins, D. (2010). *Soeharto dan barisan jenderal ORBA: Rezim Militer Indonesia 1975–1983*. Komunitas Bambu.
- Jonasson, A-K. (2004). *At the command of God? On the political linkage of Islamist parties*. Department of Political Science Goeteborg University.
- Jones, T. C. (2006). Rebellion on the Saudi periphery: Modernity, marginalization, and the Shi'a uprising of 1979. *International Journal of Middle East Studies*, 38(2).
- Kalyvas, S. N. (1998). Democracy and religious politics: Evidence from Belgium. *Comparative Political Studies*, 31(3), 292–320.
- KAMMI. (2021). Tentang KAMMI. *Kammi*. <https://www.kammi.id/website/organisasi/detail/4-tentang-kammi>
- Kersten, C. (2009). Indonesia's new Muslim intellectuals. *Religion Compass*, 3(6), 971–985.
- Kersten, C. (2015). *Islam in Indonesia: The contest for society, ideas and values*. Oxford University Press.
- Kersten, C. (2017). *A history of Islam in Indonesia: Unity in diversity*. Edinburgh University Press.
- KM-ITB Murni atau Kader PKS?? [Pos utas] (2014, 18 April). *detikForum*. <https://forum.detik.com/km-itb-murni-atau-kader-pks-t926990.html>
- KM ITB. (2014, 18 April). *Tolak Politisasi Kampus, 17 April 2014* [Siaran pers].
- Kurniawan, D. (2018, 20 Oktober). Kader menangis saat buka seragam PKS (Partai Keadilan Sejahtera), pilih mundur karena tidak sejalan [Foto]. *Tribunnews*. <https://medan.tribunnews.com/2018/10/20/kader-menangis-saat-buka-seragam-partai-keadilan-sejahtera-pilih-mundur-karena-tidak-sejalan?page=all>
- Kurzman, C., & Naqvi, S. I. H. (2010). Do Muslims vote Islamic? *Journal of Democracy*, 21(2), 50–63.
- Lacey, R. (2009). *Inside the Kingdom: Kings, clerics, terrorists, modernists, and the struggle for Saudi Arabia*. Viking Penguin.

- Latif, Y. (2012). *Inteligensia Muslim dan kuasa: Genealogi inteligensia Muslim abad ke-20*. Penerbit Mizan.
- Liddle, R. W. (1996). The Islamic turn in Indonesia: A political explanation. *Journal of Asian Studies*, 55(3).
- Machmudi, Y. (2008). *Islamising Indonesia: The rise of Jama'ah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)*. ANU E-Press.
- Machmudi, Y. (2013, 7–13 Februari). Lemak-lemak PKS. *Sindo Weekly*, 49(1).
- McAdam, D., McCharty, J. D., & Zald, M. N. (Ed.). (1996). *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings*. Cambridge University Press.
- Menchik, J. (2016). *Crafting Indonesian democracy: Inclusion-moderation and the sacralizing of the postcolonial state*. Dalam A. Stepan (Ed), *Forthcoming in Islam and democracy in comparative perspective*. Columbia University Press.
- Menchik, J. (2018). Beyond secular democracy: Religion, politics, and modernity (invited review essay). *International Studies Review*, 0, 1–19.
- Meuleman, J. (2011). Dakwah, competition for authority, and development. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 167(2-3).
- Mitchell, R. P. (2005). *Ikhwānūl Muslimun dalam masyarakat Barat*. Era Intermedia.
- MPP PKS. (2009). *Falsafah dasa perjuangan dan platform kebijakan pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera.
- Mubarak, M. Z. (2008). *Genealogi Islam radikal di Indonesia: Gerakan, pemikiran dan prospek demokrasi*. Penerbit LP3ES.
- Muhtadi, B. (2012). *Dilema PKS: Suara dan syariah*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Muhyiddin, M. (2014, 1 Juli). Aksi kubu Prabowo di UGM dianggap dompleng. *Tempo*. <https://pemilu.tempo.co/read/589435/aksi-kubu-prabowo-di-ugm-dianggap-dompleng>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa rakyat: Analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan Presiden Indonesia pasca-Orde Baru*. Mizan Publika.

- Munandar, A. (2011). *Antara jamaah dan partai politik: Dinamika habitus kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam arena politik Indonesia pasca Pemilu 2004* [Disertasi Ph.D.]. Universitas Indonesia.
- Munip, A. (2008). Perkuliahan Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi negeri. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, V(1).
- Noer, D. (1996). *Gerakan Islam modern di Indonesia 1900–1942*. Penerbit LP3ES.
- Noor, F. (2006). *Moderate Islamic fundamentalism in Indonesia: A study of political thinking and behaviour of The Prosperous Justice Party (PKS), 1998–2005* [Tesis]. Australian National University.
- Noor, F. (2012). *Institutionalising Islamic political parties in Indonesia: A study of internal fragmentation and cohesion in the post-Soeharto era (1998–2008)* [Disertasi Ph.D.]. University of Exeter.
- Noor, F. (2015). *Perpecahan dan soliditas partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di dekade awal Reformasi*. LIPI Press.
- Nurdiyanto, E. (2014, 25 Maret). Foto Selusin PKS [Dokumentasi Foto]. Diakses pada 27 Januari 2015, dari <https://relawanpkfoto.net>
- Partai Gelora Indonesia Prov. Bali. (t.t.). Partai Gelora deklarasikan, siap berlaga di Pemilu 2024. *Gelorabali*. <https://gelorabali.id/partai-gelora-deklarasikan-siap-berlaga-di-pemilu-2024/>
- Permata, A. N. (2008). Ideology, institutions, political actions: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal of ASIEN* 109 (Oktober 2008), S. 22-36.
- Permata, A. N. (2010). The Prosperous Justice Party (PKS) and the decline of political Islam in the 2009 Election in Indonesia. Dalam R. Medinier (Ed.), *Islam and the 2009 Indonesian Elections, political and cultural issues: The case of the Prosperous Justice Party (PKS)*. Irasec.
- Platzdasch, B. (2009). Islamism in Indonesia: Politics in the emerging democracy. *Institute of Southeast Asian Studies-ISEAS*.
- Porter, D. J. (2002). *Managing politics and Islam in Indonesia*. Routledge Curzon.
- Pringle, R. (2010). *Understanding Islam in Indonesia: Politics and diversity*. University of Hawai'i Press.

- Putra, E. P., & Ruslan, H. (2012, 18 Maret). Wow, dana amal PKS setahun capai Rp300 miliar. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/03/18/m12wql-wow-dana-amal-pks-setahun-capai-rp-300-miliar>
- Rahmat, M. I. (2003). *Transmisi gerakan revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia 1980–2002: Studi atas gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia* [Tesis]. Universitas Indonesia.
- Rahmat, M. I. (2008). *Ideologi politik PKS: Dari masjid kampus ke gedung parlemen*. Penerbit LkiS.
- Ramadan, T. (2012). *Islam and the Arab awakening*. Oxford University Press.
- Rastika, I. (2013, 21 Mei). BEM SI lakukan aksi demo di KPK. *Kompas*. <https://tekno.kompas.com/read/2013/05/21/15443838/bem.si.lakukan.aksi.demo.di.kpk>
- Ricklefs, M. C. (2013). *Mengislamkan Jawa: Sejarah islamisasi di Jawa dan penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*. Serambi.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of market*. Routledge Curzon.
- Rosyad, R. (2006). *A quest for true Islam: A study of the Islamic resurgence movement among the youth in Bandung, Indonesia*. ANU E-Press.
- Roy, O. (1994). *The failure of political Islam*. Harvard University Press.
- Ruslan, H. (2014, 31 Januari). 10 Tahun JSIT Indonesia bangun pendidikan lewat SIT. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/01/31/n08dcm-10-tahun-jsit-indo%20nesia-bangun-pendidikan-lewat-sit>
- Salman. (2006). The Tarbiyah movement: Why people join this Indonesian contemporary Islamic movement. *Studia Islamika*, 13(2).
- Sánchez-Cuenca, I. (2004). Party moderation and politicians' ideological rigidity. *Party Politics*, 10(3), 325–342.
- Santika, E. F. (2018, 30 September). Sebut DPP Anti-Demokrasi, Pengurus PKS di Bali ramai-ramai mengundurkan diri [Foto]. *Tribunnews*. <https://jakarta.tribunnews.com/2018/09/30/sebut-dpp-anti-demokrasipengurus-pks-di-bali-ramai-ramai-mengundurkan-diri>
- Sasmita, I. (2013, 20 Mei). Mari cari tahu dari mana sumber pendanaan PKS. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/mn36f3/mari-cari-tahu-dari-mana-sumber-pendanaan-pks>

- Sazli, A. F. (2012, 4 Juni). Baliho raksasa kritisi UI [Foto]. *Kabarkampus*. <https://kabarkampus.com/2012/06/baliho-raksasa-kritis-UI/>
- Schwedler, J. (2006). *Faith in moderation: Islamist parties in Jordan and Yemen*. Cambridge University Press.
- Sen, K. & Hill, D. T. (Ed.). (2011). *Politics and the media in twenty-first century Indonesia: Decade of democracy*. Routledge.
- Sera, M. A. [@MardaniAliSeraOfficial]. (2018, 9 Januari). *Mardani Ali Sera - ILC panas Pilkada 2018 - 2019 kami ingin mengganti pemerintah yang sekarang*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=cb7FdVkbAMs>
- Siddiq, M. (2003). *KAMMI dan pergulatan Reformasi: Kiprah politik aktivis dakwah kampus dalam perjuangan demokratisasi di tengah gelombang krisis nasional multidimensi*. Era Intermedia.
- Siswadi, A. (2014, 20 April). Aksi mahasiswa ITB tolak Jokowi tuai kecamatan. <https://nasional.tempo.co/read/571856/aksi-mahasiswa-itb-tolak-jokowi-tuai-kecamatan>
- Siswadi, A. (2014, 19 April). Menolak Jokowi, ini alasan petinggi mahasiswa ITB. *Tempo*. <https://pemilu.tempo.co/read/571786/menolak-jokowi-ini-alasan-petinggi-mahasiswa-itb>
- Soekanto, S. S. (2012). *Pemenang pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia 1999–2009 dan Adelet ve Kalkinma (AKP) di Turki 2002–2007: Studi perbandingan* [Disertasi Ph.D]. Universitas Indonesia.
- Subhanallah, kader-kader grassroot PKS rela 'saweran' demi kemenangan Kang Aher. (2013). *PKS Piyungan*. Diakses pada tanggal 14 Februari 2014, dari <https://www.pkspiyan.org/>
- Sufa, I. G. (2014, 19 April). Tolak Jokowi, mahasiswa ITB undang Anis dan Hatta. *Tempo*. <https://pemilu.tempo.co/read/571708/tolak-jokowi-mahasiswa-itb-undang-anis-dan-hatta>
- Sumandoyo, A. (2018, 18 Juli). Mahfudz Siddiq: “Ada operasi intelejen di PKS”. *Tirto.id*. <https://tirto.id/ada-operasi-intelijen-di-pks-cPIJ>
- Supendi, Y. (2011). *Replik pengadilan: Yusuf Supendi menggugat elite PKS*. Komunitas Bambu.
- Sutrisno, E. D. (2019, 17 Januari). GARBI Anis Matta dicap ‘Haram’, loyalis berkelakar. *detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-4388574/garbi-anis-matta-dicap-haram-loyalis-berkelakar>
- Suyatno. (2013). Sekolah Islam terpadu; Filsafat, ideologi, dan tren baru pendidikan islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, II(2).

- Takariawan, C. (2009). *Menyongsong mihwar daulah: Mempersiapkan kader-kader dakwah menjadi pemimpin negara*. Era Intermedia.
- Takeyh, R. (2009). *Guardians of the revolution: Iran and the world in the Age of the Ayatollahs*. Oxford University Press.
- Tezcür, G. M. (2010). The moderation theory Revisited: The case of Islamic political actors. *Party Politics*, 16(1), 69–88.
- Tim BPPM Balairung UGM. (2010, 10 Juni). Utopia representasi KM UGM. *Majalah Balkon*, 129.
- Tim Buku Tempo. (2011). *Kartosoewirjo: Mimpi negara Islam*. Kepustakaan Gramedia Populer.
- Tim Buku Tempo. (2014). *Rahasia-rahasia Ali Moertopo*. Kepustakaan Gramedia Populer.
- Tim Departemen Kaderisasi DPP Partai Keadilan Sejahtera. (2006). *Profil kader Partai Keadilan Sejahtera*. Syaamil Cipta Media.
- Tim Detikcom. (2019, 17 Januari). Muncul spanduk ‘Garbi Ormas Haram’. *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-4388410/muncul-spanduk-garbi-ormas-haram>
- Tim Forum Peduli Jamaah Shaladuddin. (2005, 4 Mei). *Risalah Tabayyun Forum Peduli Jamaah Shaladuddin: Surat kepercayaan gelanggang* [Siaran pers].
- Tim Gema Insani Press. (2011). *Yoyoh Yusroh: Mutiara yang telah tiada*. Gema Insani Press.
- Tim Suara Mahasiswa UI. (2009). Gerakan politik Tarbiyah di kampus-kampus besar Indonesia. *Majalah Suara Mahasiswa*, 25(XVI).
- Tomsa, D. (2012). Moderating Islamism in Indonesia: Tracing patterns of party change in the Prosperous Justice Party. *Political Research Quarterly*, 65(3), 486–498.
- Tomsa, D. (2018). Parties and party politics in the post-Reformasi era. Dalam R. W. Hefner (Ed.), *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*. Routledge.
- Wahib, A. (1981). *Pergolakan pemikiran Islam: Catatan harian Ahmad Wahib*. LP3ES.
- Wahono, T. (Ed.). (2014, 18 April). KM ITB klarifikasi unjuk rasa menolak Jokowi. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/>

read/2014/04/18/2348260/KM.ITB.Klarifikasi.Unjuk.Rasa.Menolak.
Jokowi

- Waluyo, S. (2005). *Kebangkitan politik dakwah: Konsep dan praktik politik Partai Keadilan Sejahtera di masa transisi*. Harakatuna.
- Watson, C. W. (1994). Muslims and the state in Indonesia. Dalam H. Mutalib dan T. I. Hashmi (Ed.). *Islam, Muslims, and the modern state: Case-studies of Muslims in thirteen countries*. Macmillan Press.
- Wickham, C. R. (2004a). The path to moderation: Strategy and learning in the formation of Egypt's Wasat Party. *Comparative Politics*, 36(2), 205–228.
- Wickham, C. R. (2004b). *Interests, ideas, and islamist outreach in Egypt*. Indiana University Press.
- Wiktorowicz, Q. (Ed). (2012). *Aktivisme Islam: Pendekatan teori gerakan sosial*. Demokrasi Project.
- WIN / AB. (2013, 24 April). Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Beritasatu* <https://www.beritasatu.com/news/109919/partai-keadilan-sejahtera-pks>
- Woodward, M., Amin, A., Rohmaniyah, I., & Lundry, C. (2013). Getting culture: a new path for Indonesia's Islamist Justice and Prosperity party? *Contemporary Islam*, 7(2), 173–189. <https://doi.org/10.1007/s11562-012-0187-x>
- Yusanto, I. (1997, 11 Juni). *LDK: antara visi, misi, dan realitas sejarah perkembangannya* [Presentasi makalah]. FSLDK Wilayah I, Univ. Islam Sumatera Utara (UISU).

LAMPIRAN I
KRITERIA DAN LEVEL KADERISASI PKS

Definisi	Tujuan	Karakteristik	Keterangan
Pemula (<i>Tamhidi</i>)			
Seseorang yang memiliki sifat-sifat terpuji, per- angai Islam asasi, tidak terkotori oleh syirik dan tidak memiliki hubungan dengan institusi yang memusuhi Islam.	1. Memperkenalkan prinsip-prinsip umum Islam, baik agidah, syariah, maupun akhlaq serta mengamalkannya dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para kader wajib mengikuti pelatihan tingkat pertama (Training Orientasi Partai (TOP) 1). TOP 1 merupakan <i>training</i> pemula terdaftar. 2. Setelah mengikuti TOP 1 dan menjadi kader pemula terdaftar, maka jenjang yang harus ditempuh adalah mengikuti aktivitas rutin <i>Halqaah</i> dan Taklim Rutin Kader (TRK). 3. Menghafal 1 juz Al-Qur'an dan memahami tafsirnya. 	Kader pada tingkat <i>Tamhidi</i> ini terdaftar sebagai kader pada tingkat kecamatan (DPC).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Definisi	Tujuan	Karakteristik	Keterangan
<p>Muda (<i>Muayyid</i>)</p> <p>Seorang <i>tamhidi</i> yang mendukung <i>fikrah</i>, memiliki perhatian untuk memperluasnya, memiliki perhatian terhadap permasalahan kaum muslimin secara umum, dan mempelajari sebagian daripada konsep-konsep asasi dakwah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai ilmu-ilmu dan nilai-nilai yang diambil dari Qur'an, sunnah, dan sirah salafush shalih sesuai dengan marhalah-nya. 2. Menanamkan perhatian untuk memperluas fikrah Islam dan perhatian kepada berbagai permasalahan kaum muslimin. 3. Menanamkan kebiasaan untuk indibath (disiplin) dan tidak menyianyikan waktu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban kader Muayyid adalah mengikuti TRK dan melanjutkan materi Rasmul Bayan. 2. Setelah berhasil menempuh TD 1 dan memperoleh rekomendasi dari <i>Murobbi</i> (Instruktur) untuk menjadi Kader Muayyid. 3. Mengikuti Kajian Ilmu Sosial Politik (KISP) 1. 4. Memiliki hafalan 3 Juz Al-Qur'an dan memahami tafsirnya. 5. Tidak disarankan untuk berambisi menjadi pegawai negeri, mengutamakan spesialisasi jangka panjang yang penting dan dinamis. 	<p>Kader tingkatan ini teregistrasi sebagai kader di tingkat kabupaten/kota (DPD).</p>

Buku ini tidak diperjualbelikan

Definisi	Tujuan	Karakteristik	Keterangan
Madya (<i>Muntashib</i>) Seseorang yang memenuhi segala persyaratan muayyid, melaksanakan berbagai tugas dakwah serta membelanya.	1. Memikul tanggung jawab dan tugas kerja-kerja dakwah yang dibebankan kepada pe- serta dengan memperhatikan aspek ketelitian dan itqan (profesionalisme).	1. Kader pada jenjang ini diminta untuk menghasilkan selain dari pekerjaan pokoknya, menanam saham dengan nisbat (proporsi) tertentu dari pemasukannya, dan mengem- bangkan hartanya pada proyek- proyek yang bermanfaat. 2. Memiliki hafalan 5 Juz Al-Qur'an dan memahami tafsirnya.	Kader pada tingkatan ini terdaftar di tingkat kabupaten/kota (DPD).
Dewasa (<i>Muntazhim</i>) <i>Muntashib</i> yang melak- sanakan semua tugas dan beban yang diminta oleh Jamaah Dakwah	1. Berkorban secara maksimal dalam melaksanakan berbagai tugas dan beban yang diminta darinya.		Kader pada tingkatan ini tercatat di tingkat provinsi (DPW).

Buku ini tidak diperjualbelikan

Definisi	Tujuan	Karakteristik	Keterangan
	<p>2. Istifadah (mengambil manfaat) berdasarkan pemahaman, isti'ab (penguasaan), analisis, dan penggalan dari sejarah gerakan dakwah dan berbagai kondisi yang dilaluinya.</p> <p>3. Berkomitmen terhadap berbagai pedoman dan keputusan yang dikeluarkan oleh institusi gerakan dakwah.</p>	<p>3. <i>Murobbi</i>/Naqib berperan dalam merekomendasikan para kadernya untuk dinaikkan ketingkatan kaderisasi selanjutnya atau pun tidak.</p>	
Ahli ('Amil)			
<p>Seorang muntazhimin yang telah memiliki keahlian dan berjanji setia untuk bekerja sesuai dengan nizam asasi (pedoman pokok) gerakan dakwah, serta menggerakkan secara efektif diri dan hartanya.</p>	<p>1. Mengembangkan berbagai kecenderungan dan orientasi positif untuk hal-hal yang menjadi konsekuensi marhalah, baik berupa beban, tanggung jawab, maupun pengorbanan.</p>	<p>1. Kader Ahli harus menekuni bidang yang khusus yang tidak banyak digarap orang lain, serta mengelola lembaga independen seperti yayasan. Kriteria harisun 'ala waqtih (bijak dalam menata waktu) juga sangat memperoleh perhatian.</p>	<p>Kader pada jenjang ini tercatat dan terdaftar dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP).</p>

Definisi	Tujuan	Karakteristik	Keterangan
	<p>2. Menyiapkan dan memberikan keahlian untuk menjadi da'i yang teladan yang mencerminkan dakwah, baik pada aspek pemikiran maupun pengamalan, baik pada dirinya sendiri, maupun dalam rumah tangganya, dengan cara merealisasikan rukun-rukun baitat dan segala hal yang terkandung di dalamnya, yang berupa pokok-pokok, maupun kewajiban-kewajiban.</p> <p>3. Melatih dan memberikan keahlian kepada peserta, serta membekalinya dengan berbagai kemahiran leadership dan manajemen rabbani (yang berorientasi ketuhanan).</p>	<p>2. Kader pada jenjang ini berhasil menyelesaikan semua pelatihan yang disyaratkan dan mengikuti pelatihan di tingkat spesialis. Kader pada jenjang ini memiliki hak menempati posisi-posisi tinggi dan strategis di dalam partai.</p> <p>3. Memiliki hafalan 7 Juz Al-Qur'an dan memahami tafsirnya.</p>	

Buku ini tidak diperjualbelikan

Definisi	Tujuan	Karakteristik	Keterangan
<p>Paripurna (Mutakhasis/Mas'ulin)</p>			
<p>Seorang 'amil yang memiliki keahlian ilmiah dan syar'iyah (syariat Islam), dan keistimewaan untuk memimpin serta melaksanakan beban-beban kepemimpinan itu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai tinggi dan berpengaruh besar untuk berkhidmat kepada gerakan dakwah dengan penuh keikhlasan dan totalitas. 2. Membekali diri dengan berbagai ilmu yang bermanfaat dalam rangka menunaikan amal-amal yang dituntut oleh syariat untuk merealisasikan tujuan-tujuan gerakan dakwah. 3. Mewakafkan kehidupan umum dan khususnya untuk dakwah, dan menyiapkan rumah tangganya untuk itu secara kontinyu dan berkesinambungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader yang berada pada tingkatan pelatihan tertinggi yang merangkum keahlian khusus dalam dakwah dan menyelesaikan semua jenis pelatihan ahli. 	<p>Kader pada jenjang ini terdaftar di Dewan Pimpinan Pusat (DPP).</p>

Buku ini tidak diperjualbelikan

Definisi	Tujuan	Karakteristik	Keterangan
Kader Kehormatan		Kader yang dianggap berjasa sehingga layak diberi tanda kehormatan oleh partai. Mereka tidak perlu melewati jenjang pengka-deran.	Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) memiliki hak untuk menentukan siapa yang pantas menjadi kader kehormatan.

Sumber: Munandar (2011, 177–179) dan Muhtadi (2012)

INDEKS

- ‘aammah*, 63
- Abdi Sumaithi atau Abu Ridho, 41
- Abdul Aziz Abdullah Al-Ammar, 27
- Abdul Hasib Hasan, 31, 41
- Abdul Kahar Muzakkir, 32
- Abdul Karim Zaidan, 33, 56
- Abdullah Said Baharmus, 31, 41, 58
- Abdul Mukti Ali, 34
- Abdul Qodir Audah, 32, 33, 46, 56
- Abraham Samad, 84, 85
- Abu Hasan Ali an-Nadwi, 33, 56
- Abul A’la Al-Maududi, 24, 29, 32, 33, 46, 56
- Abul Hasan Ali An-Nadwi, 24
- Abu Ridho, viii, 23, 33, 41, 45, 55, 56, 57
- Achmad Dimiyati Natakusumah, 14, 123
- Achmad Zaky, 95
- Adah Jaelani, 61
- Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP), 11
- Adang Daradjatun, 14, 115, 123
- Ade Armando, 88, 89, 90
- ADK, xviii, 2, 6, 7, 16, 17, 40, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 82, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141
- ADK UGM, 92, 102, 107, 109

- Adly Fairuz, 123
- Ahmad Faradis, 124
- Ahmad Heriawan, 123
- Ahmad Satori Ismail, 41
- Ahmad Wahib, 34, 152
- Ahmad Zainuddin, 124
- aktivis dakwah kampus (ADK), xviii, 2, 6
- aktivis dakwah kampus permanen (ADKP), 97
- al-'amal al-khidami wa al-ijtima'iy*, 72
- Alamsjah Prawiranegara, 38
- Ali Murtopo, 37, 60, 61
- Al-Irsyad, 2
- Ali Syariati, 29
- Al-'Itishom, 64
- al-Jama'ah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-Jama'ah*, 3, 65, 106, 126
- Al-Majelis al-'Alami li'L-Masaajid (WCM, World Council of Mosques/Dewan Masjid Dunia), 26
- Al-Nadwat al-'Alamiyyah li al-Shahab al-Islami (WAMY, World Assembly of Muslim Youth/Organisasi Pemuda Muslim Dunia), 26
- Al-Washiyah, 2
- amal ad-da'awi wa at-tarbawiy*, 72
- amal al-'ilmi wa al-minhani*, 72
- Andreas Senjaya, 95
- Anis Matta, 14, 81, 87, 114, 119, 144, 151
- Anis Matta Pemimpin Muda (AMPM), 114
- Arah Baru Indonesia (ABI), 114
- Asistensi Agama Islam (AAI), 75
- Asistensi Etika Islam, 75
- Asma Amanina, 94
- Ayatullah Khomeini, 29
- Badan Dakwah Masjid (BDM) Al-Hikmah IKIP Malang, 40
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), viii, 69, 76
- Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM) IPB, 73
- Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), 43, 60
- Badan Koordinasi LDK (BKLDK), 73
- Bank Century, 84, 122
- "Barisan Sakit Hati" (BSH), 112
- bayanat, 116, 123
- BEM Keluarga Mahasiswa UGM (BEM KM UGM), 81
- BEM KM UGM, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 93, 99, 110, 144
- BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), 83

- BEM SI, xiii, 83, 84, 85, 86, 143, 145, 150
- Biro Konsultasi Bahagia Sejahtera (BKKBS) PKS, 121
- Blue Print Dakwah Kampus (BPKD), 72
- Budiyanto, 79, 124
- Corps Dakwah Masjid Syuhada (CDMS), 93
- Daaru Hiro, 94
- Daarush Sholihat, 94
- dakwah da'awiy*, 70
- dakwah ilmy*, 70
- dakwah siyasah*, 70
- dakwah sya'by*, 70
- Dani Anwar, 115
- Danu Muhammad Hasan, 52, 60
- Daud Rasyid, 41, 87
- Daud Rasyid Sitorus, 41
- Dawam Rahardjo, 34
- DDII, viii, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 61, 62, 94
- Dedy Mizwar, 124
- Deklarasi Megawati-Prabowo, 135
- Departemen Agama, 23
- Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), 23
- Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), 70
- Dewan Kerohanian Masjid (DKM) Unpad, 73
- dewan perwakilan mahasiswa (DPM), 95
- Dewan Revolusioner Islam Indonesia, 23
- Didin Hafiduddin, 41, 44
- Din Syamsuddin, 87
- Djohan Effendi, 34
- Emil Salim, 89
- Encep Abdussyakur, 31
- Endang Saifuddin Anshari, 37
- Era Intermedia, 64, 148, 151
- Fahri Hamzah, 105, 106, 116
- Faldo Maldini, 78, 95
- Fauzi Bowo, 115
- FKP, 112, 114, 115, 117
- Forsalamm UGM, 102
- Forum Kader Peduli (FKP), 112
- Forum Remaja Masjid (FRM) UI, 73
- Forum Silaturahmi Mahasiswa Muslim (Forsalamm) UGM, 102
- Forum Studi Islam, 71
- Front Islamique du Salut (FIS), 11
- Front Pembebasan Muslim, 23

- FX Hadi Ruyatmo, 115
- Gadjah Mada Mengajar, 93
- GAMAIS ITB, 73, 75, 82, 87, 103, 145
- Gamal Abdul Nasser, 30
- GARBI, xiii, 79, 106, 114, 124, 125, 126, 128, 129, 151
- Garuda Keadilan (GK), 122
- Gelora, viii, xiii, xviii, 39, 77, 106, 124, 125, 126, 127, 130, 136, 137, 149
- Gema Insani Press, 63, 143, 144, 146, 152
- Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI), 106
- Gerakan KAMMI Mengajar (GKM), 91
- Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan, 74
- Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), 35
- Gerakan Rumah Indah Sehat Mahasiswa (GERISMA), 91
- Gibran Huzaifah, 95
- Goris Mustaqim, 95
- GUMILAR SOMANTRI, 90
- Hai'at Al-Ighatsah al-Islamiyyah al-'Alamiyyah (IIRO), 26
- harakah daawiyah, 2
- Harmoni Amal Titian Ilmu (HATI) ITB, 73
- Harun Nasution, 34
- Hasan Al-Banna, 24, 29, 33, 38, 43, 49, 50, 56, 58, 59
- Hatta Radjasa, 87
- Hidayat Nur Wahid, 41
- Hilmi Aminuddin, viii, 31, 41, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 34
- Hizb Al-Wasat, 11
hizb as-siyasi, 2
- IAIN Syarif Hidayatullah, 34
- Ichlasul Amal, 75
- Ikatan Dai Indonesia (IKADI), 94
- Ikatan Mahasiswa Masyarakat Madani (IM3), 91
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 71
- Ikhwānūl Muslimīn, viii, 13, 14, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 59, 126, 127
- ‘Imaduddin ‘Abdulrahim, 37, 38, 41
- Institut Teknologi Bandung (ITB), xvi, 8
- Isa Anshari, 38

- islahul hukumah*, 65
- Islamic Action Front (IAP), 11
- Islamic Center Al-Muhtadin, 94, 95
- Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI), 38
- Ismail Yusanto, 44, 45, 72
- Jamaah Masjid ARH-UI, 40
- Jamaah Mujahidin IKIP Yogyakarta, 40, 71
- Jamaah Shalahuddin UGM Yogyakarta, 40
- Jamaah Tarbiyah, 1, 2, 3, 7, 53, 54, 58, 61, 126
- Jamaat-i-Islami, 11
- Jamaat Khair, 2
- Jamal al-Din al-Afghani, 20
- Jamiat Al Islami, 29
- Jami'at Islami, 24
- Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT), 64
- Joko Widodo (Jokowi), 115
- Justice and Development Party, 11
- KAMMI Merah, 105
- Karisma ITB, 93
- Kartosuwiryo, 52, 60
- Keluarga Alumni KAMMI (KAKAMMI), 106
- Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) ITB, 40, 87, 145
- Keluarga Mahasiswa Islam (GAMAIS) ITB Bandung, 40
- Keluarga Remaja Islam Salman ITB (Karisma ITB), 93
- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), 70
- K.H. Bustami Darwis, 24
- Kitab Mafahim, 72
- KM ITB, xi, 80, 87, 102, 144, 147, 152
- Komando Jihad, 23, 41, 60, 61
- kristenisasi, 25
- Kuliah Kerja Dakwah (KKD), 91
- Lajnat Birr Al-Islami (CIC, Committee of Islamic Charity/Panitia Derma Islam), 26
- Latihan Mujahid Dakwah, 38, 47
- L.B. Moerdani, 37
- LDK Al-Hurriyyah IPB, 73
- LDK Forum Komunikasi Dakwah Islam Fakultas (FKDF) Unpad, 73
- Lembaga Amal Islam (LAI) Undip Semarang, 40
- Lembaga Dakwah Kampus (LDK), 40, 71
- Lembaga Dakwah (LD), 96

- Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, 37
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), 27
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah Khoiru Ummah, 64
- Lembaga Pengkajian Islam Civitas Universitas Trisakti (Lpisat), 40
- Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT), 115
- Luthfi Hasan Ishaq (LHI), 83
- Madinah, 25, 28, 30, 31, 52, 61
- Mafhudz Siddiq, 116
- Mahfud MD, 87
- Majalah An-Nida, 64
- Majalah Sabili, 63
- Majalah Ummi, 64
- Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), 76
- Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), 61, 160
- Majelis Riqabah 'Ammah (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat), 3
- Majelis Syura, viii, xi, 3, 21, 82, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 125
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), 23
- Manhaj Ad-Da'wah Ath-Thulabiyyah, 72
- Manhaj Renovasi Dakwah Kampus, 101
- Manhaj Revitalisasi Dakwah Kampus, 101
- Mashadi, 41
- Masjid Ukhuwah Islamiyyah, 50
- Masyumi, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 35, 38, 62, 145
- Miftah Faridl, 37
- mihwar muassasi*, 2, 65
- mihwar sya'bi*, 2, 63
- mihwar tandhimi*, 62
- M. Natsir, 32, 38, 46
- Mohammad Hatta, 21
- Mohammad Natsir, 23
- M. Rasjidi, 23, 32, 38
- muassasah*, 63
- muassis*, 31, 33, 50
- muayyid*, 132, 156
- Muhammad Dawam Rahardjo, 34
- Muhammadiyah, 2, 26, 32, 71, 135
- Muhammad Misbakhun, 122
- Muhammad Quthb, 27, 33, 56
- Munawir Syadzali, 38
- Murtadha Muthathhari, 29
- Mustafa Masyhur, 49

- Musthafa as-Siba'i, 32, 33
Musyafa Ahmad Rahim, 124
- Nahdhatul Ulama, 76
Normalisasi Kehidupan Kampus
atau Badan Koordinasi Kema-
hasiswaaan, 39
Nur Agis Aulia, 96
Nurcholis Madjid, 34, 35
Nurul Fikri, 64, 77, 95
- Orde Baru, vii, viii, xv, 1, 16, 21,
22, 23, 24, 28, 33, 35, 36, 37,
39, 41, 43, 44, 62, 63, 131, 146,
148
Osman Raliby, 24, 38
pan-islamisme, 12, 20
Partai Amanat Nasional (PAN), 2
Partai Bulan Bintang (PBB), 2, 62
Partai Demokrasi Indonesia
(PDI), 22
Partai Demokrasi Islam Indone-
sia (PDII), 21
Partai Gelombang Rakyat
(Gelora), 106
Partai Katolik, 11, 22
Partai Keadilan (PK), 65
Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), 2
Partai Kristen Indonesia (Par-
kindo), 22
Partai Muslimin Indonesia (Par-
musi), 22
Partai Musyawarah Rakyat Ban-
yak (Murba), 22
Partai Nasdem, 123
Partai Nasional Indonesia (PNI),
22
Partai NU, 22
Partai Persatuan Pembangunan
(PPP), 2, 4, 22, 53, 61
Partai Serikat Islam Indonesia
(PSII), 22
Pedoman Dakwah Kampus 1994,
72
pegawai negeri sipil (PNS), 65
pegawai swasta, 65
Pelajar Islam Indonesia (PII), 35
Pembukaan UUD 1945, xv, 21
Pemilirah Raya Mahasiswa
[Pemira], 70
pemilu, 53, 61, 107, 108, 123, 134,
148, 149, 151
Penerbit Al-Ishlahy Press, 63
Pengkajian Nilai Dasar Islam
(PNDI), 71
Pengkajian Risalah Tauhid, 71
Persatuan Islam (Persis), 2
Persatuan Sarjana Muslim Indo-
nesia (Persami), 35

- Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti), 22
- petro-dollar, 26
- Piagam Jakarta, 21
- pilkada, 107, 108, 134
- Pilkada, 4, 15, 107, 115, 124, 132, 151
- pilkada DKI Jakarta, 108
- pilkada Gubernur Jawa Barat, 108
- pilkada Wali Kota Depok, 108
- Pola Perjuangan Revolusioner Islam, 23
- Prawoto Mangkusasmita, 23, 38
- Prijanto, 115
- Program Pembinaan SDM Strategis (PPSDMS)-NF, 95
- qiyadah, 106, 113, 116
- Rahmat Abdullah, viii, 45, 48, 49, 50, 54, 57, 58, 62, 146
- Raja Fahd Ibn Abd Aziz, 26
- Revolusi Iran, 25, 29
- Reza S. Zaki, 96
- Rumah Kepemimpinan (RK), 95
- Sahabat Asrama UI, 96, 97
- Said Hawwa, 30, 31, 33, 56
- SALAM UI, 73, 76, 88, 101, 103, 106
- Salim Segaf Al-Jufri, 28, 31, 41, 53, 58
- Saudi Arabia, viii, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 40, 41, 56, 145, 146, 147
- Sayyid Quthb, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 46, 56
- Sayyid Sabiq, 30
- Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), 64
- Sekolah Islam Terpadu (SIT), 64
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), 40
- sirriyah al-tanzim wa alamiyyah al-dakwah*, 99
- SMA Islam Terpadu (SMAIT), 64
- SMP Islam Terpadu (SMPIT), 64
- Soeharto, 21, 34, 60, 61, 146, 149
- Soekarno, 21, 30
- Suara Mahasiswa UI, 83, 152
- Sudomo, 36, 53, 61
- Suripto, 61, 69
- Surrahman Hidayat, 41
- Syah Reza Pahlevi, 25
- Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, 72
- Syekh bin Baz, 27
- Syiah, 25, 29, 50
- Takwinul Muballighin, 94

- Taman Qur-an Rabbi Radhiyya, 64
- tamhidi*, 132, 155
- Tamsil Linrung, 122, 144
- tandhim*, 54, 58, 59, 60, 62, 68, 105, 106
- tasawwuf*, 68
- the modern cadre party*, 4
- Tim Forum Peduli Jamaah Sholahuddin UGM, 73
- Timur Tengah, viii, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 40, 41, 53, 57, 59, 64, 145, 149
- Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Islam (UKKI) Unair Surabaya, 40
- Universitas Al-Azhar, 28
- Universitas Andalas (UNAND), 39
- Universitas Diponegoro (UNDIP), 39
- Universitas Gadjah Mada (UGM), xvi, 8, 39
- Universitas Indonesia (UI), xvi, 8, 39
- Universitas Islam Imam Saud, 27
- Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), 39
- usroh*, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 55, 57, 58
- Vijaya Fitriyasa, 80, 104
- Yanuar Rizki Pahlevi, 80, 83, 99, 100
- Yayasan Ibu Bahagia, 64
- Yayasan Ibu Harapan, 64
- Yayasan Indonesia Madani (YIM), 91
- Yusril Ihza Mahendra, 87
- Yusuf Al-Qordhowi, 31, 33, 49, 56
- Yusuf Supendi, 41, 64, 151
- Zahfan B. Sampurno, 124

TENTANG PENULIS



Fachri Aidulsyah merupakan Peneliti pada Pusat Studi Kewilayahan-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRW-BRIN). Penulis memperoleh gelar sarjana dari Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2014, penulis telah aktif terlibat dalam menjalankan penelitian di bidang sosiologi agama dan *ethnonationalism* di beberapa daerah di Indonesia, Malaysia, dan Belanda. Saat ini, melalui beasiswa Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD), penulis tengah melanjutkan studi pascasarjana pada program Languages and Cultures of Southeast Asian Studies di Universität Hamburg, Jerman. Adapun buku terbarunya bersama tim peneliti lainnya ialah *Diaspora Muslim Indonesia di Belanda: Identitas, Peran, dan Konektivitas Keagamaan Global* (Obor, 2020). Penulis dapat dihubungi pada fachri.aidulsyah@brin.go.id.

Buku ini tidak diperjualbelikan

KAMPUS, ISLAM, DAN POLITIK:

DINAMIKA ELITE POLITIK DAN KEGALAUAN IDENTITAS GERAKAN TARBİYAH PASCAREFORMASI

Momentum Reformasi 1998 menjadi ajang berbagai kalangan untuk turut serta dalam arus perubahan, termasuk di kalangan komunitas dakwah kampus. Sebagai respons atas tekanan politik Orde Baru sebelumnya, gerakan Tarbiyah memutuskan bertransformasi menjadi partai politik Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Transformasi fenomenal tersebut tentunya masih kental diwarnai pemikiran dan gagasan Ikhwānūl Muslimīn yang berakar pada gerakan Tarbiyah.

Buku ini membahas perjalanan gerakan Tarbiyah secara komprehensif dari cikal bakal kemunculannya di era kebangkitan politik Islam, perjuangannya di lembaga dakwah kampus, hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi sebuah partai politik dengan segala dinamika dan problematikanya yang bahkan mencapai level kegalauan identitas. Menarik pula untuk memperhatikan tren ideologi politik gerakan tersebut di tiga lokasi utama (Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta) yang dalam buku ini direpresentasikan oleh tiga kampus besar di Indonesia yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam buku ini juga disajikan kutipan wawancara langsung penulis dengan tokoh-tokoh gerakan Tarbiyah dan aktivis-aktivis yang terlibat sehingga memperkaya sudut pandang pembaca dalam mengamati fenomena-fenomena politik di dalamnya dari berbagai sisi. Buku ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan bacaan yang menarik bagi pegiat sosial politik, akademisi, dan pembaca yang memiliki minat dalam isu-isu politik.



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI:10.55981/brin.591



e-ISBN: 978-623-8052-90-5

